
**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

**“PENGUATAN KARAKTER CINTA TANAH AIR PADA
GENERASI MUDA MELALUI MULTIDISIPLIN ILMU”**



**Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama dan Kuliah
Universiter (P2KBKU)
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)
Universitas Negeri Malang
2019**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL :

“PENGUATAN KARAKTER CINTA TANAH AIR PADA GENERASI MUDA MELALUI MULTIDISIPLIN ILMU”

Tim Editor Artikel Seminar

Titis Thoriquttyas, M.Pd.I

Moch. Wahib Dariyadi, S.Pd., M.Pd

Dr. Moh. Khasairi., M.Pd

Dr. Achmad Sultoni, S.Ag., M.Pd.I.



ISSN: 2685-0265

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun,
tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh : UM Press

Jl. Semarang 5 Malang

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Illahi Rabbi atas terselenggaranya Seminar Nasional dengan tema “PENDIDIKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama dan Kuliah Universiter, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), Universitas Negeri Malang pada tanggal 14 November 2018. Kami menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Malang yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil,
2. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang yang telah memberikan arahan,
3. Prof. A. Effendi Kadarisman, M.A., Ph.D sebagai *Keynote Speaker*,
4. Muhammad Cholil Nafis, M.A., Ph.D sebagai *Keynote Speaker*,
5. Yudi Latief, M.A., Ph.D sebagai *Keynote Speaker*,
6. Segenap Panitia Seminar Nasional P2MU, LP3, UM
7. Seluruh Peserta seminar yang telah berpartisipasi aktif.
8. Semua pihak yang telah memberikan kontribusinya sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar.

Kami berharap semoga prosiding ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademisi saja, namun juga praktisi dan pemerintah dalam mengembangkan program-program Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air ditataran akademik maupun kalangan masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
ISLAM DAN CINTA TANAH AIR <i>Achmad Sjafi'i, UNTAG Surabaya</i>	6
KONTRIBUSI MODEL INTERAKSI SOSIAL DAN <i>SELF ESTEEM</i> DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN MORAL REMAJA PADA JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs DI KABUPATEN TULUNGAGUNG <i>Ajar Dirgantoro, M. Abdul Roziq Asrori, STKIP PGRI Tulungagung</i>	15
PANCASILA DAN PEMAKNAAN NILAI SPIRITUALITAS (Aktualisasi Pancasila Dalam Pendidikan Agama Sebagai Dialektika Logis Menyemai Kesadaran Berbangsa Generasi Milenial) <i>Akhiyat, IAIN Jember</i>	35
MAKNA PENDIDIKAN MORAL, PENDIDIKAN KARAKTER DAN REALISASINYA TERHADAP PENGUATAN NILAI-NILAI NASIONALISME <i>Farida Ariani, PPs Universitas Negeri Malang</i>	49
IMPLEMENTASI BUDAYA SEKOLAH DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PATRIOTISME REMAJA <i>Mamik Rahayu, PPs Universitas Negeri Malang</i>	64
PANCASILA, NASIONALISME DAN PROBLEM FUNDAMENTALISME KEAGAMAAN <i>Mohamad Anas, Universitas Brawijaya</i>	75
PENANAMAN NILAI-NILAI CINTA TANAH AIR PADA ANAK MELALUI <i>FIELD TRIP</i> <i>Umi Salamah, Ahmad Said, STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang</i>	87
STRATEGI RULE MODEL DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ETIKA, MORAL DAN CITA TANAH AIR PADA SISWA <i>Reflianto, PPs Universitas Negeri Malang</i>	88
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM <i>Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, Sri Handayana, Deri Ciciria, IAIN Metro, Lampung</i>	102

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA NEGERI 5 MALANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN BAHAYA RADIKALISME DI SEKOLAH <i>Anis Isrofin, SMAN 8 Malang</i>	113
MENANAMKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR MELALUI PEMBELAJARAN QAWAID SYAMILAH <i>Moh. Khasairi, Universitas Negeri Malang</i>	121
<i>A LIFE-BASED LEARNING TEXTBOOK AS A SUPPORT FOR CIVICS INSTRUCTION TO STRENGTHEN STUDENTS' SPIRIT OF NATIONALISM</i>	129
<i>M. Alifudin Ikhsan</i>	
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA BERLANDASKAN NILAI-NILAI PANCASILA <i>Herlan Prasetyo, PPs Universitas Negeri Malang</i>	141

ISLAM DAN CINTA TANAH AIR

Achmad Sjafi'i

FISIP UNTAG SURABAYA

ahmadsyfi@untag-sby.ac.id

Abstrak

Rasa cinta tanah air sudah seharusnya di terapkan di lingkungan keluarga, kampus, tempat tinggal, bahkan dimanapun berada. Sebagai generasi penerus bangsa hendaknya dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Sebagai generasi muda juga harusnya kita dapat berperan seperti para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Para pahlawan berani mengorbankan diri karena mereka mencintai tanah airnya. Mereka mencintai rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Mereka tidak mau negerinya dijajah. Para pejuang yang gugur membela bangsa disebut pahlawan. Cinta mereka pada bangsa dan tanah air Indonesia tidak bisa diragukan lagi. Orang yang cinta tanah air berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan negaranya. Persamaan sejarah muncul sebagai unsur kebangsaan karena unsur ini merupakan salah satu yang terpenting demi menyatukan perasaan, pikiran, dan langkah-langkah masyarakat. Sejarah menjadi penting karena umat, bangsa, dan kelompok dapat melihat dampak positif atau negatif dari pengalaman masa lalu, kemudian mengambil pelajaran dari sejarah untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Sejarah yang gemilang dari suatu kelompok akan dibanggakan anggota kelompok serta keturunannya, demikian pula sebaliknya. Al Qur-an sangat menonjol dalam menguraikan peristiwa sejarah. Bahkan tujuan utama dari uraian sejarahnya adalah guna mengambil i'tibar (pelajaran), guna menentukan langkah berikutnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur kesejarahan sejalan dengan ajaran Al-Quran. Sehingga kalau unsur ini dijadikan salah satu faktor lahirnya paham kebangsaan, hal ini inklusif didalam ajaran Al Qur-an, selama uraian kesejarahan itu diarahkan untuk mencapai kebaikan, kerukunan, kesejahteraan dan kemaslahatan. Sebagai warga Negara Indonesia harus menjaga tanah air bersama dan mencintainya sepenuh hati. Hidup rukun dan saling menyayangi antar anggota keluarga merupakan bentuk cinta tanah air dari hal yang kecil seperti itu. Menjaga kebersihan juga merupakan wujud cinta tanah air.

Kata Kunci: Islam; Tanah Air

Pendahuluan

Salah seorang ulama Indonesia KH Muhammad Hasyim Asy'ari (1871-1947) berhasil mencetuskan prinsip *hubbul wathani minal iman* (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah

air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering.

Agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrem. Sedangkan nasionalisme tanpa agama akan kering. Hal ini terbukti ketika fenomena ekstremisme agama justru lahir dari orang dan kelompok orang yang terlalu eksklusif dan sempit dalam memahami agama tanpa memperhatikan realitas sosial kehidupan.

Jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Di sinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan. Perjuangan melawan dan mengusir penjajah ditegaskan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai kewajiban agama atas seluruh rakyat Indonesia sebagai kaum beragama yang sedang terjajah.

Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia.

Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan *hubbul wathan minal iman*.

Konsekuensi, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan NKRI, maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara. Cintailah negeri kita dengan terus merawat dan menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkannya.

Perlu dipahami juga bahwa cinta tanah air mempunyai makna, Indonesia terdiri dari 700 suku lebih yang mempunyai tradisi, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Orang yang beragamnya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memerhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya.

Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja. Bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Cukuplah kiranya kita belajar kepada bangsa-bangsa lain yang penduduk negerinya berpecah belah, saling menumpahkan darah, saling bunuh dan masing-masing mereka berjuang atas nama agama yang sama, namun mereka tidak peduli kepada nasib tanah airnya. Itu semuanya terjadi karena kecintaan mereka pada agama yang tidak diiringi dengan kecintaan kepada tanah air yang juga merupakan tuntutan agamanya.

Artinya: *“Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.”* (QS. Al-Baqarah : 126)

Dasar Quran Dan Hadits

Dalil Cinta Tanah Air Dari Al-Qur'an

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Qur'an surat Al-Qashash ayat 85:

Artinya: *“Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.”* (QS. Al Qashash: 85)

Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 66.

Artinya: *“Dan sesungguhnya jika seandainya Kami perintahkan kepada mereka (orang-orang munafik): ‘Bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu!’ niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka...”* (QS. An-Nisa': 66).

Dalil Cinta Tanah Air dari Hadits

Berikut ini adalah hadits-hadits yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadits, yang dikupas tuntas secara gamblang:

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari sahabat Anas; bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian, dan melihat dinding-dinding madinah beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakannya (untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah. (HR. Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi).

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam kitabnya *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari* menegaskan bahwa dalam hadits tersebut terdapat dalil (petunjuk): pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah; kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Badr Al-Din Al-Aini dalam kitabnya *'Umdatul Qari Syarh Shahih Bukhari* menyatakan: “Di dalamnya (hadits) terdapat dalil (petunjuk) atas keutamaan Madinah, dan (petunjuk) atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya.” Imam Jalaluddin Al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Tausyih Syarh Jami Al-Shahih* menyebutkan: “Bercerita kepadaku Sa'id ibn Abi Maryam, bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata: mengabarkan padaku Humaid, bahwasannya ia mendengar Anas RA berkata: Nabi SAW ketika kembali dari bepergian, dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah: Harits bin Umair, dari Humaid: beliau menggerakkannya (untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah. Sependapat dengan Ibn Hajar Al-Asqalany, Imam Suyuthi di dalam menjelaskan hadits sahabat Anas di atas, memberikan komentar: di dalamnya (hadits tersebut) terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Qur'an dan Hadits, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti; Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalany, Imam Jalaluddin al-Suyuthi, Abdurrahim al-Iraqi, Syekh Ismail Haqqi al-Hanafi dan yang lainnya. Sehingga vonis cinta tanah air tidak ada dalilnya, jelas tidak benar dan tidak berdasar.

Pembahasan

Nasionalisme berasal dari kata *nation* (B. Inggris) yang berarti bangsa. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berperintahan sendiri; (2) golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan, dan (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian: paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air.

Selanjutnya, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan nasionalisme yaitu nasionalisme dalam arti sempit.

Arti dari cinta tanah air adalah cinta kepada Negara tempat kita dilahirkan, dibesarkan dan memperoleh kehidupan di dalamnya. Karena dari Negara kita tersebut semua yang kita butuhkan akan kita dapatkan. Cinta tanah air adalah sama saja rela berkorban demi kepentingan Negara. Memajukan kehidupan bangsa, mencerdaskan diri demi ikut berpartisipasi dalam rangka proses pembangunan tanah air atau negaranya dari Negara yang kecil, berkembang sampai menjadi Negara yang maju. Menghayati arti dari cinta tanah air memanglah bukan masalah yang mudah, perlu kesabaran dan kerendahan hati untuk menjalankan hal tersebut, dikarenakan banyak ancaman dan tantangan yang dapat datang dari mana saja, baik itu dalam diri kita maupun dari luar diri kita, baik itu datang dari dalam negeri maupun datang dari luar negeri, tetapi asal kita mempunyai tekad yang kuat untuk mencintai tanah air kita tanah air Indonesia dengan sepenuh hati, pastilah kita akan di mudahkan oleh yang Maha Kuasa dalam segala halnya terutama dalam tindakan yang positif. Perlu diingat bahwa mencintai dan menjaga tanah air Indonesia negaranya sendiri dengan sepenuh hati adalah bentuk perbuatan yang merupakan bagian dari iman.

Cinta tanah air dan bangsa pada hakekatnya cinta tanah air dan bangsa adalah kebanggaan menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang berujung ingin berbuat sesuatu yang mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Pada keadaan saat ini apa yang bisa dibanggakan dari negara dan bangsa Indonesia? Generasi “founding fathers” pada masa penjajahan berhasil membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa yang pada akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau saja rasa cinta tanah air dan bangsa sekali lagi bisa menjadi faktor yang memotivasi bangsa Indonesia, ada kemungkinan bangsa Indonesia akan bisa bangkit kembali dengan masyarakatnya bisa menghasilkan karya-karya yang membanggakan kita sebagai bangsa.

Bangsa Amerika yang selalu memotivasi dirinya dengan menghormati bendera dan lagu kebangsaannya, selalu memotivasi bangsanya untuk mencintai tanah air dan bangsanya. Bung Karno dulu juga sering menceritakan kebesaran kerajaan Majapahit untuk memotivasi bangsa Indonesia bahwa kita dulu adalah negara yang besar, dengan kekuatan armada lautnya bisa menguasai seluruh Nusantara, termasuk Singapore, Malaysia, Madagaskar, bahkan juga selatan Taiwan. Bahkan menurut sejarah dulu Singapore itu namanya Temasek, dan yang memberi nama ini adalah patih Gajahmada, oleh Raffles entah kenapa diganti jadi Singapore.

Dalam lagu mengheningkan cipta, kita mengenang jasa para pahlawan. Mereka telah gugur di medan perang. Para pahlawan berani mengorbankan diri karena mereka mencintai tanah airnya. Mereka mencintai rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Mereka tidak mau negerinya dijajah.

Kata lain cinta tanah air adalah patriotisme. Kata ini dibentuk dari kata patria dan isme. Kata patria berarti bangsa atau tanah air. Kata isme dalam kata patriotisme adalah ajaran, semangat, atau dorongan. Jadi, kata patriotisme memiliki arti ajaran atau semangat cinta tanah air. Para pejuang yang gugur membela bangsa disebut pahlawan.

Cinta mereka pada bangsa dan tanah air Indonesia tidak bisa diragukan lagi. Bagaimana dengan kita yang tidak terlibat dalam perang? Apakah kita bisa disebut orang yang memiliki semangat cinta tanah air? Apa contohnya? Banyak sekali orang yang memiliki semangat cinta tanah air. Orang yang cinta tanah air berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan negaranya

Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala, tetap di puja-puja bangsa,” itu merupakan penggalan lagu wajib Nasional “**Indonesia Pusaka**” yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Tanah air merupakan tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita hidup, dibesarkan, dan akhirnya kembali ke pangkuan Tuhan YME, Allah SWT. Dalam Penjelasan Umum UU No 12 Tahun 2006 dirumuskan” *Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.*

Salah satu kewajiban dari warga negara terhadap negaranya adalah kewajiban mencintai tanah air. Landasan yuridis warga negara Indonesia diwajibkan mencintai tanah air diatur dalam konstitusi, Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) merumuskan “*Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*”. Dalam ayat (2) “*untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung*”. Konstitusi telah mewajibkan setiap Warga Negara Indonesia untuk menjaga, mempertahankan, dan mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gangguan musuh baik internal maupun eksternal. Kewajiban-kewajiban

tersebut merupakan refleksi dari cinta, karena cinta pada dasarnya adalah rasa sayang, rasa ingin menjaga, rasa kepemilikan, dan tidak rela apabila sesuatu yang disayanginya diganggu, dirusak dan direbut oleh orang lain.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam Islam kecintaan terhadap tanah air telah diajarkan oleh Nabi Muhammad *Saw*, suri tauladan yang baik bagi umat manusia sekalian alam. Nabi Muhammad *Saw* lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun Gajah dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad *Saw* sangat mencintai kota Makkah sebagai kota kelahirannya. Dalam suatu hadis diriwayatkan pada saat Nabi Muhammad *Saw* hendak hijrah ke Madinah, karena tindakan represif kaum musrik dan kafir Quraisy, Nabi Muhammad *Saw* bersabda "*alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu*" (HR Ibnu Hibban). Hadis diatas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad *Saw* sangat mencintai kota **Makkah Al-Mukarramah** sebagai kota kelahirannya, beliau meninggalkan kota tersebut dalam keadaan terpaksa, karena beliau mendapat intimidasi, ancaman, gangguan, dalam menyebarkan syiar Islam disana. Sehingga mau tidak mau beliau harus meninggalkan kota Makkah demi misi menyebarkan ajaran Islam.

Selain mencintai kota kelahirannya, Nabi Muhammad *Saw* juga sangat mencintai kota **Madinah Al Munawarah**, kota di mana peradaban Islam berkembang, kota mulia, tempat turunnya wahyu, kota di mana jasad Nabi Muhammad *Saw* dimakamkan, dan kota yang dihuni oleh masyarakat multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam hidup rukun dan saling menghormati dibawah aturan dasar Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad *Saw*. Madinah merupakan tempat kedua yang dicintai oleh Nabi Muhammad *Saw* setelah kota Makkah. Dalam suatu hadis diriwayatkan dari sahabat Anas, ketika Nabi Muhammad *Saw* kembali dari bepergian, dan beliau melihat dinding-dinding Madinah beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakannya (untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah. (HR. Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi). Selain itu Nabi Muhammad *Saw* juga telah menjadikan Kota Madinah sebagai kota haram, Dalam sebuah hadis disebutkan "*Sesungguhnya Nabi Ibrâhîm menjadikan kota Mekah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota yang haram juga*". (HR. Muslim)

Lebih lanjut, **Ali Bin Abi Thalib** orang terdekat Rasulullah, yang merupakan sepupu, sahabat sekaligus menantu Rasul, menjelaskan “*Umiratil buldan bihubbil awthan.*” Negeri akan dimakmurkan dengan kecintaan pada tanah air. Ucapan Imam Ali tersebut menggambarkan, suatu Negara dapat makmur apabila warga negara cinta terhadap tanah airnya (negaranya). Ucapan tersebut sangat logis, dengan cinta membuat warga negara peduli terhadap tanah airnya, ia akan memiliki rasa kepemilikan dan berusaha memberikan yang terbaik bagi tanah airnya. Dalam konteks Indonesia, kecintaan terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan setia kepada dasar Negara (Pancasila dan UUD 1945), mempedomani prinsip *Bhineka Tunggal Ika*, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (tidak korupsi, tidak mendukung gerakan para teroris), ikut mensukseskan program pemerintah (membayar pajak), menjaga nama baik bangsa dan NKRI, hidup rukun, saling hormat menghormati, gotong royong, dan melakukan tindakan-tindakan positif lainnya. Dengan melakukan hal-hal tersebut maka tanah air (Negara) akan menjadi makmur.

Masih menurut Imam Ali “*Min karamil mar’i bukaa`uhu ‘ala ma madha min zamanihi wa haninihi ilaa awthaanihi.*” Di antara kemuliaan seseorang adalah tangisannya akan apa yang lepas dari umurnya, dan **kecintaannya pada tanah airnya**. Imam Ali mengajarkan kepada kita bahwa mencintai tanah air merupakan hal yang penting, apabila seseorang menangis karena kecintaan terhadap tanah air, misalnya ia ingin tanah airnya makmur, aman, dan damai, serta masyarakatnya sejahtera. Maka hal-hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kemuliaan manusia, karena fitrah manusia adalah menginginkan yang baik dan menolak yang tidak baik. Begitulah beliau mengajarkan kepada kita tentang anjuran untuk mencintai tanah air.

Membangun negeri, menjaga NKRI, menegakan konstitusi, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, dan hidup dalam bingkai “*Bhineka Tunggal Ika*” adalah bagian dari mengimplementasikan nilai-nilai agama, berwarganegara yang baik merupakan salah satu cerminan dari beragama yang baik. Nabi Muhammad *Saw*, suri tauladan setiap muslim, begitupun orang terdekat beliau, Ali Bin Abi Thalib, telah memberikan contoh kepada kita tentang anjuran mencintai tanah air (Negara), sehingga kita sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai orang muslim, harus mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Hubbul Wathon Minal Iman* (Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman).

Penutup

Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran/nilai-nilai Islam.

Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam hal membangkitkan kecintaan pada tanah air dan bangsa, sehingga seluruh komponen bangsa dengan sungguh-sungguh mau bekerja demi kejayaan Indonesia. Untuk itulah harus “Kobarkan Semangat Cinta Tanah Air Indonesia”, untuk terus bergerak menuju tercapainya Kejayaan Nusantara ~ Indonesia Raya.

Sebagai warga Negara Indonesia harus menjaga tanah air bersama dan mencintainya sepenuh hati. Hidup rukun dan saling menyayangi antar anggota keluarga dan masyarakat merupakan bentuk cinta tanah air dari hal yang kecil seperti itu. Menjaga kebersihan juga merupakan wujud cinta tanah air. Jadi sebagai warga Negara Indonesia kita bisa mulai dari hal kecil untuk mencintai Negara kita. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga wilayahnya atau mencintai tanah airnya.

Daftar Pustaka

Lukman Ali. Dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994,

Ali Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1405 H,

Wahbah Al-Zuhaili, *al-Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj*, Damaskus, Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H, Juz 5,

Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Damaskus, Dar Al-Fikr, 1422 H, Juz 1,

Muhammad Mahmud al-Hijazi, *Tafsir al-Wadliih*, Beirut, Dar Al-Jil Al-Jadid, 1413 H, Juz 2,

Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Tausyih Syarh Jami Al-Shahih*, Riyad, Maktabah Al-Rusyd, 1998, Juz 3,

Abdurrahim Al-Iraqi, *Tatsrib fi Syarh Taqribil Asanid wa Tartibil Masanid*, Beirut, Dar Ihya'i Al-Turats Al-Arabi, Juz 4,

KONTRIBUSI MODEL INTERAKSI SOSIAL DAN *SELF ESTEEM* DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN MORAL REMAJA PADA JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ajar Dirgantoro ¹⁾

M. Abdul Roziq Asrori ²⁾

^{1), 2)} STKIP PGRI Tulungagung

¹⁾ surel: ajardirgantoro@gmail.com, ²⁾ surel: asroriroziq@gmail.com

ABSTRAK

Usia remaja merupakan periode penting dalam perkembangan moral, remaja dihadapkan pada berbagai kontradiksi antara konsep-konsep moral yang telah diterima dan dialami dari dalam maupun dari luar keluarganya, termasuk sekolah. Beberapa hasil penelitian percaya bahwa moral dapat berkembang karena interaksi sosial dan self esteem. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui hubungan antara interaksi sosial dan self esteem dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung. Ada tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu interaksi sosial (X_1) dan self esteem (X_2) serta kecerdasan moral (Y). Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan *expost facto*, yang bersifat deskriptif korelasional. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung yang diwakili oleh siswa kelas VII, VIII dan IX pada SMP Islam Al Hikmah Mlathen di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 288 siswa. Pada penelitian ini mengambil 25% untuk ukuran jumlah sampel. Dengan demikian untuk jumlah sampelnya $25\% \times 288 = 72$ siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologi dan angket. Validitas dan Reliabilitas Instrumen pada penelitian ini mengacu dari penyusunan instrumen yang digunakan. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan Uji Asumsi dan Uji Hipotesis dengan bantuan SPSS 22.00 for windows. Dengan hasil, koefisien pada regresi variabel Konstanta sebesar 35,337 menyatakan bahwa jika tidak ada interaksi sosial (X_1) dan self esteem (X_2) maka kecerdasan moral (Y) adalah 35,337. Koefisien regresi variabel interaksi sosial (X_1) sebesar 0,178 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point, variabel interaksi sosial (X_1) akan meningkatkan kecerdasan moral sebesar 0,178 dan koefisien regresi variabel self esteem (X_2) 0,185 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point, variabel self esteem (X_2) akan meningkatkan kecerdasan moral sebesar 0,185. Sedangkan pada uji hipotesis menunjukan hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan self esteem dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung baik parsial maupun simultan.

Kata Kunci: Interaksi Sosial, Self Esteem, Kecerdasan Moral, Remaja

A. LATAR BELAKANG

1. Pendahuluan

Beberapa kasus krisis moral yang terjadi di Indonesia, antara lain data yang diperoleh dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menunjukkan bahwa ada

229 kasus tawuran pelajar sepanjang Januari-Oktober tahun 2013. Jumlah ini meningkat sekitar 44% dibanding tahun 2012 yang hanya 128 kasus. Dalam 229 kasus kekerasan antar pelajar SMP dan SMA itu, 19 siswa meninggal dunia. Data dari BNN (Badan Narkotika Nasional) menemukan bahwa 50-60% pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan remaja yakni kalangan pelajar dan mahasiswa, lebih spesifik lagi data dari BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Tulungagung Tahun 2017 menemukan bahwa 30% pengguna narkoba adalah kalangan remaja, yakni kalangan pelajar pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan sederajat.

Salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut di atas adalah karena remaja kurang memiliki kemampuan untuk memilih tindakan yang benar untuk dilakukan dalam situasi tersebut. Penanganan masalah krisis moral ini merupakan tanggung jawab semua pihak di negara ini, termasuk sekolah. Dikemukakan oleh Hoffman (dalam Santrock, 2007) dalam teori *disekuilibrium kognitif* bahwa masa remaja merupakan periode penting dalam perkembangan moral. Beberapa hasil penelitian percaya bahwa moral berkembang karena interaksi sosial, misalnya karena diskusi atau dialog (Walker dan Taylor; Younis; dalam Berns, 2010). Interaksi di antara teman sebaya yang memberikan pendapat berbeda dapat meningkatkan pemahaman moral. Remaja akan menyadari bahwa kehidupan sosial dapat didasarkan pada hubungan setara ketimbang otoritas ketika remaja bernegosiasi dan berkompromi dengan teman sebaya (Killen dan Nucci, dalam Berk, 2012).

Self esteem juga mempengaruhi perilaku delikueni remaja. Remaja yang memiliki *self esteem* yang tinggi akan memilih pemecahan masalah yang berorientasi pada masalah tersebut. Remaja yang memiliki *self esteem* yang rendah cenderung memilih pemecahan masalah secara emosional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meskauskiene (2015) pada remaja menunjukkan bahwa interaksi sosial yang dilakukan remaja dapat mempengaruhi *self esteem* remaja. Interaksi yang dapat memperkuat *self esteem* adalah interaksi yang positif. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa model interaksi sosial dan *self esteem* merupakan komponen penting yang layak diperhitungkan sebagai faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung.

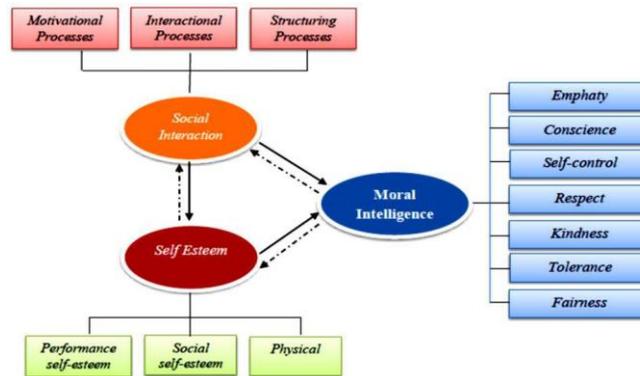
2. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara interaksi sosial dan *self esteem* dalam meningkatkan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain: a) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai kecerdasan moral remaja, dan b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu beberapa pihak untuk memberikan perhatian lebih terhadap kecerdasan moral remaja

sehingga dapat disusun program atau pendidikan moral secara lebih efektif serta melalui model empirik nantinya diharapkan pihak yang berkaitan dapat melakukan evaluasi terhadap pendidikan moral untuk peningkatan kecerdasan moral.

3. Model Teori

Model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam penelitian ini seperti pada gambar 1.1. dibawah ini:



Gambar 1.1.
Model Teori Interaksi Sosial dan Self Esteem pada Kecerdasan Moral

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kecerdasan Moral

1.1. Hakekat Kecerdasan Moral

Secara etimologis, kecerdasan moral berakar dari dua term kata yaitu kecerdasan (*intelligence*) dan moral. Secara umum, konsep kecerdasan mengacu pada kemampuan untuk berpikir dan belajar, sebagai suatu konsep umum berhubungan dengan kemampuan kognitif (Sternberg, 1990). Gardner (dalam Sukmadinata, 2007) juga memberikan definisi lain tentang kecerdasan, yaitu bahwa kecerdasan adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk memecahkan masalah, mengembangkan masalah baru yang hadir untuk dipecahkan, kemudian mengambil hikmah atau pelajaran yang bermanfaat dari masalah-masalah yang dihadapi untuk kehidupannya. Teori kecerdasan majemuk (*multiple intelligence*) yang dikemukakan oleh Gardner merupakan teori kecerdasan yang paling berpengaruh pada abad 20 (Gardner, 1999). Piaget menganalisa moralitas dari perspektif bagaimana suatu pengalaman sosial individual berhasil dalam pembentukan penilaian mengenai hubungan sosial, aturan, hukum dan otoritas (Turiel, dalam Berns, 2010).

Pemikiran atau penalaran moral individu ini menjadi dasar Kohlberg (dalam Santrock, 2007) dalam menjelaskan tentang tahapan perkembangan moral individu. Penalaran moral menjadi elemen yang sangat penting dalam memecahkan masalah-

masalah moral. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Gottfredson dan Hirsh (dalam Kruger, 2012) bahwa rendahnya perilaku moral merupakan refleksi dari rendahnya penalaran moral. Hal ini karena penalaran moral membutuhkan *complex recognition* dan kemampuan analisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penalaran moral akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia anak. Penalaran moral anak dapat ditingkatkan melalui kemampuan berpikir kritis dan diskusi. Diskusi atau dialog dapat terjadi pada saat anak melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya (Mason & Gibs, dalam Berns, 2010)

1.2 Aspek-Aspek Kecerdasan Moral

Borba (2001) merumuskan kecerdasan moral dalam kebajikan moral yang terdiri dari: *emphaty, conscience, self control, respect, kindness, tolerance* dan *fairness*. Selanjutnya menurut Kruger (2012) bahwa *moral intelligence* meliputi konsep *moral awareness, moral reasoning* dan *moral competence*.

1.3 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Moral

Perkembangan moral, sama halnya dengan kemampuan bahasa, juga tergantung pada faktor biologi dan belajar. Berns (2007) berpendapat bahwa ada tiga keadaan yang berpengaruh terhadap perkembangan moral seseorang, yaitu: a) Situasi; b) Individu yang meliputi temperamen, kontrol diri (*self-control*), harga diri (*self-esteem*), umur dan kecerdasan, pendidikan, interaksi sosial, emosi; dan c) Sosial yang meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa dan masyarakat.

2. Interaksi Sosial

2.1 Definisi Interaksi Sosial

Interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pertukaran yang dinamis dimana masing-masing individu dapat mengambil arti, penafsiran dan respon serta merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Dikatakan oleh Turner (1988) bahwa interaksi sosial didefinisikan sebagai suatu situasi dimana perilaku seseorang secara sengaja diatur oleh orang itu dan mempengaruhi dia, orang lain dan sebaliknya. Pada level yang paling intens, interaksi sosial merupakan suatu proses dimana gerak-gerik terbuka, pertimbangan tersembunyi, *basic physiology* seseorang mempengaruhi orang lain dan sebaliknya. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang tidak hanya mempengaruhi interaksi inividu tapi juga kualitas hubungan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok dan antar kelompok, yang ditandai dengan adanya saling mempengaruhi di antara kedua belah pihak.

2.2 Elemen Interaksi Sosial

Dikemukakan oleh Turner (1988) bahwa interaksi sosial memiliki beberapa elemen yaitu: a) *Motivational processes*, individu mendapatkan tenaga dan digerakkan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai tingkatan dan dalam berbagai

cara; b) *Interactional processes*, proses ini menunjukkan apa yang terjadi saat mereka mempengaruhi perilaku orang lain, melibatkan pemberian isyarat suatu tujuan perilaku dan dalam waktu yang bersamaan menginterpretasikan sinyal perilakunya sendiri dan perilaku orang lain; dan c) *Structuring processes*, proses ini menunjukkan bahwa interaksi sosial sering diulang.

2.3 Interaksi Sosial pada Masa Remaja

Pandangan *developmental construction view* menyatakan bahwa seiring dengan proses pertumbuhan pada individu maka individu akan memperoleh gaya berelasi dengan orang lain. Terdapat 2 variasi dalam pandangan tersebut, yaitu: a) variasi pertama, yang menekankan pada kontinuitas dan stabilitas relasi sepanjang hidup; dan b) variasi kedua, yang menekankan pada diskontinuitas dan perubahan relasi sepanjang masa hidup (dalam Santrock, 2007). Interaksi sosial dalam penelitian ini akan difokuskan pada interaksi sosial remaja dengan teman sebayanya dan orang tua. Pada masa remaja, teman sebaya memiliki peran atau pengaruh yang penting. Hasil riset menunjukkan bahwa nilai yang dianut orang tua dan kelompok teman sebaya memiliki pengaruh lebih besar pada remaja daripada pengaruh sekolah dan guru (Sullivan, dalam Santrock, 2007).

3. *Self Esteem*

3.1 Definisi *Self Esteem*

Self esteem dapat didefinisikan sebagai suatu sikap individu mengenai dirinya sendiri, meliputi *self evaluation* dalam dimensi positif dan negatif (Baron dan Byrne, 1991). Secara umum, sebagian besar *self esteem* mengacu pada evaluasi diri yang positif pada diri individu. *Self esteem* didefinisikan dengan mendasarkan pada 2 proses psikologis, yaitu evaluasi dan afeksi (Murk, 2006). Jadi dapat disimpulkan bahwa *self esteem* adalah bagaimana persepsi individu terhadap dirinya sendiri dan seberapa berharganya individu terhadap orang lain, meliputi *self evaluation* dalam dimensi positif dan negatif.

3.2 Dimensi *Self Esteem*

Dikatakan oleh Heatherton, T. F., dan Polivy, J (1991) bahwa ada 3 komponen utama dari *self esteem*, yaitu: a) *Performance self-esteem*, mengacu pada perasaan seseorang terhadap kompetensi umum dan meliputi kemampuan intelektual yang tinggi percaya; b) *Social self-esteem*, mengacu pada bagaimana individu percaya bahwa orang lain menerima individu tersebut; c) *Physical self-esteem*, mengacu pada bagaimana orang lain memandang fisiknya, meliputi kemampuan olah raga, daya tarik fisik, *body image*. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *self esteem* (Murk, 2006) yang antara lain adalah: a) Faktor orang tua; b) Urutan kelahiran; c) *Value*; d) Gender; dan e) Etnis dan Budaya.

3.3 *Self Esteem* pada Masa Remaja

Pada dasarnya, *self esteem* merupakan persepsi remaja terhadap dirinya. Dalam hal ini persepsi remaja tidak selalu sesuai dengan realitas. Berkembangnya relasi sosial yang dilakukan remaja membuat dampak tersendiri terhadap perkembangan *self esteem* remaja. Dukungan emosional dan persetujuan sosial dalam bentuk konfirmasi dari orang lain dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap *self esteem* remaja (Harter, dalam Santrock, 2007). Dukungan dan persetujuan sosial tersebut dapat diperoleh dari interaksi dengan orang tua, teman sebaya dan orang dewasa lain yang signifikan pada remaja tersebut (Berns, 2010).

4. Pengaruh Interaksi Sosial dan *Self Esteem* terhadap Kecerdasan Moral

Dikatakan oleh Bern (2007) bahwa perkembangan moral dan nilai-nilai terjadi dalam suatu *setting* sosial. Interaksi sosial juga mempengaruhi *self esteem* remaja, interaksi yang dimaksud adalah interaksi antara remaja dengan guru, orang tua dan teman sebayanya. *Self esteem* juga mempengaruhi perilaku delikueni remaja, remaja yang memiliki *self esteem* yang tinggi akan memilih pemecahan masalah yang berorientasi pada masalah tersebut. Remaja yang memiliki *self esteem* yang rendah cenderung memilih pemecahan masalah secara emosional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lalfakzuali (2015) menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara interaksi sosial dan *self esteem*. Semakin tinggi interaksi sosial maka makin tinggi *self esteem*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Reilaikd dan Lauterbach (2008) mengidentifikasi tingkat kecerdasan moral dan tingkat *self esteem* responden. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok responden yang memiliki kecerdasan moral yang tinggi juga memiliki *self esteem* yang tinggi juga dibandingkan dengan kelompok responden yang memiliki kecerdasan moral yang rendah.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian *expost facto*, yang bersifat deskriptif korelasional, karena fokus permasalahannya mengungkap hubungan dua variabel bebas dengan variabel terikatnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sebab semua data atau informasi diwujudkan dalam bentuk angka dan untuk menganalisis menggunakan statistik dengan bantuan SPSS 22.00 *for windows*.

2. Variabel Penelitian

2.1 Identifikasi Variabel

Ada 3 (tiga) variabel dalam penelitian ini, variabel bebas (*independen*) dalam penelitian ini adalah interaksi sosial (X_1) dan *self esteem* (X_2) sedangkan variabel terikat (*dependen*) dalam penelitian ini adalah kecerdasan moral (Y).

2.2 Definisi Operasional Variabel

a) *Kecerdasan Moral*

Kecerdasan moral didefinisikan sebagai kapasitas mental untuk menentukan bagaimana prinsip universal manusia bisa diterapkan dalam nilai-nilai, tujuan dan perbuatan seseorang, yang akan diukur dalam *integrity, responsibility, forgiveness* dan *compassion*.

b) Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dimana individu yang satu mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya sehingga terjadi hubungan yang saling timbal balik. Indikator dari interaksi sosial dalam penelitian ini adalah: (1) percakapan (2) saling pengertian (3) bekerjasama (4) keterbukaan (5) empati (6) memberikan dukungan atau motivasi (7) rasa positif (8) adanya kesamaan dengan orang lain.

c) Self Esteem

Self esteem didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap dirinya sendiri dan seberapa berharganya individu terhadap orang lain, dalam dimensi positif dan negatif, yang meliputi *performance self esteem, social self esteem, dan appearance (physical) self-esteem*.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

3.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung yang diwakili oleh siswa kelas VII, VIII dan IX pada SMP Islam Al Hikmah Mlathen di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 288 siswa.

*Tabel 3.1
Keadaan siswa kelas VII, VIII dan IX SMP Islam Al Hikmah Mlathen*

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Siswa
VII A	5 siswa	27 siswa	32 siswa
VII B	6 siswa	26 siswa	32 siswa
VII C	8 siswa	24 siswa	32 siswa
VIII A	9 siswa	23 siswa	32 siswa
VIII B	10 siswa	22 siswa	32 siswa
VIII C	8 siswa	24 siswa	32 siswa
IX A	12 siswa	20 siswa	32 siswa
IX B	8 siswa	24 siswa	32 siswa
IX C	8 siswa	24 siswa	32 siswa
Jumlah			288 siswa

3.2. Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk ukuran sampelnya sebagian dari jumlah populasi yang ada, yang jumlahnya 288 siswa. Pada penelitian ini mengambil 25% untuk ukuran jumlah sampel. Dengan demikian untuk jumlah sampelnya $25\% \times 288 = 72$ siswa. Jadi, dalam penelitian ini sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah siswa

kelas VII, VIII dan IX SMP Islam Al Hikmah Mlathen sebanyak 72 siswa. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Daftar Perolehan Jumlah Sampel (25% dari populasi)

No	Kelas	Populasi	Perhitungan 25%	Sampel
1	VII A	32 siswa	$25/100 \times 32 = 8$	8 Siswa
2	VII B	32 siswa	$25/100 \times 32 = 8$	8 Siswa
3	VII C	32 siswa	$25/100 \times 32 = 8$	8 Siswa
4	VIII A	32 siswa	$25/100 \times 32 = 8$	8 Siswa
5	VIII B	32 siswa	$25/100 \times 32 = 8$	8 Siswa
6	VIII C	32 siswa	$25/100 \times 32 = 8$	8 Siswa
7	IX A	32 siswa	$25/100 \times 32 = 8$	8 Siswa
8	IX B	32 siswa	$25/100 \times 32 = 8$	8 Siswa
9	IX C	32 siswa	$25/100 \times 32 = 8$	8 Siswa
Jumlah				72 Siswa

Penentuan sampel penelitian dihitung dengan cara pembagian jumlah populasi dengan pembagi terbesar dari jumlah sampel. Dalam penelitian ini rincian sampel dapat dilihat pada data perincian sampel berikut :

Tabel 3.3
Daftar Perincian Hasil Sampel

Kelas	Populasi Laki-laki	Sampel Laki-laki	Populasi Perempuan	Sampel Perempuan
VII A	5 siswa	1 siswa	27 siswa	8 siswa
VII B	6 siswa	2 siswa	26 siswa	6 siswa
VII C	8 siswa	2 siswa	24 siswa	6 siswa
VIII A	9 siswa	2 siswa	23 siswa	6 siswa
VIII B	10 siswa	2 siswa	22 siswa	6 siswa
VIII C	8 siswa	2 siswa	24 siswa	6 siswa
IX A	12 siswa	3 siswa	20 siswa	5 siswa
IX B	8 siswa	2 siswa	24 siswa	6 siswa
IX C	8 siswa	2 siswa	24 siswa	6 siswa
Jumlah		17 siswa		55 siswa

Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menentukan sampel setiap kelasnya dengan menggunakan teknik random dengan cara undian, namun tetap memperhatikan proporsi jumlah siswa laki-laki dan perempuan setiap kelasnya.

4. Metode dan Alat Pengumpul Data

4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Skala psikologi, ada dua satu skala psikologi yang digunakan yaitu skala interaksi social dan *self esteem*. Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari berbagai bentuk alat pengumpul data lainnya seperti angket; dan b) Angket, untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan kecerdasan moral siswa kelas yang didasarkan pada kebutuhan data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini

angket digunakan untuk mengungkap kecerdasan moral siswa kelas VII, VIII dan IX SMP Islam Al Hikmah Mlathen.

4.2 Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala interaksi social, *self esteem* dan angket kecerdasan moral. Berikut penggunaan alat pengumpul data dalam penelitian ini:

*Tabel 3.3
Penggunaan Alat Pengumpul Data*

Variabel	Indikator	Instrumen	
		Skala Psikologi	Angket
Interaksi Sosial	1. Percakapan	√	
	2. Saling Pengertian		
	3. Bekerjasama		
	4. Keterbukaan		
	5. Empati		
	6. Memberikan dukungan motivasi		
	7. Rasa Positif		
	8. Kesamaan dengan orang lain		
<i>Self Esteem</i>	1. Yakin dengan kemampuan diri	√	
	2. Yakin berinteraksi dengan orang lain		
	3. Merasa yakin dengan penampilan diri		
	4. Merasa yakin dengan kemampuan diri		
	5. Yakin berinteraksi dengan keluarga		
Kecerdasan Moral	1. Bertindak secara konsisten sesuai dengan prinsip, nilai dan <i>beliefs</i>		√
	2. Memiliki tanggung jawab pribadi		
	3. Mengikhhlaskan kesalahan orang lain		
	4. Aktif peduli terhadap orang lain		

4.3 Skala Interaksi Sosial dan *Self Esteem*

Skala interaksi sosial dan *self esteem* berisi tentang pernyataan-pernyataan yang bertujuan untuk mengungkap indikator-indikatornya. Skala interaksi sosial dan *self esteem* disusun sesuai dengan kisi-kisinya. Adapun kategori jawaban untuk skala interaksi sosial dan *self esteem* dalam mengembangkan beberapa aspeknya adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.4
Kategori Jawaban dan Cara Penskoran Skala Interaksi Sosial dan Self Esteem*

No	Pernyataan Positif		No	Pernyataan Negatif	
	Jawaban	Nilai		Jawaban	Nilai
1	Sangat Setuju	5	1	Sangat Setuju	1
2	Setuju	4	2	Setuju	2
3	Ragu-ragu	3	3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2	4	Tidak Setuju	4
5	Sangat Tidak Setuju	1	5	Sangat Tidak Setuju	5

5. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

5.1 Validitas Instrumen

Cara yang dipakai dalam menguji tingkat validitas adalah dengan variabel internal, yaitu menguji apakah terdapat kesesuaian antara bagian instrumen secara keseluruhan. Untuk mengukurnya menggunakan analisis butir. Pengukuran pada analisis butir yaitu dengan cara skor-skor yang ada kemudian dikorelasikan dengan menggunakan.

5.2 Reliabilitas Instrumen

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS 22.00 *for windows*.

$$\text{Rumus : } \alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S^2_j}{S^2_x} \right)$$

Keterangan :

α = koefisien reliabilitas alpha

k = jumlah item

S_j = varians responden untuk item I

S_x = jumlah varians skor total

5.3 Hasil Uji Coba Instrumen

a) Hasil Uji Validitas Instrumen Skala Interaksi Sosial

Skala interaksi sosial yang berjumlah 53 butir item pernyataan setelah uji coba terhadap 31 responden dan dianalisis dengan teknik uji korelasi product moment dengan taraf signifikansi 5% diketahui $r_{\text{tabel}} = 0,344$ maka dengan $r_{xy} > r_{\text{tabel}}$ terdapat 8 item yang tidak valid.

b) Hasil Uji Validitas Instrumen Skala *Self Esteem*

Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan rumus *product moment*, dengan taraf signifikansi 5% diketahui $r_{\text{tabel}} = 0,344$ maka dengan $r_{xy} > r_{\text{tabel}}$ dapat diketahui bahwa dari 42 item yang diajukan terhadap 31 responden diperoleh 7 item yang tidak valid. Jadi, instrumen skala interaksi sosial menjadi 35 butir.

c) Hasil Uji Validitas Instrumen Angket Kecerdasan Moral

Instrumen angket kecerdasan moral yang digunakan untuk memperoleh data dari responden berisi 30 butir item yang dibuat sesuai dengan teori yang ada. Hasil uji coba angket kecerdasan moral terhadap 31 responden dianalisis menggunakan rumus *product moment* dengan taraf taraf signifikansi 5% diketahui $r_{\text{tabel}} = 0,344$ maka dengan $r_{xy} > r_{\text{tabel}}$ terdapat 5 butir item pernyataan yang tidak valid. Jadi, instrumen skala interaksi sosial menjadi 25 butir.

d) Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Skala Interaksi Sosial

Untuk mengetahui reliabilitas dari data yang diperoleh mengenai skala interaksi sosial dengan menggunakan rumus Alpha. Dari 31 responden dengan taraf signifikansi 5%, maka diperoleh $r_{\text{tabel}} = 0,344$ dan $r_{\text{hitung}} = 0,969$, artinya bahwa

$r_{hitung} >$ dari r_{tabel} . Jika hasil yang diperoleh sesuai/signifikan maka instrumen dinyatakan reliabel.

e) Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Skala *Self Esteem*

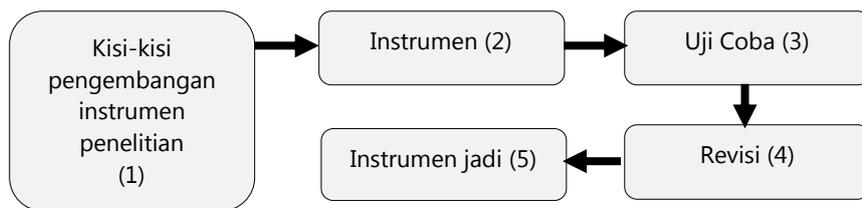
Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha, dari 31 responden dengan taraf signifikansi 5 %, skala *self esteem* dinyatakan reliabel, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan nilai $r_{hitung} = 0,959$ dan $r_{tabel} = 0,344$.

f) Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Angket Kecerdasan Moral

Reliabilitas dari angket kecerdasan moral dianalisis dengan menggunakan rumus Alpha dengan taraf signifikansi 5 % dan $N = 31$, maka diperoleh $r_{tabel} = 0,344$ dan $r_{hitung} = 0,959$, artinya bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$. Jika hasil yang diperoleh sesuai/signifikan maka instrumen tersebut reliabel.

6. Prosedur Penyusunan Instrumen

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen skala interaksi sosial dan *self esteem* serta angket kecerdasan moral yang dikembangkan sendiri oleh peneliti yang selanjutnya dirinci sebagai indikator-indikator yang dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan. Berikut ini merupakan prosedur penyusunan instrumen:



Gambar 3.1
Prosedur penyusunan instrumen

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan dua tahap yaitu: a) Uji asumsi, digunakan untuk melakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik dengan menggunakan teknik regresi ganda melalui uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas; dan b) Uji hipotesis, menguji hipotesis ada tidaknya hubungan antara interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral dengan teknik analisis regresi ganda dengan menggunakan bantuan SPSS 22.00 for windows. Pengambilan keputusan didasarkan pada angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis $< 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

D. HASIL PENELITIAN

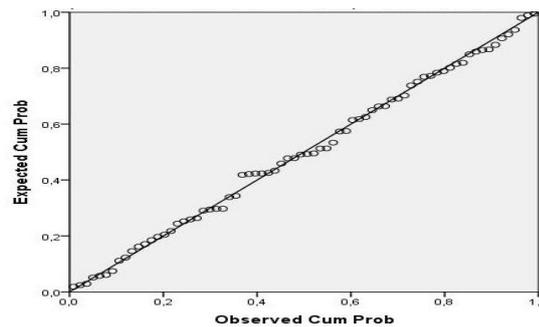
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antara interaksi sosial dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung, maka hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil Uji Asumsi

Uji asumsi ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik sehingga data dapat dianalisis dengan teknik. Adapun hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

1.1. Hasil Uji Normalitas Data

Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik, yaitu jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.1

Normalitas dengan Diagram P-Plot

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk prediksi kecerdasan moral berdasar masukkan variabel independennya.

Selain pengujian menggunakan diagram *P-Plot*, untuk memperkuat pengujian tersebut dilakukan juga analisis secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov z*. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Dari hasil pengujian dengan menggunakan program *SPSS 22.00 for windows* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov z
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Interaksi Sosial	Konsep Diri	Kecerdasan Moral
N		72	72	72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	194,1667	144,7778	96,6528
	Std. Deviation	11,40052	14,02535	5,35016
Most Extreme Differences	Absolute	,061	,080	,090
	Positive	,050	,064	,090
	Negative	-,061	-,080	-,088
Kolmogorov-Smirnov Z		,520	,678	,766
Asymp. Sig. (2-tailed)		,950	,748	,601

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi asymp. Sig. (2-tailed) masing-masing variabel yaitu variabel interaksi sosial (X_1) sebesar $0,950 > 0,05$, variabel *self esteem*

(X_2) sebesar $0,748 > 0,05$, dan variabel kecerdasan moral (Y) sebesar $0,601 > 0,05$. Masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel berdistribusi normal.

1.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas. Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat multikolinieritas pada model tersebut. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil pengujian multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

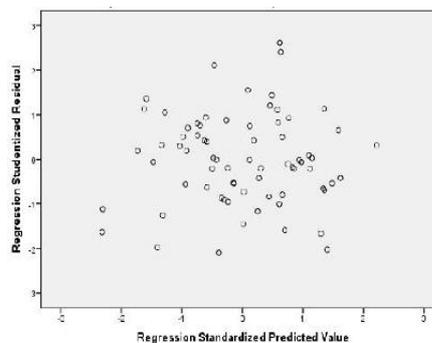
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Interaksi Sosial	,934	1,070
Self Esteem	,934	1,070

a. Dependent Variable: Kecerdasan Moral

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk variabel independen (interaksi sosial dan self esteem) adalah 0,934 yang berarti mempunyai angka lebih dari 0,1 dan besarnya VIF pada kedua variabel independen adalah 1,070 yang berarti mempunyai nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

1.3 Hasil Uji Heteroskedatisitas

Uji heteroskedatisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa jenis pengujian heteroskedatisitas diantaranya dapat dilihat dari diagram pencar (*scatter plot*) yaitu grafik yang merupakan diagram pencar residual, yaitu selisih Y prediksi dan Y observasi, seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.2
Scatterplot Hasil Uji Heteroskedatisitas

Terlihat pada gambar 4.2 bahwa titik-titik yang terbentuk tidak membentuk suatu pola tertentu, tetapi tersebar teratur dan dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Dari uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diperoleh efektif digunakan untuk menyatakan hubungan interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral.

2. Model Persamaan Regresi Ganda

Metode ini digunakan untuk mengetahui persamaan regresi hubungan interaksi sosial (X_1), *self esteem* (X_2) dengan kecerdasan moral (Y). Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan program *SPSS 22.00 for windows* diperoleh data seperti terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Analisis Regresi Ganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35,337	8,487		4,164	,000
1 Interaksi Sosial	,178	,042	,380	4,197	,000
<i>Self Esteem</i>	,185	,035	,484	5,347	,000

a. Dependent Variable: Kecerdasan Moral

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.3 diperoleh persamaan regresi ganda sebagai berikut: $Y = 35,337 + 0,178X_1 + 0,185X_2$.

Dari persamaan diatas, diketahui bahwa: a) Konstanta sebesar 35,337 menyatakan bahwa jika tidak ada interaksi sosial (X_1) dan *self esteem* (X_2) maka kecerdasan moral (Y) adalah 35,337; b) Koefisien regresi variabel interaksi sosial (X_1) sebesar 0,178 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point, variabel interaksi sosial (X_1) akan meningkatkan kecerdasan moral sebesar 0,178; dan c) Koefisien regresi variabel *self esteem* (X_2) 0,185 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point, variabel *self esteem* (X_2) akan meningkatkan kecerdasan moral sebesar 0,185.

3. Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi ganda dengan tujuan untuk menguji hubungan variabel independen dengan variabel dependen baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

3.1 Hubungan interaksi sosial dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung.

Pengajuan hipotesis secara parsial antara interaksi sosial (X_1) dengan kecerdasan moral (Y) yaitu: a) H_a : Ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung; dan b) H_o : Tidak ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a) Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka keputusan adalah H_0 diterima dan H_a ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel bebas tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat; b) Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka keputusan adalah H_0 ditolak dan H_a diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel bebas mempunyai hubungan signifikan dengan variabel terikat, seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4
Korelasi antara Interaksi Sosial dengan Kecerdasan Moral
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	50,759	9,425		5,386	,000
1 Interaksi Sosial	,236	,048	,504	4,878	,000

a. Dependent Variable: Kecerdasan Moral

Berdasarkan tabel 5.4 untuk variabel interaksi sosial (X_1) diperoleh $t_{hitung} = 4,878$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan kecerdasan moral. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung” dinyatakan diterima. Semakin positif interaksi sosial remaja maka akan semakin positif kecerdasan moralnya.

3.2 Hubungan antara *self esteem* (X_2) dengan kecerdasan moral (Y) pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung

Pengajuan hipotesis secara parsial antara *self esteem* (X_2) dengan kecerdasan moral (Y) yaitu: a) H_a : Ada hubungan yang signifikan antara *self esteem* dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung; dan b) H_0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara *self esteem* dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a) Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka keputusan adalah H_0 diterima dan H_a ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel bebas tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat; dan b) Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka keputusan adalah H_0 ditolak dan H_a diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel bebas mempunyai hubungan signifikan dengan variabel terikat, seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5

Korelasi antara *Self Esteem* dengan Kecerdasan Moral
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64,565	5,397		11,963	,000
	<i>Self Esteem</i>	,222	,037	,581	5,973	,000

a. Dependent Variable: Kecerdasan Moral

Berdasarkan tabel 5.5 untuk variabel *self esteem* (X_2) diperoleh $t_{hitung} = 5,973$ dengan nilai signifikansi untuk variabel *self esteem* (X_2) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara *self esteem* dengan kecerdasan moral. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “ada hubungan yang signifikan antara *self esteem* dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung”, dinyatakan diterima. Semakin positif *self esteem* remaja maka akan semakin positif pula kecerdasan moralnya.

3.3 Hubungan antara interaksi sosial (X_1) dan *self esteem* (X_2) dengan kecerdasan moral (Y) pada anak remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung.

Pengajuan hipotesis secara simultan antara interaksi sosial (X_1) dan *self esteem* (X_2) dengan kecerdasan moral (Y) yaitu: a) H_a : Ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung; b) H_0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada hubungan secara simultan antara interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral, dapat dilihat dari hasil uji F. Kriteria pengujianya, jika $p\ value < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel:

Tabel 5.6
Korelasi antara Interaksi Sosial dan *Self Esteem* dengan Kecerdasan Moral
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	959,866	2	479,933	30,878	,000 ^b
1 Residual	1072,453	69	15,543		
Total	2032,319	71			

a. Dependent Variable: Kecerdasan Moral

b. Predictors: (Constant), *Self Esteem*, Interaksi Sosial

Dari tabel 5.6 diperoleh $F_{hitung} = 30,878$ dan nilai $p\ value = 0,000$. Karena nilai signifikansi $< 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral pada anak

usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung” dinyatakan diterima. Semakin positif interaksi sosial dan semakin positif *self esteem* remaja maka akan semakin positif pula kecerdasan moralnya.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral. Pernyataan angket kecerdasan moral menunjukkan bahwa pentingnya hubungan antara interaksi sosial dan *self esteem*. Jika interaksi sosial memiliki nilai-nilai positif maka kecerdasan moral remaja akan positif. Jika sebaliknya, remaja akan terjerumus dalam berbagai perbuatan berbahaya dan tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan diri sendiri. Informasi tentang perilaku moral secara benar dan bertanggungjawab tidak hanya diperoleh dari teman sebaya, namun dari orang-orang yang dapat dipercaya seperti guru, selain itu juga dapat diperoleh melalui buku-buku yang isinya dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan dengan adanya komunikasi yang baik dan terjalin interaksi sosial yang baik dapat menjauhkan remaja dari perilaku yang negatif. Penilaian yang positif terhadap diri sendiri disertai dengan konsep positif tentang kecerdasan moral akan memberi pengaruh yang positif pula terhadap kecerdasan moralnya. Penilaian yang negatif terhadap dirinya disertai dengan konsep negatif tentang kecerdasan moral, juga akan memberi pengaruh yang negatif pula terhadap kecerdasan moralnya.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara *self esteem* dengan kecerdasan moral. Masa remaja merupakan masa di mana kematangan emosional seseorang masih belum stabil sedangkan pertumbuhan fisik dan mentalnya mengalami pertumbuhan. Selain itu, masa remaja sebagai masa transisi yang dipenuhi dengan berbagai bentuk perlawanan terhadap berbagai hal yang tidak disenanginya, sehingga akan timbul berbagai permasalahan yang akan membawa mereka pada berbagai ketegangan psikologis atau stress. Menurut Verdeber dalam Sobur (2003: 518), semakin besar pengalaman positif yang diperoleh atau dimiliki, semakin positif *self esteem*. Sebaliknya, semakin besar pengalaman negatif yang diperoleh atau yang dimiliki, semakin negatif *self esteem*. *Self esteem* positif yang dimiliki remaja akan menjadi benteng bagi siswa untuk tidak melakukan hal-hal negatif termasuk dalam hal berperilaku. Dengan *self esteem* yang positif tentang kecerdasan moral maka remaja akan mempunyai kecerdasan moral yang sehat serta akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Interaksi sosial yang baik dengan lingkungannya dan *self esteem* yang positif tentang kecerdasan moral diharapkan mampu membuat remaja memiliki kecerdasan moral yang sehat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hubungan antara interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung dapat diambil kesimpulan bahwa: a) Ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung; b) Ada hubungan yang signifikan antara *self esteem* dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung; dan c) Ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung.

2. Saran

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan *self esteem* dengan kecerdasan moral pada anak usia remaja jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tulungagung, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: a) Bagi guru Bimbingan dan Konseling (BK) atau Konselor, diharapkan memberikan layanan Bimbingan dan Konseling atau konseling yang berkaitan dengan interaksi sosial dan *self esteem*; b) Guru Bimbingan dan Konseling (BK) atau Konselor, hendaknya bekerjasama dengan orangtua siswa dalam memberikan layanan untuk memperoleh gambaran dan situasi yang dihadapi siswa dalam lingkungan serta pergaulannya; dan c) Peneliti hanya mengukur variabel interaksi sosial dan *self esteem* terhadap kecerdasan moral. Untuk itu, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kecerdasan moral yang belum diteliti dalam penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baron, R.A. & Byrne, D. 1991. *Social Psychology: Understanding Human Interaction*. (6th ed). Boston, MA : Allyn & Bacon
- Beigi, K.M, Tabaeian, A. 2014. *Relationship between Moral Intelligence and Coping Strategies With Conflict Among Taekwondo Coaches of Iran with Demographic Characteristic*. International Jurnal of Sport Studies. Vol 4 (9), 1075-1079, 2014.
- Berns, R.M. 2007. *Child, Family, School, Community: Socialization and Support*. Belmont : Thompson Learning, Inc.
- Borba, M. 2001. *Building Moral Intelligence*. San Fransisco: American Psychological Society.
- Donnelan, M.B., Trzesniewski, K.H., Robins, R.W, Moffitt, T.E and Caspi, A. 2005. *Low Self Esteem is Related to Aggression, Antisocial Behavior, and Delinquency*. American Psychological Society, Volume 16-number 4.

- Durratun Nasikhah dan Dra. Prihastuti, SU. *Hubungan antara dengan perilaku kenakalan remaja pada masa remaja awal*. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Vol.2/No.2 Agustus 2013
- Gardner, H. 1999. *Intelligence Reframed: Multiple Intelligence for The 21st Century*. New York : Basic Book.
- Goleman, D. 2000. *Emotional Intelligence*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian)*. Malang: UMM Press.
- Heatherston, A.T and Walcott, V.A. 2009. *Handbook Of Social Interaction in The 21st Century*. New York : Nova Science Publishers, Inc.
- <http://health.liputan6.com/read/2062737/> bnn_pengguna narkoba di Indonesia_dari semua golongan umur/diakses 3 Februari 2018/13.54 WIB.
- http://www.cnnindonesia.com/nasional/20171029111311-12-8642/tercatat_angka_penderita_hiv-meningkat-di-perkotaan/ diakses 2 Februari 2017/18.45 WIB.
- http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/2/3/fenomena_tawuran_pelajar_jadi-kekerasan-anak-paling-menonjol-tahun-2016?page=1/ diakses pada 3 Februari 2018/15.11 WIB
- Idowu, O., Ajayi, Samson, O. 2015. *Moral Intelligence : An Antidote to Examination Malpractice in Nigerian Schools*. Universal Journal of Educational Research 3 (1) : 32-38, 2015.
- Josey-Bass Clarcken, R.H., *Moral Intelligence in the Schools*. Paper presented at the annual meeting of The Michigan Academy of Sciences, Art and Letters. Wayne State University, Detroit, MI, March 20, 2009
- Kruger, T. 2012. *Moral Intelligence : The Construct and Key Correlates*. Faculty of Management. University of Johannesburg. Thesis.
- Lee, M.J., Cho, S.J. 2014. *Effects of Teenager Self Esteem on Delinquency*. Advanced Science and Technology Letters Vol. 68 (Bioscience and Medical Research 2014), pp 38-42. <http://dxdoi.org/10.14257/astl.2014.68.10>
- Lenick, Dough and Kiel, Fred. 2011. *Moral Intelligence*. Boston : Pearson Education, Inc.
- Lickona, T. 2012. *Character Matters. Persoalan Karakter : Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian Yang Baik, Integritas dan Kebajikan Penting Lainnya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Marshall and Rossman. 2007. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication
- Meskauskiene, A. 2015. *Teacher-Pupil Interaction: Factors Strengthening and Impairing Adolescent's Self-esteem*. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences 197 (2015) 845 – 850.
- Moleong, J Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya
- Murk, C. J. 2006. *Self Esteem. Research, Theory and Practice*. New York : Springer Publishing Company.
- Santrock, JW. 2003. *Adolescence: An Introductory (6th edition)*. USA: McGraw Hill.
- Soekanto, Soeryono, Prof. Dr. 2012. *Sosiologi. Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Perkasa.
- Sternberg, R.J. 2000. *Handbook of Intelligence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suryabrata, S. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Turner, J. H. 1988. *A Theory of Social Interaction*. California: Stanford University Press.

Yin, Robert. K. 2002. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

PANCASILA DAN PEMAKNAAN NILAI SPIRITUALITAS

(Aktualisasi Pancasila Dalam Pendidikan Agama Sebagai Dialektika Logis Menyemai Kesadaran Berbangsa Generasi Milenial)

Akhiyat
IAIN Jember
akhiyat9@yahoo.co.id

Abstrak

Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah perkara mudah. Semua komponen bangsa harus mengerahkan seluruh tenaganya demi keutuhan, kedamaian, dan ketentraman negeri yang dicintainya. Mulai dari pemerintah, masyarakat, dan warganegranya seyogyanya diharapkan mampu memelihara dan menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini seorang pendidik dengan mengaktualisasikan nilai-nilai spiritualitas pancasila kepada generasi milenial atau generasi muda melalui pendidikan agama. Ajaran agama yang diajarkan para pendidik harus dapat diterjemahkan sesuai konteks kekinian, dapat didialektikakan secara rasional untuk menyemaisuburkan ketertarikan dan kecintaan generasi milenial terhadap bangsanya, Bahwa warisan leluhur yang telah ribuan tahun silam berupa nilai-nilai spiritualitas, tradisi, dan budaya, setidaknya dapat terawat dan dilestarikan sepanjang hayat sesuai konteks zaman. Motivasi dan semangat optimisme ini harus terus ditumbuhkan, agar generasi milenial tidak tergerus dan terjangkiti virus pemikiran menyesatkan. Apabila pemikiran-pemikiran menyesatkan yang bertubi-tubi merasuki pemikiran generasi milenial selama ini dapat dibendung secara dini, ke depan Indonesia akan mampu terawat, terbebas dari konflik bersaudara. Kedamaian dan kehidupan harmonis yang selama ini terjaga akan tetap lestari.

Kata Kunci: Pancasila, Spiritualitas

A. Pendahuluan

Semua agama mengajarkan umatnya senantiasa hidup damai, tenggang rasa, toleransi kepada umat lain, dan hidup rukun berdampingan. Sikap kondusif kehidupan antarumat beragama yang selama ini terjaga di Indonesia, karena di antara mereka telah menjalankan nilai-nilai spiritualitas dengan serius (McEwen, 2004).. Mereka mampu memahami dan memaknai nilai religiusitas sebagaimana yang diajarkan agamanya dengan penghayatan jiwa. Mereka mampu mewarisi nilai-nilai spiritualitas seperti yang diajarkan oleh leluhur, nenek moyang bangsa Inonesia. Kehidupan yang harmonis tersebut dibuktikan dengan sejarah bahwa masuknya berbagai agama yang masuk ke nusantara tidak banyak menimbulkan berbagai konflik dan peperangan. Bukti tersebut menandakan, adanya sikap masyarakat Indonesia dalam menyikapi suatu perbedaan beragama bagi pemeluknya bukanlah suatu hal yang substansial dan krusial. Perbedaan yang dianutnya bukanlah sesuatu penghalang untuk tidak saling menghormati dan hidup harmonis di antara sesama mereka.

Di masyarakat Jawa misalnya, terdapat salah satu prinsip utama mengenai pemikiran keagamaan Jawa yang menekankan bahwa segala sesuatu yang ada tersusun dari wadah dan isi. Alam, bentuk fisik tubuh dan kesalehan normative adalah wadah. Allah, sultan, jiwa, iman dan mistisme merupakan isi. Kalangan mistiskus Jawa meyakini, pada akhirnya isi lebih berarti daripada wadah, sebab merupakan kunci kesatuan mistik (Woodward: 2004, 109-110). Agama Islam orang Jawa bersifat sinkretis dan agama Islam puritan bersifat sinkretis pula, karena keduanya menyatukan unsur-unsur pra Hindu, Hindu dan Islam. Agama Islam puritan adalah yang mengikuti agama secara lebih taat. (Koentjaraningrat: 1984, 310)

Sejarah keagamaan masyarakat Jawa menjelaskan bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Jawa telah mempunyai kepercayaan yang bersumber pada ajaran Hindu yang ditandai dengan adanya para dewata, kitab-kitab suci, orang-orang suci, roh jahat, lingkaran penderitaan (samsara), hukum karma dan hidup bahagia abadi (moksa). Di samping itu, juga ada yang bersumber pada ajaran Budha yang ditandai dengan adanya percaya pada Tuhan (Sang Hyang Adi Budha), selain itu juga ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Setelah kedatangan Islam ke Jawa, terjadilah suatu interelasi Islam dengan Jawa yang salah satunya adalah interelasi antara kepercayaan dengan dan ritual Islam dengan nilai-nilai Jawa. Pada dasarnya interelasi ini ditempuh dengan jalan penyerapan secara berangsur-angsur, sebagaimana yang dilihat dan dilafalkan Islam berbahasa arab menjadi fenomena Jawa.

Adapun terjadinya konflik di internal umat beragama maupun antarumat beragama, banyak disebabkan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu timbulnya konflik yang terjadi adalah adanya pemahaman yang salah di antara individu maupun kelompok, bagi mereka yang beragama. Apabila kesalahpahaman dalam memaknai pengertian agama dilakukan oleh individu, mungkin akibatnya tidaklah terlalu signifikan. Sebaliknya apabila pemahaman itu disalahpahami oleh kelompok secara massif, tentu akibatnya akan mengalami berbagai konflik yang menimbulkan ekses kepada banyak pihak, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya perpecahan antar kelompok masyarakat sehingga bisa berakibat fatal menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Menyikapi konflik-konflik demikian, sedini mungkin semua pihak perlu arif, dan bijaksana sehingga konflik secara massif dapat dicegah, contohnya kasus konflik Sunni-Syiah di Sampang-hal ini tidak perlu terjadi lagi. Tindakan preventif ini seyogyanya dilakukan sedini mungkin, dari pada mengobati penyakit yang akut atau terjadinya konflik yang berkepanjangan, sebagaimana konflik-konflik di negara Timur Tengah antara lain Suriah, Irak, Palestina, di mana sebagian masyarakatnya harus bermigrasi ke negara lain akibat konflik berkepanjangan dimulai dari berbagai perbedaan ideologi dalam internal agama, maupun perbedaan antarumat beragama.

Dari realitas yang berkembang belakangan, dapat dikatakan bahwa gerakan Islam saat ini yang paling fokus memperjuangkan terwujudnya khilafah Islamiyah di Indonesia dan di belahan dunia mana pun adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan Islam baru dalam percaturan politik nasional, organisasi ini menganggap politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai mazhabnya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik yang hingga kini di Indonesia belum menyebut dirinya sebagai gerakan politik (partai). Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa atau inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.

Sebagai langkah mengantisipasi konflik horisontal di masyarakat adanya gerakan yang mencoba merusak keharmonisan beragama, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah. Negara tidak tinggal diam, untuk menangkal berbagai paham radikal yang merongrong keberadaan NKRI, salah satunya dengan membubarkan organisasi keagamaan yang berideologi atau berhaluan menganggap pemerintah Indonesia sebagai pemerintahan *thoghut* atau kafir. Sikap tegas yang diambil pemerintah antara lain dengan menetapkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang pembubaran HTI. Semenjak dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menuai pro dan kontra. Salah satu yang dikorbankan adalah HTI, realitas di lapangan pengikut organisasi tersebut masih eksis di berbagai ranah kehidupan, termasuk di dalam civitas akademik.

Bagi sebagian kalangan, kemunculan mereka dianggap mengkhawatirkan, bukan semata-mata karena perbedaan ideologis, tetapi lantaran sebagian di antara mereka menggunakan cara-cara kekerasan memperjuangkan aspirasi mereka. Kekerasan di sini tak hanya dalam arti fisik, tetapi juga kekerasan wacana yang terekspresi melalui kecenderungan mereka yang dengan mudah mengeluarkan fatwa *murtad*, *kafir*, *syirik*, dan semacamnya bahkan kepada sesama muslim. Islam memiliki nilai-nilai yang tinggi, *ultimates values*, tetapi nilai-nilai itu tidak akan banyak faedahnya kalau tidak diterjemahkan secara kreatif dan kontekstual. Ketidakepekaan terhadap nilai-nilai ini, menurutnya menyebabkan umat Islam selalu mengalami ketertinggalan yang pada gilirannya cenderung merasa inferior dan sloganistik. Kekerasan wacana di kalangan pengikut HTI yang terus digaungkan inilah seringkali menjadi virus bagi kaum muda

Secara yuridis, dapat dikatakan organisasi tersebut sudah tiada atau mati suri, akan tetapi penganut dan pengikut organisasi terlarang tersebut masih dapat bebas mengekspresikan ideologi-ideologi mereka secara leluasa, dan tidak menutup kemungkinan pengikut mereka semakin besar. Boleh dikatakan untuk sementara waktu organisasi tersebut tanpa nama atau tanpa bentuk, lambat laun kemungkinan besar terbuka lebar bermetamorfosis menjadi organisasi dengan bentuk dan nama lain yang gerakannya akan semakin massif, hal ini akan dapat mengancam terhadap keberadaan ideologi Pancasila dan NKRI. Dengan semakin massif dan gencar melakukan dakwah serta mensosialisasikan gerakan keagamaan yang berideologi membentuk negara khilafah, gerakan ini apabila dibiarkan begitu saja akan dapat mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai spiritualitas keberagaman masyarakat, hal ini bertolakbelakang seperti warisan yang diajarkan para leluhur.

Indonesia bukanlah negara Timur Tengah, Indonesia memiliki berbagai ragam kebudayaan dan agama. Dalam rangka menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI dan menumbuhkan kecintaan di kalangan generasi milenial atau generasi muda, tentu upaya yang serius diperlukan. Semua pihak harus terus berbenah diri dan mengevaluasi, kreatif dan inovatif dalam menggalang kecintaan terhadap NKRI melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang positif kepada generasi muda.

B. Reorientasi Materi Keagamaan

Sebagai langkah menaangkal pemahaman yang dapat menyesatkan generasi muda Indonesia dari pemahaman yang dapat merusak kecintaan kepada NKRI, pemerintah sedini mungkin harus sigap menjaga stabilitas dunia pendidikan. Demikian pula dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, seorang guru maupun dosen dituntut menata ulang materi keagamaan yang diajarkannya. Metode-metode pengajaran keagamaan yang selama ini terlihat dan terkesan normatif perlu ada inisiatif untuk memperbaikinya agar materi-materi keagamaan yang diajarkan diminati oleh generasi milenial. Salah satunya dalam menjelaskan materi-materi keagamaan diharapkan tidak terjebak dalam pemahaman tekstual, dalam memahami ajaran Islam hendaknya bersifat universal, tidak terkungkung serta terjebak pemahaman yang bersifat *fiqh oriented* (saklek), tetapi diharapkan dapat menjelaskan dan menerjemahkan pemikiran-pemikiran yang bersifat kekinian.

Pendidikan merupakan pilar yang penting dalam menuntut setiap perubahan. Sebagai pilar atau dasar bagi perubahan maka, pendidikan mempunyai beban berat untuk mengupayakan perubahan tersebut dan telah terbukti dalam sejarah Indonesia maupun dunia, bahwa pendidikan adalah *agent of change* menuju perbaikan taraf berfikir dan perubahan status

dalam hidup masyarakat. Pendidikan juga merupakan proses transformasi budaya dan nilai-nilai luhur kepribadian yang dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Masalah pendidikan merupakan masalah dinamik seiring dengan perkembangan zaman dan budaya manusia. Usaha-usaha perbaikan dalam pendidikan mulai dari faktor pendidik, sarana pendidikan, lingkungan pendidikan, sistem pendidikan yang senantiasa dilakukan oleh praktisi pendidikan. Semua itu adalah termasuk upaya dan usaha manusia dalam pendidikan yang bertujuan memanusiaikan manusia.

Derasnya arus informasi sekarang ini mengakibatkan dunia seakan-akan semakin sempit dan mengglobal, sehingga menjadikan persaingan hidup antara individu dan kelompok semakin menjadi cepat sehingga mengakibatkan lenturnya nilai-nilai keagamaan, kepribadian individu, moral masyarakat dan bangsa. (Ancok, 1995, Hasbullah, 1996:, Mulkhan, 2002). Dalam masa seperti ini dibutuhkan suatu kualitas individu dan masyarakat yang kokoh dalam arti individu dan masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertaqwa, cinta tanah air, menguasai ilmu dan teknologi serta mempunyai kecakapan dalam hidup, untuk itu menjadi tugas dari pendidikan agama (PAI) untuk mewujudkannya (Brodjonegoro, 2002). Mata kuliah Pendidikan Agama Islam dipandang sebagai elemen vital dalam sistem pendidikan di Perguruan Tinggi Umum (PTU). Kerena itu dalam setiap upaya perbaikan mutu pendidikan tidak lepas dari penguatan mata kuliah. Penguatan mata kuliah PAI saat ini memang merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilakukan mengingat berbagai perkembangan ilmu dan teknologi serta arus informasi yang sedemikian cepatnya (Mastuhu, 2002). Dalam kerangka inilah penguatan mata kuliah PAI sebagai alternatif yang ditawarkan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas untuk membentuk pribadi peserta didik (Abbas, 2002).

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan “metode global analitik sintetik,” maksud dari metode ini adalah para peserta didik terlebih dahulu diajak untuk mengamati materi secara global, kemudian instruktur/dosen/ustadz pemandunya mengajak menganalisa kata-katanya kemudian artinya, selanjutnya terjemahannya per ayat setelah itu para peserta didik atau mahasiswa diajak membicarakan rangkaian yang ada hubungannya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Pendekatan dengan sistem “Berbasis Kompetensi” yaitu proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik dengan tahapan sebagai berikut: a.) Instruktur/dosen/ustadz memulai dengan membacakan satu ayat kemudian mengartikan kata demi kata dan akhirnya menerjemahkan arti ayat seutuhnya, b.) Peserta mahasiswa mula-mula mendengarkan bacaan ustadz/dosen/pemandu sambil memperhatikan masing-masing kata yang dijelaskan dan sesudah itu menirukan secara kolektif kemudiiian secara individual, c.) Setelah mencapai

beberapa ayat baru diadakan evaluasi. Program kajian intensif al-Qur'an di PTU ini setidaknya diharapkan akan mampu menghayati pemahaman agama dengan baik.

Di antara proses pembelajaran lain tentang materi keagamaan yang dapat diterapkan adalah dengan cara memahami makna kontekstualnya. Misalnya saja, bentuk-bentuk pemahaman fiqh wakaf, bahwa benda wakaf selama ini dipahami secara pasif-sehingga benda wakaf seperti mushalla, masjid hanya dipakai ibadah ritual semata tanpa memiliki dampak positif dan nilai plus bagi problematika keumatan. Untuk menjawab permasalahan sosial keumatan kekinian diperlukan reorientasi dalam persoalan keagamaan sehingga materi keagamaan diminati oleh generasi milenial. Pemahaman fiqh tentang wakaf harus direproduksi kembali bahwa wakaf dalam konsep lama diperlukan inovasi pemahaman-pemahaman yang membangun konsep berpikir masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Di antaranya adanya jurang sosial yang menganga di masyarakat antara yang kaya dan yang miskin. Untuk menjawab persoalan tersebut seorang cendekiawan muslim harus memiliki ijtihad sebagaimana yang dilakukan ulama terdahulu yang mampu menjawab persoalan pada masanya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh cendekiawan muslim adalah memaknai bentuk model wakaf, mereka sudah memulai merekonstruksi dengan pemaknaan model wakaf berorientasi “wakaf produktif.” Pada dasawarsa belakangan ini, sebagian cendekiawan muslim memberikan contoh model wakaf produktif yaitu dengan mewakafkan suatu usaha Pom Bensin. Contoh lain, di negara Timur Tengah ada sebaigian para *aghniya'* yang mewakafkan Mall atau usaha waralaba atau bisnis lain. Dari sebagian laba usaha bisnis tersebut, hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan umat atau menolong fakir miskin dan membuka lapangan kerja baru. Meskipun pemaknaan wakaf produktif itu adalah hasil ijtihad ulamak terdahulu, hanya saja belum banyak yang menggagasnya saat ini, sehingga pemaknaan itu belum terkaji secara baik dan mengalami kevakuman akibat merasa takut memaknai pemaknaan-pemaknaan baru yang dianggap dapat menyesatkan. Dengan berkembangnya waktu dan zaman, yang demikian kompleks, cendekiawan muslim dan agamawan dituntut mereorientasi pemaknaan-pemaknaan religi yang dianutnya sehingga umat tidak terjebak dengan pemaknaan sempit, menghindarkan umat dari gangguan psikis akibat tuntutan ekonomi menghadapi kehidupan semakin kompleks. Masyarakat terbebas dan tidak terjebak dalam kegalauan yang berakibat putus asa. Ketika pola pikir masyarakat ini sudah terbangun, mereka akan sulit dipengaruhi pikiran-pikiran yang menyesatkan.

Melalui pendidikan agama yang berorientasi menjawab persoalan kekinian yang dihadapi generasi milenial, seorang cendekiawan muslim harus mampu menjelaskan nilai-nilai agama sesuai konteks kekinian, di antaranya dalam memahami makna hadits yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Nabi Muhammad saw. Menyampaikan sabdanya “ajarilah anak-anak kalian dengan memanah, berenang, dan berkuda”. Secara harfiah tekstual makna hadits tersebut seakan anak-anak kita harus diajari memanah dalam pengertian memakai anak panah dan busur. Padahal pemaknaan memanah dalam konteks kekinian, lebih dari bayangan anggapan umum selama ini, orientasinya menjurus pada tugas pokok dan fungsi mengenai kewajiban yang saat ini dilakukan. Apabila tugas yang dilakukan secara fokus dan maksimal, otomatis akan membuahkan hasil memuaskan. Berbeda sekali, bagi mereka yang tidak fokus dalam menekuni usaha maupun pekerjaan, hasilnya akan kurang sempurna dan berakibat mengalami kegagalan.

Demikian pula pemaknaan hadits “berenang”, harus dimakanai pula dengan konteks kekinian, bukan hanya sekedar berenang di kolam renang. Akan tetapi lebih dari pandangan umum, diharapkan seorang cendekiawan muslim, mampu menjelaskan konteks berenang dalam maksud konteks kekinian hidup di zaman globalisasi - yakni mampu berenang dan mengarungi samudra lautan ilmu yang begitu luas dalam mengarungi hidup di zaman global, generasi milenial harus dibekali dengan kemampuan skill berbagai kompetensi yang mana agar mampu menyelam, mereka eksis di berbagai kompetisi yang semakin ketat. Dengan begitu generasi milenial akan mampu menyelaraskan kemampuannya, sehingga pendidikan agama semakin diminati di tengah krisis identitas yang makin massif.

Pemaknaan hadits “ajarilah anak Anda berkuda” dalam konteks kekinian pemaknaan berkuda bukanlah sekedar menunggangi seekor kuda kemudian menjadi joki dan mengendalikan kuda tunggangan dengan kencang. Pemaknaan hadits tersebut bukan sebagaimana bayangan umum, konteks kekiniannya - bahwa untuk menghadapi kompetisi era globalisasi seseorang dituntut memiliki skill dan kompetensi dalam sebuah arena berkendara, yakni mampu menjadi *top leader* (driver) yang dapat mengendalikan suatu usaha dengan kreatif dan inovatif, sehingga usaha yang dikendalikannya akan mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Pemaknaan dalam pengajaran pendidikan agama harus pula dapat diterjemahkan dalam era keindonesiaan, bukan hanya berdasar dari lahirnya agama tersebut yang lahir dari Timur Tengah misalnya. Penerjemahan ini tentu akan mampu menarik minat generasi milenial, apabila para cendekiawan muslim yang mengajarkan pendidikan agama dikontekstualisasikan dengan kehidupan generasi milenial di zaman ini. Sebagaimana konteks tauhid dalam

pendidikan agama dapat dikaitkan dengan konteks keindonesiaan, bahwa Ketuhanan dalam Pancasila sila pertama terdapat semacam dialektika logis sinergis yang membangun kesadaran membangun nilai-nilai spiritualitas bagi setiap manusia. Kontekstualnya dengan persoalan yang dihadapi generasi milenial adalah agar mereka tidak mudah mengalami depresi dan kegalauan menghadapi persoalan hidup yang semakin kompetitif, tentu para cendekia harus mampu menerjemahkan persoalan hidup yang dihadapi generasi milenial. Sikap progressif dalam menerjemahkan pemahaman agama ini, tentu akan menarik generasi milenial belajar agama.

Dari pemaparan konteks kekinian dalam memahami ajaran agama yang diajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi, akan terjadi dialektika logis sinergis, ada semacam ekuivalen ajaran agama, Pancasila dan keindonesiaan. Termasuk masalah Islam adalah agama yang *rahmatan lilalamin*. Dalam konteks kekinian *rahmatan lilalamin* dapat diterjemahkan dalam pengertian yang universal-bahwa manusia hidup diharapkan dapat memberikan kemaslakhatan hidupnya, memiliki nilai guna dan manfaat bukan hanya untuk dirinya pribadi. Namun manusia hidup dituntut untuk dapat memberikan kontribusi nilai positif bagi orang lain, lingkungan, dan alam sekitarnya. Keberkahan inilah yang diharapkan dalam beragama.

Dalam konteks keIndonesiaan, para cendekiawan muslim, baik guru maupun dosen harus dapat menjelaskan kepada generasi milenial tentang Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia, agar mereka mampu merawat sumber daya alam berupa tanaman dan mata air. Sumber daya alam ini boleh dikatakan sebagai kebutuhan primer dan pokok yang harus dirawat oleh setiap manusia yang hidup di bumi. Kebutuhan oksigen yang berasal dari tumbuhan ini akan dapat menyelamatkan jutaan manusia, membawa kemaslakhatan dan daya pertahanan hidup di bumi. Sebaliknya manusia yang akan kekurangan oksigen akan mengalami jatuh sakit dan mengalami kematian. Sikap kecintaan terhadap alam dan sumber daya alam yang ada di negeri ini akan mampu menyemai dan menumbuhkan kesadaran generasi milenial akan kecintaan terhadap NKRI, dan akan berpikir ulang apabila kesadaran tersebut tercerabut dan hilang dalam dirinya. Sikap-sikap optimistis harus ditumbuhkembangkan oleh cendekiawan muslim, sehingga kesadaran moralitas apabila ditanamkan sejak dini akan mampu membawa manfaat bagi masyarakat dan seluruh komponen bangsa.

C. Relevansi Pancasila Terhadap Pemaknaan Nilai Spiritualitas

Keterkaitan Pancasila terhadap agama sesungguhnya memiliki sinergisitas dialektis logis. Pancasila yang dicetuskan oleh pendiri bangsa di dalamnya memiliki nilai-nilai religiusitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pancasila bukan sekedar ideologi yang tiada arti

seperti dipahami oleh mereka yang belum mampu menerjemahkan spiritualitas keberagaman yang dihayatinya. Nenek moyang bangsa Indonesia sesungguhnya telah memiliki nilai spiritualitas yang tinggi sebelum agama-agama besar masuk ke nusantara. Pemaknaan keberagaman masyarakat Indonesia selama ini banyak dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman peneliti asing maupun pemahaman-pemahaman pemuka agama yang berpikiran sempit dan picik. Seakan masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berada di level mental keberagaman terbelakang. Untuk membantah dan membuktikan justifikasi yang dinisbatkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab menilai bangsa Indonesia sebagai masyarakat terbelakang dan minus spiritual adalah merupakan pembodohan yang ditujukan kepada Indonesia dan merupakan propaganda Barat dan Timur.

Sejarah membuktikan, jikalau dilacak dari perkembangan keanekaragaman dan pluralitas masyarakat Jawa yang sedemikian rupa, pengaruh animisme, dinamisme, Hinduisme, Budhaisme dan Islam masih saja melekat dalam kehidupannya. Namun demikian, kalau dirunut dari *kosmogoni* (asal-usul) kejawaen sebagaimana pendapat Rachmad Subagya dalam memandang *kosmogoni* kejawaen, berbeda sama sekali dengan pandangan para ilmuwan antropologi sebelumnya. *Kosmogoni* kejawaen dalam pandangan Rachmad Subagya justru diawali dengan kepercayaan dan kebudayaan monoteistik dan teistik. Bagi Rachmad watak dasar kepercayaan orang-orang Jawa asli bukan berada pada kepercayaan animistik dan dinamistik sebagaimana menurut kebanyakan antropolog yang lain. (Subagya: 1981)

Pemikiran reflektif masyarakat Jawa tentang ketuhanan menurut Rachmad memang tidak selengkap dan seideal agama-agama besar yang secara normatif doktriner telah disiapkan dalam kitab-kitab wahyu yang autentik. Pemikiran mereka terhadap Ilahi tersebut tumbuh dari pengalaman hidup, baik dalam suasana hari-hari gembira maupun suasana hari-hari sedih. Dalam hati sanubari terlintas adanya keyakinan magis (gaib) terhadap Ilahi yang dianggap mampu menaungi hal ikhwal insani. Dalam suka dan duka hidup manusia senantiasa dihadapkan pada Ilahi untuk memohon perlindungan terhadap bahaya yang mengancam, baik berupa bencana alam, penyakit, hantu atau manusia yang bertuah. Rasa ketuhanan yang terpendam dalam lubuk hati manusia sulit untuk diungkapkan, baik dari kalangan mereka yang telah mengenal pewahyuan dari Tuhannya, maupun yang belum mengenal sama sekali kecuali lewat pengalaman-pengalaman keagamaan secara natural. Rasa ketuhanan itu pada akhirnya termanifestasikan menjadi dua bentuk. Pertama, komunitas yang mengakui bahwa Ilah itu sebagai *fascinosum*, yaitu zat yang menarik, mempesona, mesra dan menimbulkan rasa cinta pada-Nya. Kedua, Ilah diakui sebagai *tremendum*, yaitu yang menakutkan, jauh dan dahsyat.

Terhadap pemaknaan batin masyarakat Indonesia, dalam hal ini masyarakat Jawa, bahwa nilai-nilai yang bersifat transendental dimaksudkan adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang transenden, yang bukan dunia material, tetapi sebagaimana dalam filsafat yaitu sesuatu yang metafisika atau numinus (Yang Ilahi). Nilai yang transendental ini dalam budaya Jawa, seperti yang disebut sebagai *kejawen* (mistik Jawa), kebatinan yang dalam sastra Jawa disebut suluk, wirid, primbon, serat, serta istilah lain yang sejenisnya. Sifat transendental itu dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa hidup selalu kepadaNya, Tuhan Yang Maha Kuasa. (Sumodiningrat: 2013, 11-13)

Beberapa makna yang berkaitan dengan kata “transendental” adalah sesuatu secara kualitas terbatas, atau di luar apa yang diberikan oleh pengalaman manusia. Kehidupan mengarah ke dalam yang transendental berarti, sebagai yang mampu mengungkapkan seluruh realitas obyektif yang sedang dikerjakan dan mengungkapkan secara total sampai pada makna-makna hidup yang paling final. Penjelasan makna kata “transendental” itu secara implisit dapat mengacu kepada Panembahan Senapati bagi identifikasi tokoh yang diidealkan (dicita-citakan) bagi masyarakat Jawa. Panembahan Senapati dianggap sebagai raja Jawa telah merasakan atau memperoleh rasa sejati adalah wahyu (anugerah Tuhan) sebagai semacam “iklim” penghayatan budi luhur (Suroharjo: 1983, 62) atau alam hakiki disebut *ngelmu* mistik (Suseno:1983) merupakan eksistensi pengalaman kegamaan (Islam) Jawa.

Penjelasan tersebut bukan hanya dimaksudkan dalam rasa sejati sebagai pengalaman kegamaan hanya bagi kalangan priyayi (elit kerajaan), melainkan merupakan dasar kehendak dengan eksistensi nilai-nilainya harus dikembangkan atau diberdayakan setiap manusia. Maksud penjelasan tersebut bahwa rasa sejati (wahyu atau anugerah Tuhan) di satu sisi eksistensinya milik atau hak siapa saja, yang bersedia memberdayakan dan atau mengembangkannya melalui “*sembah catur* (empat *sembah*)” yaitu sembah raga, cipta, jiwa, dan rasa pada sisi lainnya sebagaimana termuat dalam *Serat Wedhatama*.

Sejauh ini, bahwa masyarakat Indonesia dalam pemaknaan nilai spiritualitas dapat dikatakan melampaui pemahaman pemikiran kegamaan yang dianut bangsa Barat dan Timur. Penilaian yang tidak proporsional dan Justifikasi serta propaganda yang ditujukan kepada Indonesia oleh orang asing ini sangat tidak relevan, dan dibutuhkan perlawanan. Penilaian kritis sangat dibutuhkan oleh cendekiawan muslim dalam pengajaran agama untuk generasi milenial karena dibutuhkan daya kritis yang seimbang. Sebagai perimbangannya, kita dapat menelusuri jejak sejarah spiritualitas yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Misalnya saja, jejak yang samapai saat ini masih dapat ditelusuri adalah di antaranya bangunan candi Borobudur, Prambanan, dan jejak candi-candi yang berada di bagian

sekitar lereng kaki Gunung Penanggungan Mojokerto yang begitu banyak, belum sempat terurus. Jejak-jejak sejarah mulai dari budaya, jejak ritualitas sampai pada tahapan nilai spiritualitas yang masih tersisakan teramat banyak. Sampai saat ini kesadaran penggalian nilai sejarah boleh dikatakan belum begitu serius tergarap baik oleh peneliti maupun pemerintah, meskipun sedikit banyak sudah mulai tumbuh kesadaran ke arah perbaikan. Kesadaran nilai sejarah ini perlu terus diajarkan kepada generasi milenial, hal ini dimaksudkan menumbuhkan kesadaran menggali dan menyusuri jejak sejarah ritualitas maupun spiritualitas yang selama ini terabaikan.

Bukti-bukti jejak sejaarah ritualitas maupun spiritualitas yang masih dapat dipertanggungjawabkan peninggalan sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, tentu tak terbantahkan. Bangsa Indonesia perlu bangga, dan tidak mudah terjebak dengan penilaian asing yang selama ini menyesatkan dan membentuk karakter masyarakat terpola “bangga dengan bangsa lain”, ini sangat keliru. Akibatnya kesadaran spiritualitas sirna dan hilang begitu saja terkontaminasi pemikiran-pemikiran Barat maupun Timur yang cenderung mengerdilkan, menyudutkan dan membonsai pemikiran masyarakat bangsa Indonesia. Akibat serbuan pemikiran-pemikiran Barat dan Timur yang begitu massif selama ini, sehingga daya kritis dan inovatif menjadi pasif mengalami degradasi pemikiran. Masyarakat bangsa Indonesia selama ini boleh dikatakan masih banyak rongrongan pemikiran-pemikiran yang membuat masyarakat kehilangan daya rasional kritis, serangan itu bertubi-tubi disuntikkan melalui serum cuci otak, apakah melalui perkawinan campuran, dagang, politik dan sebagainya.

Kesadaran terhadap kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah air ini sangat diperlukan bagi pendidikan agama oleh para cendekiawan muslim yang mengajarkan agama kepada generasi milenial. Pemahaman tekstual seringkali menjebak dalam pemaknaan yang sempit dan terkesan agama hanya sebagai ibadah ritual semata. Padahal, nilai spiritualitas yang membangun kesadaran diri manusia yang bermartabat dan bertanggungjawab sering dilupakan. Demikian pula, dalam memahami nilai spiritualitas yang terdapat dalam Pancasila sesungguhnya memiliki nilai filosofi yang tinggi. Bukan sekedar pemaknaan teks semata, akan tetapi perlu diterjemahkan dengan pemaknaan yang mampu mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Mampu memanusiakan manusia membawa kemaslakhatan, membawa kedamaian dan keharmonisan hidup di dunia dan jagat raya.

Sebagaimana yang dilakukan *founding father* kita Sukarno memandang Pancasila sebagai sesuatu yang khas bangsa Indonesia. Ia lahir dari renungannya atas konteks bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila adalah kristalisasi semadi Sukarno atas kearifan bangsa Indonesia yang

tenggelam dalam kekuasaan pemerintah kolonial. Ia berisi cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Pengalaman hidup berkomunitas *ala* masyarakat nusantara, yang sempat tertahan dan terbenam dalam kekuasaan penjajah Belanda, terekam kuat dalam Pancasila. Senada dengan itu, M. Hatta menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari kenyataan bangsa Indonesia yang terpuruk oleh penjajahan. Kata Hatta, “Pancasila adalah cita-cita untuk masa yang akan datang sebagai reaksi terhadap realita yang pahit berupa kesengsaraan rakyat, penghinaan, pemerasan, dan penderitaan bangsa di bawah kekuasaan otokrasi colonial. Jadi, Pancasila adalah kristalisasi cita-cita hidup bangsa Indonesia, masyarakat nusantara, yang sempat terkubur selama masa penjajahan Belanda. Tepat sekali kalau Yudi Latif memandang Pancasila sebagai warisan dari jenius Nusantara. (Latif: 2011)

Kelahiran Pancasila sebetulnya bermula dari kehendak kuat bangsa Indonesia untuk merdeka. Menurut Yudi Latif, cikal bakal kelahiran Pancasila adalah aksi Perhimpunan Indonesia di Belanda (1924) yang merumuskan konsepsi ideologi politiknya yang mencakup empat prinsip tujuan kemerdekaan, yakni: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Konsepsi ideologis ini, kata Yudi Latif, merupakan hasil sintesis dari ideologi-ideologi terdahulu. Prinsip persatuan nasional adalah tema *Indisch Partij*, non-kooperasi adalah kerangka politik komunis, kemandirian adalah tema Sarekat Islam, sementara solidaritas adalah simpulan yang mengikat atau mengutuhkan ketiga tema tersebut.

Selain konsepsi ideologis di atas, buah pemikiran kritis para tokoh pejuang seperti Tan Malaka dan Tjokroaminoto terlalu berharga untuk dilupakan. Kedua tokoh itu punya pengaruh besar bagi perjuangan dan kegiatan politik Sukarno. Tan Malaka melalui bukunya *Naar de Republiek Indonesia* (menuju Republik Indonesia) memberi gagasan brilian menyangkut demokrasi. Baginya, demokrasi berakar kuat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Nusantara. Sementara itu, Tjokroaminoto dalam rentang waktu yang beriringan mengumandangkan pentingnya sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi dalam rangka menjadi “para demokrat dan sosialis sejati”.

Simbol burung garuda yang terdapat dalam pancasila merupakan sebagai simbol yang khas Indonesia, yakni burung rajawali yang ada di negeri ini. Rajawali hendaknya diterjemahkan dengan kekinian sebagai makhluk perkasa, sebagai Batman yang mampu menakhlukkan jagat raya. Rajawali merupakan makhluk atau konsep berpikir yang bebas progresif, mampu mengarungi jagat raya dan samudera terbang ke mana-mana. Mampu menghadang angin dan topan yang menerjang. Panas terik matahari, dan hujan bukan penghalang untuk dapat eksis di era globalisasi dan digitalisasi.

Dengan pemaknaan-pemaknaan yang progresif, diharapkan ke depan generasi milenial tumbuh sikap optimis secara massif, wacana-kemerdekaan berpikir kritis logis akan dapat menyemai menumbuhsuburkan gerakan pemikiran kesadaran akan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemaknaan nilai-nilai spiritualitas ajaran leluhur bukanlah slogan semata, namun perlu diterjemahkan dalam perilaku hidup di masyarakat sebagaimana inti makna spiritualitas pancasila yang berkepribadian konteks Indonesia. Melalui komitmen ajaran yang diamalkan secara terus menerus dari generasi ke generasi, setidaknya masyarakat akan memiliki kekebalan terhadap berbagai rayuan, ancaman dan gangguan. Mereka harus sadar, bahwa ajaran leluhur memiliki superioritas khasanah keilmuan maupun pemikiran, memiliki daya tawar yang sangat relevan dengan konteks zaman kekinian.***

Daftar Pustaka

- Woodward, Mark R. *Islam Jawa, Kesalahan Normatif Versus Kebatinan*, Yogyakarta: KIS,2004,
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Drs. M. Darori Amin, M.A. [ed], *Islam dan Budaya Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- <http://www.al-islam.or.id>
- Rusli Karim. *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia antara Cita dan Fakta*. Muslih Esa (ed), Pustaka Tiara, Yogyakarta, 1991.
- Subagya, Rachmat. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Gunawan Sumodiningrat, “*Budaya Jawa dan Integrasi Nasional*”, dalam: Leila Retna Kumala (Ket. Pan.), *Keraton Surakarta dan Perubahan Masyarakat, Membumikan Nilai-nilai Tradisional*, (Surakarta: Team Simposium Nasional, 2003).
- Louis Leahy. *Filsafat Ketuhanan Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Y.A. Surohardjo. *Mistisisme Suatu Introduksidi dalam Usaha Memahami Gejala Mistik termasuk yang Ada di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Geertz Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Suseno,Franz Magnis. *Etika Jawa dalam Tantangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Simuh. *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*. Yogyakarta: Bentang, 1999.

Tim Nusa Indah. *Bung Karno dan Pancasila, Ilham Dari Flores untuk Nusantara*. Ende, Nusa Indah, 2015.

Bung Hatta. *Buku 2 Kemerdekaan dan Demokrasi*, Jakarta, LP3ES, 2000.

Yudi Latif. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia, 2011.

MAKNA PENDIDIKAN MORAL, PENDIDIKAN KARAKTER DAN REALISASINYA TERHADAP PENGUATAN NILAI-NILAI NASIONALISME

Farida Ariani

Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang,
arianifarida148@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengupas makna pendidikan moral, pendidikan karakter dan realisasinya terhadap penguatan nilai-nilai nasionalisme. Kajian pendidikan moral ditinjau dari konsep psikologis konstruktivis Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg tentang target pendidikan moral mewariskan nilai-nilai kebebasan individu melalui pembangunan struktur kognitif (tahap penalaran moral) dalam afektif (penanaman nilai-nilai moral) yang disusun dalam pendidikan karakter, sedangkan pendidikan karakter ditinjau dari konsep Lickon dan Davidson lebih menekankan pada penguatan penalaran dan berfikir kritis siswa dalam mengkaji masalah-masalah moral yang lebih luas. Realisasi pendidikan moral dan karakter terhadap penguatan nilai-nilai nasionalisme dapat dilaksanakan melalui tiga strategi pembelajaran yaitu *pertama*, strategi pembelajaran terintegrasi antar mata pelajaran yang dilaksanakan guru dikelas, *kedua*, strategi penguatan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler dan *ketiga*, strategi pendidikan kemitraan dengan melibatkan instansi pemerintah, swasta, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun sikap nasionalisme

Kata kunci: *pendidikan, moral, karakter, penguatan nilai. nasionalisme*

PENDAHULUAN

Pendidikan moral mengajarkan nilai-nilai etika dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan moral dimasukkan dalam kurikulum pendidikan bertujuan mewariskan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat atau Negara kepada generasi penerus dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai dasar kepribadian bangsa yang berlandaskan budi pekerti yang luhur, bermartabat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pemikiran Aristoteles dan Konfusius mengungkap tujuan pendidikan moral bagi suatu bangsa adalah mempertahankan peradaban mereka. Pendidikan moral diajarkan kepada generasi bangsa di sekolah bertujuan membimbing dan menanamkan nilai-nilai positif dan kebaikan kepada siswa dalam bergaul di lingkungan masyarakat baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat luas. Pendidikan moral lebih focus pada pengamalan

nilai-nilai etika, agama, adat istiadat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan moral sangat diperlukan dalam pembinaan masyarakat, terutama mendidik generasi muda mulai dari sekolah rendah hingga ke perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan moral diejawantahkan melalui pendidikan karakter, dimana pembinaan dan penguatan etika, moral dan cinta tanah air dipupuk sejak usia sekolah. Dengan pembinaan karakter yang baik diharapkan dapat membantu orang tua menanamkan sikap dan perilaku bermoral, beretika dan beradab. Pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah kepada siswa bertujuan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, beriman dan bertakwa sesuai dengan amanat nasional Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menanamkan nilai-nilai etika, moral dan agama dalam diri siswa agar siswa disiplin dan taat hukum.

Dalam pemanfaatan sumber daya, penguatan kognitif dan karakter diri sangat diperlukan. Bangsa yang memiliki karakter diri yang tinggi, berketuhanan, berperikemanusiaan, dan keadilan adalah bangsa yang memiliki peradaban tinggi (Berkowitz, Sherblom, Bier & Battistich, 2006; cf. Larson, 2000). Dalam melaksanakan pendidikan karakter banyak pendekatan yang bisa diterapkan guru ketika mendidik siswa berperilaku positif. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan nilai-nilai dan etika ini yaitu pendidikan moral dan pendidikan karakter. Artikel ini bertujuan mengupas makna pendidikan moral, pendidikan karakter dan realisasinya terhadap penguatan nilai-nilai nasionalisme.

PENDIDIKAN MORAL

Pendidikan moral di barat dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh konsep psikologis konstruktivis. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Jean Piaget (1965) dan kemudian oleh Lawrence Kohlberg (1971,1976),. Pendidikan moral mereka adalah upaya mewariskan nilai-nilai moral kepada peserta didik dalam masa perkembangan mereka melalui pembangunan struktur kognitif (tahap penalaran moral) dalam struktur afektif (penanaman nilai-nilai moral) yang disusun dalam kurikulum pendidikan karakter di sekolah. Colby & Kohlberg, (1987) mengidentifikasi enam tahapan konstruksi moral yaitu 1) memberikan informasi nilai-nilai kebenaran menurut tatanan sosial dan norma yang berlaku di masyarakat, 2) menjelaskan aturan agama yang tidak boleh dilanggar dalam kehidupan, 3) menjelaskan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, 4) memberikan pemahaman moral pada peserta didik, 5) memberikan tauladan dalam rangka membentuk karakter positif pada anak dan 6)

membangun karakter anak yang cerdas, mandiri, berani, jujur, hormat, toleran, cakap, kreatif, beriman dan bertakwa. Semua sikap ini menjadi pegangan anak dalam berperilaku, bertutur kata dan bersikap dalam pergaulan kehidupan mereka sehari-hari. Keenam tahapan ini bersifat universal. Dari sudut pandang pendidikan, ada dua hal yang saling terkait dengan pendidikan moral dan karakter yaitu pendekatan pedagogis dan pendekatan afektif.

Menurut Berkowitz (1985) pemahaman moral pada pendidikan karakter memerlukan diskusi *peer-group*. Terkait masalah ini focus pendidikan adalah melaksanakan diskusi tentang moral secara terbuka. Diskusi ini mengangkat nilai-nilai kebenaran yang menjadi tatanan etika dalam moralitas kehidupan masyarakat. Permasalahan demoralisasi, pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat adalah permasalahan kompleks yang perlu dibahas dalam diskusi di dalam kelas dalam meningkatkan kemampuan penalaran kognitif siswa tentang moral. Power, Higgins, & Kohlberg (1989) mengamati penyebab munculnya perilaku radikal adalah terjadinya demoralisasi nilai-nilai di lingkungan masyarakat yang melanggar tatanan demokrasi dalam kehidupan suatu Negara. Penelitian Powe et al terkait hal ini melibatkan 100 siswa dengan lima orang guru sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Temuannya mengungkap bahwa penguatan penalaran moral harus diiringi dengan ketauladanan guru membangun moral yang kuat dalam karakter diri siswa.

Althof (2003) melihat pembelajaran harus melibatkan pendidikan demokrasi yang berfokus pada penegakan keadilan dalam masyarakat. karakteristik penting dari kedua pendekatan moral dan pendidikan karakter ini ditinjau dari strategi pedagogis dipengaruhi oleh konsep psikologi, yang mengamati tahap-tahap perkembangan penalaran moral dan pengamalan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu perbedaan penting pendidikan moral dan pendidikan karakter adalah mengharuskan keduanya berangkat dari kajian psikologi yang sama, dimana pada kajian penalaran moral melibatkan kajian moral kognitif dan psikologi moral, sedangkan pada kajian pendidikan karakter melibatkan kinerja dan keberhasilan pebelajar dalam mengikuti pembelajaran nilai-nilai moral dan semangat nasionalisme. Pendidikan karakter lebih focus pada keadilan, toleran, saling menghargai, menghormati dan cinta kasih antar sesama dalam bingkai kehidupan yang demokratis. Sementara itu, pendidikan moral merupakan pembelajaran ketauladanan yang membentuk karakter diri seseorang dalam memegang teguh nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan terhadap nilai moral yang dianut menjadi bukti empiris pembentukan perilaku dan sikap siswa ke arah positif, dimana pengaruh psikologis sangat kuat membentuk karakter moral dalam diri seseorang. Berbeda dengan konsep psikologis di luar perkembangan moral, dimana pembentukan moral pada anak di masa

perkembangannya adalah hasil dari penalaran moral itu sendiri. Dalam hal ini terdapat pengaruh psikologi moral yang membentuk konsep diri yang dikendalikan oleh hati nurani (Kochanska, 1991), rasa empati (Hoffman, 2000), nilai-nilai (Schwartz & Bilsky, 1987) dan altruisme (Eisenberg & Mussen, 1989). Beberapa upaya yang telah dilakukan menawarkan model integratif untuk mengatasi masalah ini ditinjau dari konsep psikologis moral (termasuk pengembangan penalaran moral dan etika dalam pendidikan karakter (Damon 1988), Berkowitz (1997 dan Lapsley dan Narvaez 2006).

PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan karakter jauh lebih rumit lagi, dimana Istilah pendidikan karakter lebih umum digunakan di Amerika Serikat, yang sebelumnya sudah lama menggunakan konsep pendidikan moral. Pendidikan karakter memungkinkan dilakukannya proses pembelajaran etika, moral dan ketauladanan oleh guru kepada siswa secara kontinyu dalam rangka membangun karakter dan kepribadian siswa yang cerdas, mandiri, berani, jujur, menghormati, menghargai, toleran, cakap, kreatif, beriman dan bertakwa. Penggunaan istilah pendidikan moral lebih sering digunakan pada abad kesembilan belas sedangkan pendidikan karakter mulai dikenal pada abad ke dua puluh dan dua puluh satu dengan menekankan pada pendidikan karakter (McClellan, 1999).

Setelah Perang Dunia II, terjadi kekosongan pendidikan di AS dalam membangun perilaku positif di kalangan remaja. Namun seiring dengan berjalannya masa pergolakan sosial dan politik di tahun 1960-an, minat masyarakat untuk kembali belajar etika, moral dan agama mulai tinggi. Menanggapi pertanyaan masyarakat tentang nilai-nilai dan kebijakan moral, banyak pendekatan yang dilakukan, diantaranya adalah melaksanakan sosialisasi tentang pendidikan moral kepada masyarakat. Tugas mereka adalah memberikan pendidikan karakter kepada masyarakat. Terdapat klarifikasi nilai-nilai yang diajarkan dalam pendekatan karakter yang relatif singkat, tapi mampu memberikan berpengaruh yang lebih besar terhadap penguatan nilai-nilai nasionalisme dan kepemimpinan bila ditinjau dari filosofi moral relativisme. Bereda dengan bentuk pendidikan moral sebelumnya, dimana pendidikan nilai-nilai masih mengadopsi konsep arisoteles. Penerjemahan ini kemudian dikonotasikan kepada pendidikan perilaku. Sebagian besar karakter pendidik atau guru masih rendah, dimana semangat mengajarkan karakter tidak sejalan dengan ketauladanan yang dilaksanakan guru dalam membangun sikap dan perilaku positif di dalam masyarakat.

Pada awal 1990-an, bidang pendidikan karakter di Amerika mengalami perubahan, dimana pendidikan karakter mulai ditekankan kepada siswa remaja di sekolah-sekolah, hingga

dirumuskanlah kurikulum pendidikan karakter di tahun 1992. Josephson Institute meluncurkan perencanaan pendidikan karakter yang diselenggarakan Kemitraan bekerjasama antara Insitusi Pendidikan dengan lembaga pemerintah lainnya, lembaga swasta, tokoh professional, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Fokus pendidikan karakteri masa itu adalah penguatan nilai-nilai moral yang kemudian diperluas dalam kajian perspektif pedagogis dan filosofis. Baru-baru ini, keberadaan pendidikan karakter tetap menjadi fenomena yang sulit untuk didefinisikan, karena termasuk menyangkut rentang target, strategi pedagogis dan orientasi filosofis yang sangat luas. Ada tumpang tindih substansial antara pendidikan karakter dengan pendidikan moral, hal ini dibuktikan dengan adanya Asosiasi Pendidikan Moral yang juga termasuk dalam Pendidikan Karakter Kemitraan. Bahkan, banyak pendidik karakter di Amerika memasukkan pendidikan moral kedalam kurikulum pendidikan karakter. Lickona (1991) menekankan pembelajaran moral lebih pada penalaran moral yang dibahas melalui diskusi. Berkowitz dan Bier (2005) melaporkan bahwa program pendidikan karakter yang efektif sering menargetkan perkembangan moral sekaligus melaksanakan diskusi tentang permasalahan di dalam kelas Lickona dan Davidson (2005) mengusulkan kemampuan berpikir kritis sebagai salah satu target dari penalaran moral yang diajarkan dalam pendidikan karakter. Terutama pendidikan karakter kemitraan yang dilaksanakan di sekolah (Beland, 2003). Ada ketegangan perbedaan konsep antara pendekatan pendidikan karakter berbasis teori untuk mempromosikan kapasitas kognitif moral dengan pendidikan karakter yang lebih menekankan pada pengamalan nilai-nilai moral yang jauh lebih penting pengamalannya dalam kehidupan masyarakat.

PENDIDIKAN KARAKTER, PENDIDIKAN MORAL DAN INTERELASINYA

Di Amerika terdapat beberapa perbedaan utama antara pendidikan moral dengan pendidikan karakter. Pendidikan moral lebih didefinisikan sebagai pendekatan perkembangan kognitif dalam membentuk perilaku moral individu, Sedangkan pendidikan karakter adalah pendidikan yang cenderung berbasis teori dan pendidikan dan cenderung lebih pada kajian teoritis yang lebih kompleks. Pendidikan moral sangat dipengaruhi oleh model struktural kognitif yang berisikan tahapan-tahapan perkembangan penalaran moral sebagaimana yang diusulan Piaget, (1965); Damon, (1976) dan Kohlberg, (1976). Mereka menyebutkan bahwa pendidikan moral saat ini berbeda dengan definisi pendidikan moral tahun 1960-an, dimana pendidikan moral terus berkembang hingga saat ini yang kemudian berintegrasi ke dalam pendidikan karakter (McClellan, 1999).

Pendidikan moral biasanya memiliki fokus yang sempit (yaitu pengembangan struktur penalaran moral). Pendidikan moral di sekolah-sekolah di Amerika cenderung memperluas fokus pengembangan penalaran moral yang sempit menjadi lebih luas dengan menggabungkan pengembangan perilaku moral, nilai-nilai dan emosi (Kohlberg & Hersh, 1977), meskipun pengembangan penalaran moral tetap menjadi variabel utama dan bahkan dalam berbagai riset komunitas. Di sisi lain, Pendidikan karakter, memiliki satu set pemahaman yang komprehensif dengan beragam capaian yang yang ditargetkan. Selain itu, pendidikan moral juga bergantung pada rentang strategi pedagogis yang sangat sempit dibanding pendidikan karakter yang memiliki jangkauan yang sangat luas dengan banyak variabel strategi pengajaran yang dapat dilakukan (Berkowitz & Bier, 2005).

Pendidikan Moral, sebagai istilah yang dulu digunakan, lebih focus pada pembelajaran nilai-nilai moral yang menjadi domain kajian nilai-nilai budaya, sosial dan agama, berbeda dengan pendidikan karakter yang memasukan moral hanya sebagai salah bagian materi yang dipelajari. Pendidikan moral berfokus pada pengembangan keadilan dan penalaran moral beserta pertentangannya nilai-nilai moral yang terjadi di masyarakat sebagai permasalahan baru yang sering diangkat di tingkat akademik. Dalam hal ini diperlukan penalaran moral terkait dalam pembentukan karakter interpersonal. Pendidikan karakter, mengambil pendekatan yang sangat luas, sering mengaburkan batas antara konsep moral dengan konsep non-moral, walaupun terkadang keduanya saling berkaitan. Berkowitz (1997) berusaha menggambarkan pendidikan moral sebagai 'karakteristik dasar', yang menunjukkan bahwa pembelajaran moral tidak saja khusus berpijak pada sifat dan nilai-nilai saja tetapi juga perilaku seperti ketekunan, kesetiaan, dan keberanian. Ketiga perilaku ini merupakan output dari pembelajaran moral dalam membangun peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Baru-baru ini, Lickona dan Davidson (2005) menawarkan model baru dalam mengidentifikasi dua sisi karakter ditinjau dari pendidikan karakter moral dan pendidikan karakter kinerja. Lickona dan Davidson berpendapat bahwa keduanya adalah sama dalam status pembelajaran karakter, tetapi tidak sama dalam turunan pembelajaran yang dilakukan dimana pendidikan karakter moral lebih pada penalaran moral dan mengkaji tentang nilai-nilai etika dalam kehidupan bersyarakat, sedangkan pada pendidikan karakter kinerja lebih pada penguatan karakter diri yang berorientasi hasil positif seperti semangat, ketekunan, keberanian, kemandirian, dan perilaku-perilaku motivasi lainnya.

Bagi banyak pendidik, pembagian antara konsep moral dan non moral ini menjadi alasan penting bagi mereka memisahkan antara pendidikan moral dengan pendidikan karakter, sedangkan bagi mereka yang melihat kedua hal ini sama lebih memilih bersikap dualitas

inklusif dengan menghubungkan kedua sisi akademik moral dan kinerja individu ke dalam pendidikan karakter.

Dilihat dari sejarahnya, pendidikan moral berasal dari tradisi ilmu sosial liberal sedangkan pendidikan karakter berasal dari kajian filsafat pendidikan tradisional. Kedua istilah ini bersifat dikotomi, namun, pada hakekatnya perbedaan antara pendidikan moral dan pendidikan karakter adalah dalam hal penempatan teori dimana pendidikan moral lebih kuat dalam penalaran moral dan sosial daripada pendidikan karakter yang kompleksitasnya lebih luas. Pendidikan karakter mencakup kajian nilai-nilai yang lebih luas dan kompleks bila dibanding pendidikan moral. Pendidikan karakter menempatkan kajian teoritis bergantung pada berbagai kombinasi etika moralitas dan perilaku psikologis. Kohlberg (1981) menulis metode pendidikan moral cenderung ke arah demokrasi liberal, (misalnya membahas nilai-nilai moral dalam suatu komunitas, dan menyatakan radikal bila nilai-nilai tersebut tidak bersifat demokratis). Pendidikan karakter lebih mengandalkan metode konservatif dan hirarkis (misalnya pengajaran langsung melalui ketauladanan yang inspiratif). Konsep pendidikan karakter lebih bersifat progresif (misalnya Proyek penanaman nilai-nilai moral pada Anak dan membangun kemampuan bekerjasama dalam pergaulan Akademik, Sosial dan Emosional (Watson et al., 1989).

Pendidikan moral, memiliki akar kuat dalam ilmu-ilmu sosial yang cenderung berpijak pada fakta empiris yang lebih kuat. Baru-baru ini, undang-undang pemerintah federal Amerika Serikat, menetapkan fakta empiris ini menjadi bagian dari pendidikan karakter (Beland, 2003; Berkowitz & Bier, 2005) Dalam hal ini sering terjadi penggabungan penelitian pendidikan moral kedalam pendidikan karakter. Bahkan, dalam tinjauan komprehensif kedua istilah ini menjadi satu sebutan yaitu pendidikan karakter dengan tetap melakukan pengembangan penalaran nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral.

KAJIAN FILOSOFIS PENDIDIKAN KARAKTER

Ada dua teori utama yang berfokus pada pengaruh genetik dan kematangan dalam pengembangan karakter: nativisme dan sosiobiologi. Para filsuf nativis seperti Rousseau (1979) percaya bahwa sifat manusia pada dasarnya baik dan bahwa pengaruh sosial yang tidak sehat seharusnya tidak diizinkan untuk menggagalkan perkembangan alami kecenderungan anak untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara moral. Konstruktivis saat ini sering menyajikan salah tafsir nativistik Piaget (1969) engan melihat heteronomi (kebaikan yang dipaksakan secara eksternal) sebagai penghalang dan bukan prasyarat penting bagi otonomi moral, seperti yang diusulkan Piaget (1998). Sosiobiologi juga berfokus pada pengaruh

genetika dan maturasi terhadap moralitas menemukan bahwa sampai 50% varians dalam perilaku dapat ditentukan secara genetis.

Teori perkembangan kognitif perkembangan karakter moral yang didominasi selama tahun 1970an didasarkan pada karya Piaget (1969) dan Kohlberg (1984). Ini mengusulkan agar semua anak cenderung melakukan pemikiran moral, etika, perasaan, memilih, dan berperilaku. Moralitas dipandang sebagai hasil pengembangan pemikiran moral berdasarkan konsep keadilan.

Kohlberg (1984) mengemukakan bahwa pemikiran moral didasarkan pada pemikiran individu mengenai keadilan, keadilan, dan keadilan. Dia menyatakan bahwa pemikiran anak tentang benar dan salah dimulai dengan pengkondisian operan. Seiring bertambahnya usia anak, ia mampu memikirkan yang benar dan salah dalam hal timbal balik. Miller (2004) menegaskan bahwa teori Kohlberg dikembangkan dengan menggunakan anak laki-laki dan laki-laki dan bahwa perempuan dan perempuan memiliki dasar yang berbeda untuk membuat keputusan moral.

Pandangan Neo-Kohlbergian yang dikembangkan oleh Rest dan rekan-rekannya (Narvaez & Rest, 1994; Rest, 1986; Rest, Narvaez, Bebeau & Thoma, 1999) mengemukakan ada tiga tingkat penilaian moral: (1) kepentingan pribadi, (2) menjaga norma, dan (3) post-konvensional. Mereka setuju bahwa gerakan dari orientasi-diri ke orientasi-orientasi lainnya muncul saat anak mengembangkan skema pemeliharaan masyarakat. Mereka mengusulkan bahwa pemikiran pasca-konvensional dapat dianggap menciptakan masyarakat daripada mempertahankan masyarakat.

Salah satu sudut pandang yang paling baru dikembangkan mengenai pengembangan karakter moral yang dapat ditempatkan dalam kategori interaksional adalah kognisi sosial (Bandura, 1977, 1991). Fokus lain dari pandangan sosial-kognitif adalah agensi manusia atau kemauan. Sedangkan Kohlberg (1984) dan strukturalis kognitif berkonsentrasi pada peningkatan tingkat penalaran moral, Bandura (1977, 1991) lebih berfokus pada pengaturan diri dan self-efficacy. Dia mengusulkan agar perkembangan moral terjadi secara bertahap dari transaksi dengan lingkungan, termasuk penerapan konsekuensinya, pengamatan model, dan akulturasi oleh agen sosial.

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER

Kemendiknas (2010) ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter yaitu: Uraian dari 18 nilai pembentuk karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Religius, adalah

sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain; (2) Jujur, adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan; (3) Toleransi, adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya; (4) Disiplin, adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan; (5) Kerja keras, adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya; (6) Kreatif, adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki; (7) Mandiri, adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas; (8) Demokratis, adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain; (9) Rasa ingin tahu, adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar; (10) Semangat kebangsaan, adalah cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya; (11) Cinta tanah air, adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa; (12) Menghargai prestasi, adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain; (13) Bersahabat/komunikatif, adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain; (14) Cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya; (15) Gemar membaca, adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya; (16) Peduli lingkungan, adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi; (17) Peduli sosial, adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan; (18) Tanggung jawab, adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga

negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman.

INSTRUCTIONAL EFFECT DAN NUTURAN EFFECT

Keberhasilan pembelajaran karakter sangat erat dengan pembangunan sikap siswa. Sikap yang baik akan menghasilkan prestasi belajar yang baik dan sebaliknya, sikap yang buruk akan menyebabkan prestasi belajar juga buruk. Setidaknya ada tiga elemen dalam sikap yang perlu dipahami yaitu kognitif, afektif dan behavioral. Elemen afektif dari sikap adalah kembali pada respon emosional terhadap suatu objek, yakni bagaimana orang merespon sesuatu. Elemen kognitif terkait dengan kepercayaan dan pengetahuan seseorang tentang sesuatu objek. Elemen behavioral mengarah pada kecenderungan untuk mematuhi sikap. Tiga elemen inilah yang menentukan sikap seseorang bisa kuat atau lemah, sadar atau tidak sadar, terisolasi atau terintegrasi dengan sikap-sikap lain. Dalam pembelajarn nilai-nilai moral dan pembangunan karakter diri siswa memerlukan proses instructional effect dan anturan effect.

Instructuional effect pada pendidikan karakter adalah tujuan yang ingin dicapai melalaui pembelajaran yang berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan nurturant effect lebih pada tujuan pembelajaran ikutannya akibat dari hasil belajar yang diikuti. Naturan effect melahirkan sikap dan perilaku yang merupakan pengaruh dari *instructional effect*, artinya pengetahuan kognitif tentang moral dan nilai-nilai akan terbentuk menajdi karakter dan kepribadian sisiwa dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari di sekolah. *naturan effect* diantaranya adalah melahirkan kemampuan berpikir kritis, bersifat terbuka menerima pendapat orang lain, kreatif, disiplin, jujur dan sebagainya karena siswa menghayati pengalaman diskusi kelompok di dalam kelas. keberhasilan belajar ini bukanlah semata-mata keberhasilan dari segi kognitif dan psikomotorik saja, akan tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain, seperti aspek afektif. Pengevaluasian satu aspek saja akan menyebabkan pengajaran kurang memiliki makna yang bersifat komprehensif. Ketiga aspek ini merupakan unsur-unsur pendukung prestasi belajar. Dikatakan terdiri dari berbagai aspek pendukung, sebab kalau kita kembalikan pada istilah pendidikan itu sendiri sangatlah kompleks, yaitu meliputi seluruh pembahasan tingkah laku, baik cita, rasa, dan karsa.

REALISASI PENDIDIKAN MORAL DAN KARAKTER TERHADAP PENGUATAN NASIONALISME

Menanamkan nilai-nilai nasionalisme di sekolah dapat dilakukan melalui interelasi pendidikan moral dan karakter oleh guru kepada siswa sebagai generasi muda. Interelasi pendidikan ini menjadi perhatian khusus pemerintah, hal ini dikarekan pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman dan motivasi kepada semua masyarakat untuk menanamkan dan menjaga semangat nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air pada bangsa dan negaranya. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme melalui interelasi pendidikan moral dan karakter tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dimana proses pembelajaran moral dan karakter nasionalisme harus dilakukan secara kontinuitas dengan terus meningkatkan semangat nasionalisme yang mencakup delapan elemen penguatan karakter yaitu penguatan karakter budaya, agama, bahasa, suku, adat istiadat, ras, sosial dan lainnya. Untuk itu dalam pendidikan moral dan karakter saat ini di Indonesia, penguatan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air dilakukan melalui penanaman nilai-nilai kebangsaan secara lebih intensif untuk menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia.

Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam interelasi pendidikan moral dan karakter meliputi penguatan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai agama, nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, nilai-nilai sosial dan nilai-nilai hukum yang menjadi dasar berdirinya Negara Republik Indonesia. Penanaman nilai-nilai ini dalam pendidikan karakter melahirkan generasi muda yang cerdas, intelektual, cakap, toleran, menghormati dan menghargai terhadap adanya perbedaan, kreatif, cinta tanah air, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bentuk nilai-nilai nasionalisme yang ditanamkan dalam pembelajaran karakter, terutama pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama Islam, pendidikan IPS, Pendidikan Budaya dan mata pelajaran lainnya diintegrasikan pada penguatan karakter kebangsaan siswa melalui penguatan sikap siswa dalam menghargai jasa pahlawan, menghargai dan menggunakan produk dalam negeri, menghargai keindahan dan budaya Indonesia, menghafal lagu-lagu kebangsaan, dan menjaga kesatuan Republik Indonesia dengan menghormati segala perbedaan yang ada di dalam kebinekaannya.

Penanaman nilai-nilai nasionalisme menjadi kewajiban setiap lembaga pendidikan dalam membangun karakter nasionalis kepada siswa sebagai generasi muda penerus bangsa. Pendidikan karakter berorientasi pada penguatan nilai-nilai nasionalisme siswa dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu penguatan jiwa nasionalisme juga dapat dibangun melalui pendidikan komunitas dengan membangun karakter patriot seperti kegiatan

dan pembelajaran Pramuka, teater, palang merah, pendidikan lalu lintas dan kegiatan perayaan hari-hari kebangsaan.

Keberhasilan pendidikan moral dan karakter membangun nilai-nilai nasionalisme kebangsaan tidak lepas dari peran guru, terutama guru pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan tauladan pada pengamalan sikap dan tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme tersebut. Diantara nilai-nilai nasionalisme tersebut menurut Rofiatul Hasinal (2016) adalah membangun rasa cinta pada tanah air, menghargai jasa pahlawan, giat belajar untuk kemajuan bangsa, mencitai produk dalam negeri, menghormati guru di sekolah, jujur dan ikhlas dalam bekerja, menghormati perbedaan dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain.

Model pendidikan integrasi dalam interelasi pembelajaran moral dan karakter membentuk jiwa nasionalisme dilakukan melalui pengintegrasian antar mata pelajaran. Ada tiga strategi yang bisa diterapkan dalam pendidikan ini yaitu 1) strategi pendidikan moral dan karakter kebangsaan oleh guru di kelas melalui intergrasi mata pelajaran, 2) strategi ekstrakurikuler dan 3) pendidikan kemitraan dengan melibatkan institusi penegak hukum pemerintahan dan tokoh masyarakat.

Strategi menanamkan nilai-nilai patriotisme melalui pengintegrasian mata pelajaran dilakukan oleh guru di kelas dengan menerapkan pembelajaran tematik sesuai dengan kurikulum bidang studi yang relevan seperti mata pelajaran PKn, IPS, Agama, Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Menanamkan nilai dan semangat nasionalisme melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan oleh Lembaga OSIS, Kepramukaan, Palang Merah Remaja, Paskibraka, seni budaya dan sebagainya. Sedangkan pendidikan moral dan karakter untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme siswa melalui strategi kemitraan dapat dilaksanakan dengan strategi pembelajaran kemitraan yang melibatkan instansi pemerintah, swasta dan tokoh masyarakat yang dapat meningkatkan semangat nilai-nilai nasionalisme dalam diri siswa seperti pendidikan kemitraan bersama TNI, POLRI, Kejaksaan, Kehakiman, Ikatan Profesi, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat. Strategi lainnya dalam melaksanakan pendidikan moral dan karakter membangun nilai-nilai nasionalisme adalah dengan menerapkan bimbingan kejiwaan anak seperti dalam bentuk permainan, outbond, training, lomba, darmawisata, jamboree dan kegiatan yang mampu membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air siswa.

Kesuksesan pelaksanaan kegiatan pendidikan moral dan karakter dalam membangun nilai-nilai dan semangat nasionalisme anak bangsa di sekolah perlu dipenuhi kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan seperti kaset lagu perjuangan, tape recorder, pembinaan kebangsaan

dan sebagainya. Ketauladanan dalam interelasi pendidikan moral dan karakter untuk penguatan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air dapat dilakukan melalui 1) penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah, 2) membangun budaya kesantunan sebagai cara membangun nilai-nilai kekeluargaan dan kebangsaan guru dan siswa di sekolah, 3) memperingati setiap peristiwa sejarah nasional di sekolah sebagai bentuk menghargai dan menghormati jasa pahlawan sekaligus menumbuhkan jiwa patriotism dan rasa cinta tanah air dalam diri siswa.

Sikap nasionalisme yang ingin dicapai dalam pendidikan moral dan karakter di Indonesia setidaknya ada tujuh sikap nasionalisme yang diharapkan dapat terbentuk sebagai karakter diri bangsa yaitu 1) bangga berbangsa Indonesia, 2) cinta tanah air dan bangsa, 3) rela berkorban demi bangsa, 4) menerima perbedaan dan kemajemukan Indonesia, 5) bangga pada keragaman budaya yang dimiliki Indonesia, 6) selalu menghargai jasa para pahlawan dan 7) mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan moral dan karakter menggunakan konsep psikologis konstruktivis Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg difokuskan pada menjaga dan mewariskan nilai-nilai kebebasan individu melalui pembangunan struktur kognitif penalaran moral dan struktur afektif menanamkan nilai-nilai moral dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan karakter Lickona dan Davidson penguatan penalaran dan kemampuan berfikir kritis siswa mengkaji masalah-masalah moral lebih luas dan lebih kompleks termasuk penguatan nilai-nilai nasionalisme. Interelasi pendidikan moral dan pendidikan karakter terhadap penguatan nilai-nilai nasionalisme dilaksanakan melalui tiga strategi diantaranya strategi pembelajaran terintegrasi oleh guru di kelas, strategi pembelajaran nilai-nilai nasionalisme melalui kegiatan ekstrakurikuler dan strategi pendidikan kemitraan dengan melibatkan instansi pemerintah, swasta, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun sikap nasionalisme siswa. Sikap nasionalisme yang diharapkan terbentuk menjadi karakter kebangsaan dan cinta tanah air dalam diri siswa adalah 1) bangga berbangsa Indonesia, 2) cinta tanah air dan bangsa, 3) rela berkorban demi bangsa, 4) menerima perbedaan dan kemajemukan Indonesia, 5) bangga pada keragaman budaya yang dimiliki Indonesia, 6) selalu menghargai jasa para pahlawan dan 7) mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.

REFERENSI

- Althof, W. (2003) Implementing ‘just and caring communities’ in elementary schools: a Deweyan perspective, in: W. Veugelers & F. K. Oser (Eds) *Teaching in moral and democratic education* (Bern, Peter Lang), 153–172.
- Bandura, A. (1977). *Self -efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change*. *Psychological Review*, 84 (2), 191- 215.
- Bandura, A. (1993). *Perceived self -efficacy in cognitive development and functioning*. *Educational Psychologist*, 28 (2), 117 -148
- Beland, K. (Ed.) (2003) *Eleven principles sourcebook* (Washington, D.C., Character Education Partnership).
- Berkowitz, M. W. (1985) The role of discussion in moral education, in: M. W. Berkowitz & F. Oser (Eds) *Moral education: theory and application* (Hillsdale, NJ, L. Erlbaum), 197–218.
- Berkowitz, M. W. (1997) The complete moral person: anatomy and formation, in: J. M. DuBois (Ed.) *Moral issues in psychology: personalist contributions to selected problems* (Lanham, MD, University Press of America), 11–41.
- Berkowitz, M. W. & Bier, M. C. (2005) *What works in character education: a research-based guide for practitioners* (Washington, D.C., Character Education Partnership).
- Berkowitz, M. W., Sherblom, S., Bier, M. C. & Battistich, V. (2006) Educating for positive youth development, in: M. Killen & J. G. Smetana (Eds) *Handbook of moral development* (Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum & Associates), 683–701.
- Colby, A. & Kohlberg, L. (1987) *The measurement of moral judgment. Volume 1: Theoretical foundations and research validation* (New York, Columbia University Press).
- Damon, W. (1976) *The social world of the child* (San Francisco, CA, Jossey-Bass). Damon, W. (1988) *The moral child* (New York, The Free Press).
- Eisenberg, N. & Mussen, P. H. (1989) *The roots of prosocial behaviour in children* (New York, Cambridge University Press).
- Hasanah, Roifatul, 2016. *Peran Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme Siswa Kelas VIII MTs Hidayatun Nasyiin Pasrepan Pasuruan*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hoffman, M. L. (2000) *Empathy and moral development: implications for caring and justice* (New York, Cambridge University Press).
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. *Pedoman Sekolah Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. *Konsep dan Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*.
- Kochanska, G. (1991) Socialization and temperament in the development of guilt and conscience, *Child Development*, 62(6), 1379–1392.
- Kohlberg, L. (1971) Stages of moral development as a basis for moral education, in: C. Beck, B. S. Crittenden & E. V. Sullivan (Eds) *Moral Education: Interdisciplinary approaches* (Toronto, University of Toronto Press), 15–98.
- Kohlberg, L. (1976) Moral stages and moralization: the cognitive-developmental approach, in: T. Lickona (Ed.) *Moral development and behaviour: theory, research, and social issues* (New York, Holt, Rinehart and Winston), 31–53.
- Kohlberg, L. (1981) *Essays on moral development. Volume one: The philosophy of moral development* (New York, Harper and Row).
- Kohlberg, L. & Hersh, R. (1977) Moral development: a review of the theory, *Theory Into Practice*, 16(2), 53–59.

- Lapsley, D. K. & Narvaez, D. (2006) Character education, in: K. A. Renninger & I. E. Sigel (Eds) *Handbook of child psychology. Volume 4: Child psychology in practice* (New York, J. Wiley & Sons), 248–296.
- Larson, R. W. (2000) Toward a psychology of positive youth development, *American Psychologist*, 55(1), 170–183.
- Lickona, T. (1991) *Educating for character* (New York, Bantam). Lickona, T. (2003) *Character matters* (New York, Simon and Schuster).
- Lickona, T. & Davidson, M. (2005) *Smart and good high schools* (Cortland, NY, Center for the 4th and 5th Rs).
- McClellan, B. E. (1999) *Moral education in America: schools and the shaping of character from colonial times to the present* (New York, Teachers College Press).
- Miller, J. J. (2004) *Citizenship education policy at the school district level* (Denver, CO, Education Commission of the States/National Center for Learning and Citizenship).
- Piaget, J. (1965) *The moral judgment of the child* (New York, The Free Press).
- Rest, J.R. (1979). *Developing in judging moral issues*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Rest, J.R. & Narvaez, D. (Eds.) (1994). *Moral development in the professions: Psychology and applied ethics*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Rest, J. R., Narvaez, D., Bebeau, M., & Thoma, S. (1999). *Postconventional moral thinking: A neo-Kohlbergian approach*. Mahwah, NJ: Erlbaum
- Power, F. C., Higgins, A. & Kohlberg, L. (1989) *Lawrence Kohlberg's approach to moral education* (New York, Cambridge University Press).
- Rousseau (1979), *Emile: Or On Education*, Publisher: New York. Basic Books; 1st Edition. United State of America.
- Schwartz, S. H. & Bilsky, W. (1987) Toward a universal psychological structure of human values, *Journal of Personality and Social Psychology*, 53(3), 550–562.
- Watson, M. S., Solomon, D., Battistich, V., Schaps, E. & Solomon, J. (1989) The Child Development Project: combining traditional and developmental approaches to values education, in: L. Nucci (Ed.) *Moral development and character education: a dialogue* (Berkeley, CA, McCutchan), 51–92.

IMPLEMENTASI BUDAYA SEKOLAH DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PATRIOTISME REMAJA

Mamik Rahayu

Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang
mamik.rahayu82@gmail.com

Abstrak

Budaya Sekolah merupakan cikal bakal dari pembentukan karakter remaja agar memiliki kepribadian yang baik. Guru memiliki fungsi dan peran tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Orang tua juga berperan dalam pembentukan karakter, *Good government* dan *clean goverment* akan dapat terealisasi di Indonesia apabila remaja memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Pembiasaan adalah salah satu wujud dari rasa cinta tanah air dengan memberi senyum, salam, sapa kepada seluruh warga sekolah. Budaya jabat tangan merupakan suatu implementasi dari budi pekerti disetiap sekolah. Implementasi budaya sekolah antara lain masuk kelas tepat waktu, pengibaran Bendera Merah Putih Setiap pagi, upacara bendera setiap hari senin, menyanyikan lagu Indonesia raya dengan 3 stansa. Dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif diharapkan budaya sekolah dalam membentuk pembiasaan dan aktivitas ekstrakurikuler sebagai wujud cinta tanah air mampu membawa perubahan karakter dari negative menjadi positif. Nilai nilai budaya yang harus ada pada diri anak juga akan menjadi lebih kuat jika di landasi oleh nilai-nilai pancasila.

Kunci: *Budaya Sekolah, Patriotisme, Nilai-nilai Karakter*

Abstract

Cultural School culture is the core of the formation of adolescent character in order to have a good personality. The teacher has function and role not only teaching but also educating. Parents also play a role in character building, Good government and cleanover will be realized in Indonesia if adolescents have personalities that are in accordance with Pancasila values and the 1945 Constitution. Habitualization is one manifestation of the love of the homeland by giving smiles, greetings, and greetings to all school members. The implementation of school culture are Enter class on time, raise the Red and White Flag every morning, flag ceremony every Monday, sing Indonesian songs with 3 dancers. By using qualitative descriptive method, it is expected that the school culture in shaping habituation and extracurricular activities as a form of love for the country can bring changes in the positive character of adolescents from negative to positive. Cultural values of the student wiil be stronger if it has basic of our national constitution (pancasila)

Keyword: *School Culture, Patriotism, Character Values*

PENDAHULUAN

Kebudayaan sebagai hasil karya manusia yang diciptakan guna mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebudayaan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, budaya digunakan sebagai alat untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan alam. Wujud dari kebudayaan itu sendiri dapat berupa nilai-nilai yang diwarisi secara turun-temurun, yang digunakan sebagai acuan dalam bertindak dan bertingkah laku dalam komunitasnya. Kondisi remaja saat ini sangatlah miris, mereka mulai bersikap hedonisme, tawuran, menggunakan

narkoba, dan ditambah lagi yang lagi viral menari *hateers*, Inilah kondisi remaja di Indonesia saat ini yang sudah mulai menyimpang dari kondisi masyarakat yang bermoral menjadi Amoral. Banyak faktor yang menyebabkan degradasi moral remaja seperti pengaruh globalisasi dan informasi media sosial.

Sekolah bertujuan tidak sekedar proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sekaligus sebagai proses alih nilai (*transfer of value*). Artinya bahwa Sekolah, di samping proses pertalian dan transmisi pengetahuan, juga berkenaan dengan proses perkembangan dan pembentukan kepribadian atau karakter untuk menumbuhkan nilai-nilai cinta tanah air dalam bentuk upacara setiap hari senin di sekolah. Dalam rangka internalisasi nilai-nilai budi pekerti kepada peserta didik, maka perlu adanya optimalisasi pendidikan. Perlu kita sadari bahwa fungsi pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dari pendidikan saat ini.

Penanaman rasa cinta tanah air sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan semangat patriotisme remaja. Pendidikan juga dipandang sebagai sebuah sistem sosial, artinya dikatakan sistem sosial disebabkan didalamnya berkumpul manusia yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga pendidikan sebagai agen perubahan sosial diharapkan peranannya mampu mewujudkan perubahan nilai-nilai sikap, moral, pola pikir, perilaku intelektual, ketrampilan, dan wawasan para peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

Dalam pembentukan sikap patriotisme remaja, melalui pendidikan karakter di Sekolah diharapkan para remaja mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan etika, sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter di sekolah mengarah pada pembentukan kultur sekolah (proses pembudayaan), yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktekkan. Kultur tersebut merupakan ciri khas, karakter dan pencitraan sekolah dimata masyarakat.

Pendidikan karakter berbasis cinta tanah air dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma dan nilai perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan. Dengan demikian, pembelajaran nilai karakter tidak hanya pada ranah kognitif, namun menyentuh pada internalisasi dan pengamalan

nyata. Aktivitas upacara bendera setiap hari senin dengan seluruh peserta upacara menyanyikan lagu Indonesia raya tiga stansa sebagai salah satu upaya dalam merealisasikan semangat cinta tanah air di sekolah. Didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media strategis untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik murid. Melalui pembiasaan dan aktivitas ekstrakurikuler diharapkan dapat mengembangkan potensi, prestasi serta tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang berkarakter.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Pembentukan hipotesis (kerja) sejak awal telah dilakukan peneliti dengan terjun ke lapangan penelitian (Moleong,2004). Dilakukan di SMKN 8 Malang. Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa teknik, yaitu (1) observasi, (2) wawancara mendalam secara partisipatif hingga titik jenuh, dan (3) studi dokumentasi. Sumber data utama adalah sebagian dari siswa/siswi SMKN 8 Malang kelas X, XI dan XII . Mereka dipilih berdasar *purposif* sampling dalam upaya mendapat data yang lengkap, sesuai dengan tujuan penelitian. Digunakan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2002), melalui tiga tahap: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) menarik kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data pendidikan karakter yang akan dianalisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Sekolah

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling membutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan sifat unik menunjukkan bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki ciri ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Ciri ciri yang menempatkan sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana proses pembelajaran adalah pembudayaan kehidupan manusia. Sekolah merupakan sarana terjadinya proses pembelajaran atau dapat dikatakan sebagai agen perubahan bagi masyarakat. Maka dari itu, pengelolaan sekolah harus dilakukan dengan sebaik mungkin, terutama sekolah yang dijadikan pondasi pembentukan karakter siswa yang lebih baik (Bafadal,2009:13). Sekolah yang baik, populer dengan sebutan sekolah bermutu atau berkualitas dengan penerapan pembiasaan mulai awal masuk sampai pulang. Pada era globalisasi, mutu atau kualitas dinilai sebagai salah satu alat dalam mencapai keunggulan yang kompetitif, hal ini

disebabkan karena mutu merupakan salah satu faktor utama dalam memenuhi keinginan/tuntutan serta kebutuhan masyarakat (Hasbullah, 2006: 61)

Untuk itu remaja didalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan perubahan di segala bidang kehidupan. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk jaringan media social selain memiliki dampak negatif juga memiliki dampak positif. Remaja mudah untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan pelajaran tetapi disisi lain mereka mudah meniru bahkan melakukan perilaku yang amoral dikarenakan kurangnya filter terhadap informasi tersebut. Berbagai pola persaingan kompetensi yang semakin ketat dan berat. Kemajuan ini tentunya memberikan dampak, salah satunya pada lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah, dimana sebuah lembaga dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri. Selain itu, dampak yang dibawa tidak hanya positif, melainkan dampak negatif juga. Pengaruh yang dibawanya dapat menjadikan degradasi moral dan yang lebih parah jika terjadi degradasi iman (Nata,2010:207)

Kebudayaan merupakan tanggung jawab semua warga negara tanpa terkecuali, sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia, yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Sementara itu dalam konteks demografi dan antropologis, remaja dibagi ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja, atau usia produktif antara 15-40 tahun. Berdasarkan sudut pandang sosial budaya, remaja memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etnis, domisili, bahasa, ekonomi, dan agama. Dalam konteks tersebut, remaja juga memiliki lima karakteristik yang berpengaruh pada aktivitasnya, yakni :

1. Remaja kerap kali memiliki mental yang tidak berorientasi pada mutu.
2. Remaja cenderung memiliki karakteristik suka menerabas, hantam kromo, dan cenderung berani tanpa memperhitungkan baik dan buruknya.
3. Secara psikologis, generasi muda masih labil, dan cenderung memiliki karakter yang tidak percaya diri, mudah putus asa, minder, dan cenderung berupaya menghindari masalah.
4. Remaja juga cenderung kurang disiplin, sulit diatur, dan cenderung anti kemapanan.
5. Lemahnya remaja dalam mengemban tanggung jawab.

Implementasi Budaya Sekolah

Di dalam sekolah atau di dunia pendidikan guru sebagai tenaga pendidik bertugas untuk membangun sifat dan ketauladanan supaya tumbuh di dalam diri peserta didik kepribadian yang baik dan benar. peserta didik mencontoh apa yang dilakukan guru, apa yang di ucapkan

guru dan apa yang amalkan di dalam maupun di luar sekolah. Jika seorang guru melarang muridnya terlambat tapi pada kenyataannya dia sendiri sering datang tidak tepat waktu maka siswa tersebut juga akan menirukannya karena siswa akan merasa guru saja terlambat tidak dimarahi maka siswa pun akan melaukan hal yang serupa, pertama terlambat paling hanya di tegur, paling hanya di *push up*, hal demikian akan menjadi kebiasaan dan dapat merusak perilaku siswa. Dia akan terbiasa dengan kebiasaan yang tidak baik. Untuk itu sangat diperlukan menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik kita terutama remaja sebagai generasi penerus bangsa kita seperti;

- a). Pembiasaan mengaji bagi yang muslim yang non muslim membaca kitab kepercayaan masing-masing di pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 30 menit.
- b). Membersihkan dan menjaga lingkungan untuk selalu bersih. Sebelum kegiatan di kelas, semua siswa dilibatkan dalam hal ini. Jika hari Jumat ini diadakan kegiatan kerja bakti kebersihan lingkungan (Jumat bersih) maka hari Jumat berikutnya para siswa mengikuti senam kesegaran jasmani (Jumat sehat). Kegiatan ini dimulai pukul 06.30 sampai 07.30 WIB.”
- c). Memberi senyum, salam, sapa kepada seluruh warga sekolah. Budaya jabat tangan merupakan suatu implementasi dari budi pekerti di setiap sekolah. Saat ini budaya jabat tangan sudah menjadi adat kebiasaan sebagai salah satu bentuk kesopanan.
- d). Melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan berjama'ah.
- e). Membersihkan masjid.
- f). Mencuci mukena.
- g). Berdoa sebelum memulai dan mengakhiri.
- h). Masuk kelas tepat waktu.
- i). Membaca al qur an 10 menit sebelum jam pertama di mulai
- j). Pengibaran Bendera Merah Putih Setiap Pagi

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghormati jasa pahlawan, mendoakannya, dan menyanyikan lagu-lagu nasional yang membuat peserta didik tahu bagaimana sejarah bangsa Indonesia dan menanamkan jiwa patriotisme yang berorientasi pada nilai (value of orientation) di kalangan anak muda. Melibatkan peserta didik dalam organisasi-organisasi kepemimpinan pemuda, seperti pramuka dan paskibra, pramuka merupakan bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai potensi-potensi yang dimiliki guna membentuk kepribadian dan akhlak mulia pada generasi muda. Selain itu, pramuka memiliki peranan penting dalam menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi generasi muda. Contoh tersebut di atas adalah refleksi dari nilai-nilai budaya sekolah.

Sebagaimana Franz Magnis Suseno, dalam acara Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (14/01/2010) mengatakan bahwa pada era sekarang ini yang dibutuhkan bukan hanya generasi muda yang berkarakter tetapi berbudaya.

Pembentukan karakter yang berbudaya bisa diartikan suatu proses membentuk sifat, kepribadian seseorang yang mengarah pada sifat positif dan berkaitan dengan kebiasaan hidup. Sehingga dapat diterima di dalam masyarakat. Karakter tidak terbentuk secara tiba-tiba sebagai contoh kisah berikut;

“Suatu hari seorang anak laki-laki sedang memperhatikan sebuah kepompong, dan ternyata di dalamnya ada kupu-kupu yang sedang berjuang untuk melepaskan diri dari dalam kepompong. Kelihatannya begitu sulitnya, kemudian si anak laki-laki tersebut merasa kasihan pada kupu-kupu itu dan berpikir cara untuk membantu si kupu-kupu agar bisa keluar dengan mudah. Akhirnya si anak laki-laki tadi menemukan ide dan segera mengambil gunting dan membantu memotong kepompong agar kupu-kupu bisa segera keluar dr sana. Alangkah senang dan leganya si anak laki-laki tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Si kupu-kupu memang bisa keluar dari sana. Tetapi kupu-kupu tersebut tidak dapat terbang, hanya dapat merayap. Apa sebabnya? Ternyata bagi seekor kupu-kupu yang sedang berjuang dari kepompongnya tersebut, yang mana pada saat dia mengerahkan seluruh tenaganya, ada suatu cairan di dalam tubuhnya yang mengalir dengan kuat ke seluruh tubuhnya yang membuat sayapnya bisa mengembang sehingga ia dapat terbang, tetapi karena tidak ada lagi perjuangan tersebut maka sayapnya tidak dapat mengembang sehingga jadilah ia seekor kupu-kupu yang hanya dapat merayap”.

Itulah potret singkat tentang pembentukan kebudayaan di masyarakat, akan terasa jelas dengan memahami contoh kupu-kupu tersebut. Seringkali orangtua dan guru, lupa akan hal ini. Bisa saja mereka tidak mau repot, atau kasihan pada anak. Kadangkala *Good Intention* atau niat baik kita belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Sebagaimana disampaikan oleh Helen Keller; *Karakter tidak dapat dibentuk dengan cara mudah dan murah. Dengan mengalami ujian dan penderitaan jiwa karakter dikuatkan, visi dijernihkan, dan sukses diraih.*

Pembentukan Karakter Remaja

Ada berbagai pendapat yang menjelaskan pengertian karakter Menurut para ahli (Darmiyati Zuchdi, 2011: 27-28) antara lain:

- a) Karakter menurut Suyanto
adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
- b) Karakter menurut Pritchard
adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan hidup individu yang bersifat menetap dan cenderung positif.
- c) Karakter menurut Lumpkin

dalam pendidikan jasmani dan olahraga, karakter antara lain digambarkan dalam bentuk perilaku sportivitas, menghargai orang lain, menghargai fasilitas, pengendalian diri, kemauan dan tanggung jawab.

d) Karakter menurut Munir

adalah sebuah pola, baik itu pikiran, sikap maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang dengan kuat dan sulit dihilangkan.

e) Pendidikan Karakter Menurut Kamus Psikologi

adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap (Dali Gulo, 1982:29).

Ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Diknas. Mulai tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses pendidikannya. Dalam bentuk operasional pada pendidikan formal maka berdasarkan identifikasi sejumlah nilai pembentuk karakter yang merupakan kajian empirik Pusat Kurikulum maka untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter dirumuskan menjadi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai tersebut yaitu: 1. Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Toleransi: Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 4. Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja Keras: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 6. Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis: Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9. Rasa Ingin Tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 10. Semangat Kebangsaan: Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11. Cinta Tanah Air: Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 12. Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain,¹³.Bersahabat/Komunikatif: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain,¹⁴.Cinta Damai: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain,¹⁵. Gemar Membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya,¹⁶.Peduli Lingkungan:Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi,¹⁷. Peduli Sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan,¹⁸.Tanggung Jawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari beberapa pengertian di atas maka, karakter merupakan budaya yang pada akhirnya menjadi kebudayaan remaja dalam bersikap dan berperilaku. sehingga dapat diartikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai perilaku manusia yang universal serta meliputi seluruh aktivitas manusia, baik hubungan antar manusia dengan tuhan (*hablumminallah*), hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*) serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai tersebut secara teknis dituangkan dalam pembelajaran melalui rencana pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi ke dalam seluruh mata pelajaran Daryanto & Suryatri Darmiatun (2013: 47).

Sedangkan menurut Kemendiknas (2010:3) Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa karakter identik dengan akhlak. Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan kepribadian social budaya (Nurwahid, 2006: 1). Pendidikan disebutkan upaya untuk membentuk karakter manusia menjadi lebih baik. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif dan bias mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Kebanyakan anak-anak menunjukkan perilaku bermoral dan berbudaya yaitu keyakinan mana yang benar dan mana yang salah. Hampir semua kebudayaan melarang

beberapa perilaku pelanggaran moral karena perilaku tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian. (Nucci, 2001: Turiel, 2002).

Menumbuhkan Jiwa Patriotisme di Sekolah

Pada tahun 2035 adalah puncak emas negara Indonesia akan mempunyai generasi usia produktif dan tahun tersebut akan diisi oleh para remaja yang saat ini usianya berkisar 12 hingga 21 tahun. Dengan mengimplementasikan kebudayaan berperilaku yang baik dalam pembentukan karakter remaja sangatlah tetap dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berbudaya dan berkarakter terpuji dan baik. Nilai-nilai cinta tanah air tetap harus diterapkan dalam bentuk pembiasaan sehari-hari di sekolah.

Sekolah adalah tempat dimana mereka mendapatkan teman yang bisa di jadikan teman bahkan ada juga yang menganggap teman sebagai musuh mereka. Banyak remaja saat ini yang dikenal dengan sebutan *kid zaman now* atau ada juga yang menyebut mereka dengan Generasi Y dan Z, misalnya Generasi X masih mau beli koran dan baca koran secara urut dari halaman pertama sampai terakhir. Sementara Gen Y dan Z, mana mau beli koran? Untuk generasi Z dan Y cukup mencari di internet melalui hand phone mereka dan sebagainya kenapa istilah tersebut muncul karena banyak yang beranggapan remaja saat ini tahunya hanya menggunakan tanpa tahu membuat sebagai contoh sederhana remaja jaman dahulu masih suka bermain dengan teman temannya, membuat ketrampilan bersama atau bermain yang masih tradisional namun saat ini anak lebih sayang dengan lap top atau gadgetnya, sehari saja coba di pisahkan dengan hand phonenya pasti mereka akan resah, galau yang sedikit *alay* atau *lebay*.

Contoh yang sedikit ekstrim dan paling sering terjadi, siswa membolos berjamaah dengan alasan kebersamaan kalau di tanya kenapa melakukan hal tersebut dia akan menjawab, "*kebersamaan adalah segalanya*" (tanpa melihat efek yang terjadi merugikan dia sendiri dan orang lain termasuk orang tuanya sendiri), ada juga yang lebih ekstrim untuk remaja putri, mereka tidak malu berselfi dengan busana yang sangat minim, apabila ada yang memujinya semakin menjadi-jadi; oleh karena itu penting sekali membina budaya karakter anak dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasannya. Contoh di sekolah SMKN 8 Malang, nilai non akademis di tentukan oleh ranah kerajinan, kerapian dan kelakuan untuk syarat naik kelas tidak boleh ada nilai c di ketiga instrument tersebut. Untuk itu pelanggaran siswa dibagi menjadi 3 ; ringan, sedang dan berat. Pelanggaran ringan contohnya diantaranya adalah; tidak hadir ke sekolah 3 hari berturut turut tanpa keterangan, menggunakan hand phone di kelas tanpa se ijin guru, tidak menggunakan seragam sesuai aturan hari yang berlaku, yang termasuk pelanggaran sedang diantaranya adalah merokok, merusak sarana sekolah, berkata tidak sopan,

pelanggaran berat diantaranya adalah mengintimidasi teman/guru, mengikuti organisasi terlarang.

Dan apabila siswa melaksanakan pelanggaran, maka tim tatib melaksanakan *treatment* atau perbaikan sehingga mereka bisa mengurangi point mereka dengan melakukan kegiatan sebagai berikut;

- **Datang ke sekolah tidak boleh lebih dari jam 06.15**, tujuannya supaya mereka melaksanakan kebudayaan disiplin datang tepat waktu.
- **Mengambil sampah di sekitar sekolah**, tujuannya untuk ikut menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan menumbuhkan sikap tanggung jawab dan jujur.
- **Sholat dhuhur berjamaah**, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan untuk meredakan emosi atau nafsu yang tidak baik dalam dirinya.
- **Mengaji 10 menit sebelum sholat ashar**, tujuannya merenungkan perbuatannya yang salah dengan mendekatkan diri kepada Sang Khaliq
- **Mengikuti upacara bendera setiap hari senin**, menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan mengamalkan jasa-jasa para pahlawan dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Melaksanakan apel pengibaran dan penurunan bendera setiap hari**, menumbuhkan rasa bangga dan kedisiplinan menjadi warga negara.

Semua kegiatan tersebut diatas terdapat tanda tangan pihak terkait. Dengan *treatment* dilaksanakan dengan benar maka siswa akan berubah dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi. Pembentukan karakter dengan landasan patriotisme akan dapat membentuk jiwa rela berkorban remaja. Tidak hanya dari tim tatib tapi bisa juga dengan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan semua pihak. Ekstrakurikuler banyak ragamnya; olah raga meliputi; bola basket, bola volley, futsal, bela diri, jurnalis, bahasa Jepang, Jerman, robotic, web design, yang paling mendasar terdapat pada kegiatan paskibra, pramuka dan BDI. Di setiap hari besar melaksanakan kegiatan keagamaan secara menyeluruh bahkan baru baru ini sekolah melaksanakan perayaan natal dan mauled nabi secara serentak ini menunjukkan sikap toleransi beragama yang bisa menumbuhkan kebudayaan terpuji untuk generasi remaja penerus bangsa.

SIMPULAN

Budaya sekolah sebagai pondasi dasar terbentuknya kebudayaan remaja dimasyarakat. Terbentuknya sikap dan perilaku seseorang berawal dari kebiasaan yang dilakukan didalam lingkup kecil seperti sekolah yang akan terbawa dalam kehidupan dimasyarakat. Untuk

membentuk kepribadian peserta didik yang mengajarkan dan membentuk moral, etika, dan rasa berbudaya yang baik serta berakhlak mulia yang menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik dan buruk serta mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dasar budaya karakter sebagai landasan membentuk jiwa patriotisme di sekolah adalah nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Implementasi Budaya Sekolah dalam pembentukan karakter remaja kembali lagi kepada guru sebagai pendidik untuk mengarahkan dan mentransfer ilmu dan pengetahuan kita kepada para penerus bangsa dengan landasan agama dan dasar hukum negara kita.

Daftar Rujukan

- Setiawan Ehta.2012.Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.4 dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (edisi III)
- Suparno dkk.2010.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.um press:malang
<https://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASGABUD/article> (*diakses, 9 Nopember 2018*)
- Arikunto*, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moleong Lexy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Latipah Eva.2017. Psikologi Dasar. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/1982> (diakses, 10 Nopember 2018)
- Indriani, D. E. (2017). Character Education Based on Pancasila Values Through Curriculum 2013 on Primary Education Children in Madura. JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia) (*diakses,10 Nopember 2018*)

PANCASILA, NASIONALISME DAN PROBLEM FUNDAMENTALISME KEAGAMAAN

Dr. Mohamad Anas, M.Phil
Universitas Brawijaya, Malang

Abstrak

Paper ini mengulas mengenai persoalan kebangsaan yang menyangkut ideologi negara, yakni kelompok yang mengatasnamakan agama atau menggunakan agama sebagai kedok untuk memperjuangkan agenda politiknya. Terlepas dari penggunaan simbol agama yang dipakai, yang pasti ideologi trans-nasional ini nyata-nyata ingin mengganti ideologi Pancasila.

Dalam konteks itulah perlu digali dari aspek atau fondasi ideologinya yang melatarinya. Apakah betul berangkat dari keyakinan agama semata, atau mungkin ada agenda lain yakni kekuasaan. Problemnnya adalah bagaimana bisa menghilangkan atau mengikis ideologi yang telah lama tertanam?

Menyangkut hubungan agama dan nasionalisme, pertalian keduanya sangat jelas khususnya dalam konteks Indonesia. Jawaban khusus mengenai hal ini ditemukan dalam fakta sejarah mengenai pertalian yang sangat antara agama dengan nasionalisme, atau mengenai keselarasan antara keislaman dan keindonesiaan.

Peristiwa bersejarah ini menjadi pijakan yang kokoh dalam merumuskan posisi agama dan negara, agama dan kebangsaan bahkan agama dan Pancasila dari era ke era dalam sejarah pergumulan bangsa Indonesia. Sebuah posisi yang bahkan bisa dikatakan original dalam konteks pertikaian (sekuler) agama dan negara hingga meletakkan agama sebagai ideologi politik suatu negara.

Kata Kunci: Pancasila, Nasionalisme dan Fundamentalisme Agama

Menguatnya Radikalisme

Pada mulanya fundamentalisme muncul sebagai gerakan konservatif Protestan di Amerika dalam mempertahankan penafsiran terhadap ajaran iman tradisional di hadapan sains sekuler, misalnya, teori Darwin dihadapkan dengan teori penciptaan tanpa revolusi (Politik Demi Tuhan : 1999). Fenomena bangkitnya fundamentalisme agama (Islam) akhir-akhir ini, setidaknya dapat disebabkan oleh dua penyebab, **Pertama** adalah *faktor dari luar*, secara historis fundamentalisme merupakan kritik negatif atas modernitas yang memang bergulir dari dunia Barat. Pengaruh modernisme ini bukan hanya merambah pada wilayah sosio-kultural, akan tetapi berbagai lembaga struktural-institusional ikut terkena imbas dari modernitas. Pada masyarakat primitif, yang mulanya ditandai oleh *Pertama*, masyarakat terfragmentasi melalui fragmentasi pasangan (*binary*) mengikuti kelas-kelas sosial; seperti pria-wanita, Barat-Timur, kulit putih-kulit hitam dan seterusnya. *Kedua*, melalui fragmentasi sirkular, seperti urusan individu, keluarga, desa, kota, Negara. *Ketiga*, fragmentasi linier, seperti usia balita, anak-anak, sekolah dan kerja (Deleuze dan Guattari dalam bukunya *Thousand Plateaus*). Namun, ketika

batas global telah lenyap akibat globalisasi yang sengaja digulirkan, maka ikatan secara struktural yang terfragmen secara sirkuler, linier serta pasangan hilang-lenyap, tanpa ada batasan-batasan ruang dan waktu. Dalam konteks Indonesia, implikasi dari globalisasi ditandai dengan munculnya empat gerakan ideologis yang berkembang secara global, Yakni, Gerakan Etnik dan Sub-kultur, Gerakan pencipta lingkungan dan ekologis, Gerakan spiritual dan keagamaan, Gerakan ekonomi kapitalisme global sebagai bentuk ideologi (Yasraf Amir Piliang :1999). Penatnya globalisasi yang tidak mampu memecahkan problem-problem kemanusiaan, di antaranya ketidakadilan sosial, kemiskinan, serta menganggap Dunia Ketiga sebagai *uncivilized society*, masyarakat yang tidak berperadaban, menjadikan suatu kelompok *nekat* melancarkan aksi serangan kekerasan, baik secara fisik maupun non fisik.

Munculnya gerakan radikalisme agama di tanah air yang berbentuk “laskar” dan yang berlabel agama diduga menjadi biang kerok atas peristiwa teror yang terjadi di tanah air. Pada skala politik di tanah air menurut Khamami Zada, dalam bukunya *Islam Radikal; Pergulataaan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Islam Radikal di Indonesia dengan mengusung tema-tema yang ‘vulgar’ dan bersifat ideologis telah memasuki ruang beberapa partai politik di tanah air, di antara agenda utama mereka adalah mendirikan Negara Islam dan menegakkan syari’at Islam. Sisi lain yang menyebabkan munculnya gerakan fundamentalis di tanah air akhir-akhir ini sebagai akibat sikap represif penguasa Orde Baru yang melakukan uniformitas kultur-kultur lokal melalui asas tunggal. Pola penyeragaman ini telah mengebiri dan memandulkan kreatifitas rakyat. Lalu, ketika *kran* reformasi dibuka, kelompok-kelompok masyarakat yang selama Orde Baru terkebiri muncul dengan menegaskan identitas komunalnya, seperti gerakan etnis, gerakan fundamentalisme agama dan lain-lain.

Pada faktor dari luar, yakni pada skala global, munculnya fundamentalis Islam sebagai akibat ketidakadilan Dunia Barat, sementara dalam konteks Indonesia, fundamentalisme muncul sebagai respon atas represifnya kekuasaan Orde Baru. Dapat dikatakan bahwa faktor yang berasal dari luar tersebut sebetulnya lebih masuk pada dataran politik-ideologis yang mengatasmakan agama, dalam hal ini Islam. Maka ada benarnya apa yang dikatakan oleh Bruce B. Lawrence dalam *Defender of God* menyatakan bahwa *Fundamentalism is reduction of religion into ideology*. Sehingga kepentingan yang dibonceng oleh gerakan ini bisa berupa kepentingan pribadi, komunal sekaligus target politik.

Kedua, faktor dari dalam, pada dataran teologis, rancang bangun epistemologi kaum fundamentalis bersifat skripturalis-formalis dan eksklusif. *Frame work* ini dibangun atas tipologi sikap dan model kaum beragama yang dilakukan oleh Raimundo Punnikar.

Pemahaman agama yang bersifat dogmatik serta tekstual tersebut menyebabkan pesan-pesan yang bersifat profetis dari agama seperti, kesetaraan, pluralisme serta toleransi menjadi terabaikan. Lebih jauh, sikap yang dikedepankan dari kaum fundamentalis ini adalah sisi *emotional reference* daripada *rational reference*, kaum fundamentalisme Islam ini menginginkan umat Islam jauh sebelum abad 19 untuk kembali pada ajaran yang menurut mereka orisinal, tetapi ketika kaum fundamentalis ini setelah bertemu dengan Eropa, mereka membangun oposisi dengan Barat pada sisi nilai, politik serta kebijakan yang ditelurkannya, sehingga orientasi fundamentalisme Islam sudah bergeser pada wilayah politik. Tumpang tindih wilayah agama dan politik-ideologis ini yang kadang menjadikan agama dijadikan sebagai kambing hitam atas peristiwa teror yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia. Kerenanya pemetaan atas kedua hal tersebut yakni, *yang profane* (agama) dan *yang sakral* (politik) menjadi penting sebagai upaya meminimalisir tuduhan yang selama ini berkembang bahwa agama dibalik teroris.

Agama, Klaim Kebenaran dan Genealogi Islam Ortodok Indonesia

Secara historis-sosiologis, agama merupakan suatu fakta, data, dan fenomena yang bisa dikaji secara ilmiah (M. Sastrapratedja, 1983: 35). Di samping itu, agama juga menjadi kebutuhan yang mendasar bagi eksistensi manusia di dunia. Hal ini disebabkan oleh karakteristik manusia yang membutuhkan, tentu secara fitrah, akan keberadaan Yang Suci. Kebutuhan mendasar itu lalu terejawantah dan dibentuk dalam suatu sistem dengan berbagai perangkat aturan yang ada didalamnya, yang kemudian disebut sebagai agama. Pengaruh akan kehadiran agama ini ikut serta dalam membentuk serta menentukan pola berfikir dan sikap hidupnya (M. Sastrapratedja, 1983: 38).

Penghayatan akan keberadaan yang sakral terejawantah dalam aturan tertentu itu bersifat subyektif dan sekaligus plural. Artinya, setiap orang mempunyai pengalaman keagamaan (*religijs experiences*) masing-masing. Dengan demikian, sistem serta perangkat aturan-aturan yang dijalankan oleh setiap pemeluk agama juga plural sifatnya. Kenyataan ini, kadang membuat para pemeluk agama melupakan prinsip-prinsip ajaran agama, dan lebih terjebak pada aturan formalitas belaka.

Dalam hubungannya dengan agama lain (bahkan mungkin sesama pemeluk internal agama) 'masyarakat beragama' misalnya, seringkali bersikap eksklusif, mereka merasa bahwa hanya ajaran atau pemahaman agama merekalah yang dapat membawa dan memberikan keselamatan, tanpa mau melihat akan eksistensi agama lain (pemahaman agama kelompok lain) yang ternyata juga memiliki hal yang sama. Tidak seorangpun yang dapat mengingkari

bahwa setiap agama mengajarkan kebenaran kepada setiap pemeluknya, dan membawa misi keselamatan bagi seluruh umatnya. Begitu pula tak satupun agama di dunia ini yang mengajarkan atau menganjurkan kepada pemeluknya untuk melakukan kerusuhan, saling memusuhi, apalagi saling membunuh satu sama lain.

Salah satu ajaran yang dimiliki oleh setiap agama adalah ajaran untuk menghormati dan menghargai orang lain termasuk juga agama atau keyakinan yang dianut oleh setiap orang, akan tetapi umat yang mengaku telah beragama secara murni dan konsekuen seringkali memahami pesan-pesan Tuhan yang terdapat pada teks-teks kitab suci secara parsial dan tidak utuh. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya faktor pendidikan (keagamaan). Dengan memahami *ayat-ayat* kitab suci secara “sepotong-sepotong” maka akan melahirkan pemikiran yang sempit dan cenderung bersikap “eksklusif”.

Dalam Islam misalnya, terdapat ayat-ayat yang harus dipahami secara mendalam, integral, menyeluruh, kontekstual dan terbuka. Jika ayat-ayat tersebut hanya dipahami secara tekstual dan kaku, maka akan menimbulkan kerancuan dan memancing keributan terutama dengan penganut agama lain (atau kelompok lain dalam internal agama), karena hal yang sama (*eksklusivisme*) juga dimiliki oleh penganut agama lain. Para pengikut setiap agama menganggap agamanya sendiri yang lebih baik dan unggul dari semua agama yang lain. Masalah yang sering muncul adalah perang *truth claim* (keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya adalah satu-satunya agama yang benar), dan selanjutnya terjadi perang *salvation claim* (keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia) (Wahyuni Nafis, 1995: xxv). Secara sosiologis, *truth claim* dan *salvation claim* ini dapat menimbulkan berbagai konflik sosial-politik, yang mengakibatkan berbagai macam perang antar agama dan sampai sekarang masih menjadi kenyataan di dunia modern. Tepat kiranya apa yang diungkapkan oleh William Montgomery Watt bahwa sebagian pengikut agama, khususnya pengikut agama Kristen dan Islam berkeyakinan bahwa agamanya sendiri yang dianggap sebagai agama dalam arti yang sebenarnya, sementara semua agama lain itu tidak ada kebenaran sama sekali (William Montgomery Watt, 1996: 191).

Kepercayaan demikian lalu dijadikan sebagai landasan bagi penegasan pernyataan, seperti sebuah ungkapan: “satu-satunya agama yang berasal dari Tuhan adalah agama saya sendiri” atau “agama saya sendiri adalah satu-satunya agama yang mempunyai kebenaran Ilahiah yang asli, sementara semua agama-agama lain tidak asli lagi” (William Montgomery Watt, 1996: 192).

Klaim kebenaran (*truth claim*) terhadap agama sendiri seperti itu hanya akan menjadikan seseorang bersikap eksklusif-partikularis dan akibatnya akan menimbulkan hubungan yang tidak serasi antar umat beragama satu dengan yang lain. Apalagi jika keyakinan itu ditindaklanjuti dengan kegiatan ‘penyelamatan’ atau ‘peng-agamaa-an’ ulang lewat pintu agama masing-masing, sehingga seringkali terasa pahit dalam pergaulan umat beragama di era sekarang ini (Amin Abdullah, 1996: 36-44). Kegiatan semacam itu (dengan berbagai modus-operandi) sungguh amat merisaukan. Tentu saja, pandangan-pandangan eksklusivistis ini jelas tidak dapat dipertahankan di dalam kultur dunia global yang berbasis lokal saat ini, sebuah era yang oleh kalangan intelektual kontemporer di sebut sebagai era multikultural.

Perebutan Kebenaran: Di antara Ruang Privat dan Ruang Publik

Agama dalam ruang privat digambarkan dalam bentuk (*form*), simbol atau bahkan ornamen-ornamen yang dibakukan. Sujud, ruku, hajar aswad, surban, sarung, jubah, jilbab, dst adalah representasi-representasi keislaman yang bersifat personal dan privat. Tidak ada masalah yang cukup berarti jika kita menempatkan symbol-simbol keagamaan tersebut sebagai media penghayatan iman yang bersifat subyektif, individual dan personal. Namun, persoalan lalu mengemuka jika simbol-simbol keagamaan tersebut ditarik ke wilayah publik (puncak konfigurasinya adalah negara). Pada level kelompok, munculnya politik identitas yang berwajah ganda. Satu sisi bersifat merangkul (kalau ke dalam kelompok), sisi lain menyangkal (kalau keluar kelompok). Implikasi dari politik identitas ini menimbulkan garis demarkasi yang membedakan antara “kita” (*minna*) dan “mereka” (*minhum*).

Secara historis dan paradigmatis, di zaman Aufklarung hubungan agama dan negara hampir sama sebagaimana digambarkan oleh Ian Barbour (tentang hubungan agama dan ilmu), yakni berupa konflik. Ketegangan antara agama dan negara berakibat pada peminggiran agama kembali pada ruang privat. Agama berada dalam sudut, dipojokkan, dan dikebiri perannya hanya pada wilayah pribadi dan ritual semata. Pemisahan antara gereja dengan negara akhirnya melahirkan paham sekulerisme, yakni sebuah paham yang memisahkan secara nyata, jelas wilayah agama dengan negara. Paham sekulerisme berbeda dengan sekularisasi Cak Nur, sekularisasi Cak Nur dipahami sebagai sebuah pandangan yang memandang bahwa urusan dunia harus dipahami secara *ke-duniawiaan*, begitu pula urusan ukhrawi harus pula dipahami secara ekskatologi (*ke-ukhrowiaan*). Dalam konteks Islam, paham ini dikembangkan oleh ‘Ali Abdur Raziq yang berpandangan Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem kekhilafahan, tidak ada dalam Islam diperintahkan membangun negara, membentuk sistem

pemerintahan. Islam memberikan kebebasan untuk membentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi intelektual, sosial-budaya dan bahkan kondisi zaman.

Dalam praksis sosial, para analis kontemporer melihat militansi dan radikalisme agama (yang merupakan gejala akhir-akhir ini) merupakan akibat dari peminggiran agama pada ruang privat, sehingga ekspresi spiritual personal terputus dari ruang publik. Akibat dari hal ini muncullah kritik akan privatisasi agama tersebut, sehingga dalam kenyataannya tak ada negara di dunia ini yang secara ekstrim memisahkan hubungan agama dan negara. Dalam bahasa sederhana, sesekuler negara eropa pun (misalnya Denmark, Swedia, bahkan Perancis) memilih 'bersahabat' dengan agama.

Pada sisi lain, terdapat pandangan yang mengintegrasikan agama ke dalam negara berdasarkan pada sebuah keyakinan bahwa negara berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan dalam statusnya sebagai wakil Tuhan. Pandangan ini menjadi acuan kelompok fundamentalis Islam yang cenderung beranggapan bahwa Islam adalah agama total (*kaffah*), yakni meliputi segala aspek kehidupan, tak terkecuali politik. Al-Maududi berpendapat bahwa tak dikenal pemisahan agama dan negara sebab Syari'at adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi tatanan semua aspek kehidupan.

Secara umum penolakan terhadap model ini disebabkan karena pertimbangan keindonesiaan yang plural. Ketidakpisahan agama dan negara berpotensi dan cenderung terjadi politisasi agama dan justifikasi politik. Tiadanya batas dan otoritas yang jelas antara agama dan negara seringkali mengarah pada upaya pemanfaatan simbol-simbol agama untuk kepentingan tertentu. Pada level ini kita bisa menyaksikan bagaimana para capres 'sibuk' bertandang ke pemuka agama untuk 'meminta restu' atas pencalonannya. Hal ini dapat dimaknai sebagai saling pinjam symbol yang dimiliki masing-masing. Politik disimbolkan sebagai 'dunia' yang kotor, oleh karena itu ia harus 'meminjam; symbol kyai, pesantren, sebagai symbol kesakralan. Adakah yang dipinjam oleh agama (kyai, pesantren) dari dunia politik?. Lebih ekstrim lagi jika agama diintegrasikan ke dalam negara maka fungsi agama yang lebih tinggi 'diturunkan' sebagai alat politik untuk membenarkan kebijakan negara atau meraih kepentingan/kekuasaan. Pada titik ini semua, agama kehilangan batas otoritasnya sebagai sumber nilai dan acuan kritik sekaligus kontrol.

Di sisi yang lain, kita melihat sebetulnya ruang publik adalah ruang di mana arena percakapan secara bebas, tanpa intimidasi, serta tidak ada tekanan dalam berkomunikasi. Kesetaraan dan kesederajatan menjadi kunci dalam percakapan di ruang publik. Namun, pada kenyataannya kita melihat ruang publik (medsos) menjadi arena penyebaran kebencian, ruang

mempertontonkan sikap intoleran, serta lebih ekstrim lagi sebagai sarana penyebaran paham radikal.

Pada ruang publik media sosial juga kita melihat menjadi arena perebutan kebenaran yang dilakukan dengan sangat cukup keras dan kasar. Masing-masing pihak bersikukuh pada titik poin yang diyakini sebagai kebenaran mutlak, tidak ada upaya untuk ‘melompok’ dari kerangka atau perspektif di luar dirinya karena ini dianggap sebagai zona tidak nyaman. Kalau sudah demikian, dapat dipastikan tidak ada dialektika kritis dalam mendiskusikan isu-isu yang sedang diperbincangkan. Yang dominan adalah berdiri pada ke-aku-an dan berujung pada penafian yang lain. Saling menyingkirkan, itulah titik ekstrim dari sikap yang klaim atas kebenarannya sendiri dan cenderung menutup diri.

‘Ruang Publik’ Pancasila atau Pancasila di Ruang Publik

Gagasan mengayuh di antara dua karang (sebagaimana Bung Hatta) ketika menggagas ekonomi Pancasila yang berada di antara ekonomi kapitalis dan sosialis layak untuk kita diskusikan kembali. Dalam konteks hubungan agama dan negara seharusnya kita petakan terlebih dahulu otoritas atau kewenangan masing-masing dari agama dan negara. Perbedaan wilayah agama dan negara bukan bertujuan untuk memisahkan keduanya, sebab pemisahan keduanya akan mengarah pada ketertutupan diri atau isolasi. Mengutip al-Mawardi bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya sebetulnya sama-sama misi kenabian.

Dalam bahasa lain, masing-masing terhubung dengan ranah kehidupan yang berbeda secara konseptual, tapi bisa saja terhubung dalam metode, bentuk pemikiran, wacana dan tindakan. Dalam konteks problem kebangsaan, misalnya tentang korupsi, agama dan negara sangat mungkin berhubungan dalam hal ini, Agama menyediakan landasan moral untuk menopang soal pemberantas korupsi, atau bahkan jika dimungkinkan memberikan tawaran dalam hal model pemberantasannya. Pada level ini, agama juga dituntut melakukan proses obyektivikasi dan rasionalisasi agar bersifat universal. Kecenderungan subyektivisme agama jika diangkat ke ruang publik diperlukan proses penafsiran (pemahaman kembali) secara obyektif agar nilai-nilai agama (atau bahkan tawaran praksisnya) dapat diterima oleh semua kalangan tanpa memandang agama, suku, etnis dan seterusnya.

Pada tingkat tertentu, agama menjadi acuan kritik untuk melawan kekuasaan yang keluar dari moral dasar; agama juga harus terus mengontrol kecenderungan absolutisme dunia sekuler negara. Peran strategis agama ini merupakan bagian dari misi kenabian tertinggi di mana para Nabi mengambil peran yang demikian. Sementara dalam soal hubungan

peribadatan, negara memberi ruang dan media dan menjadi regulator dalam praktek keagamaan masing-masing di setiap agama dan aliran kepercayaan. Mungkin perlu dipertanyakan soal campur tangan negara dalam hal penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Negara tidak boleh masuk dalam ruang keyakinan dan pemahaman agama, sebab hal ini sangat rentan dengan keberpihakan pada agama/keyakinan tertentu yang berujung pada konflik. Negara perlu mendorong dan menjadi mediator penyelesaian konflik aliran keyakinan/agama pada kelompok-kelompok agama sendiri.

Dengan demikian, “toleransi kembar” (twin tolerations): situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya masing-masing ini akan mampu mendorong hubungan kritis dan sekaligus konstruktif dalam membentuk ketuhanan yang berkebudayaan dan bangsa yang berperadaban.

Dalam konteks peristiwa politik identitas, maka seharusnya kita patut mengoreksi ulang posisi agama dalam konteks peristiwa ini. Agama kini lebih dipahami sebagai bangunan ideologi yang penuh diwarnai dengan kepentingan untuk meraih kekuasaan, agama tidak dimaknai sebagai nilai bahkan sumber nilai yang menjadi rujukan dalam praktik kehidupan kebangsaan. Ranah sebagai basis nilai ini di samping diperlukan upaya pemaknaan ulang atau pengambilan dalil keagamaan (pendapat para ulama) yang sesuai dengan *urf/adat* dan kebaikan bersama atau bahkan tujuan utama diturunkannya *syari'ah* (*maqasid syariah*) juga memungkinkan terjadi ‘titik temu’ nilai-nilai agama-agama di Indonesia. Penggodokan mengenai nilai-nilai agama di ruang privat haruslah final sebelum ditampilkan di ruang publik.

Sementara negara Pancasila sebagai ‘ruang publik’ menjadi arena pendewasaan dalam percakapan lintas agama, suku, ras dan seterusnya. Posisi negara Pancasila mendorong dialog secara terus menerus secara terbuka tanpa ada keberpihakan pada salah satu agama. Negara Pancasila menjalankan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan keyakinan. Peristiwa di sekitar Pilkada DKI, misalnya, menunjukkan ketidakmatangan umat beragama dalam kehidupan kebangsaan di satu sisi, serta kuatnya agama ditampilkan sebagai ideologi untuk meraih kepentingan. Ketika agama diseret ke ranah ideologi, maka tak pelak terjadi politisasi agama oleh satu kelompok dan atau bahkan terjadi penistaan agama oleh kelompok lain.

Ruang publik Pancasila juga harus terus menerus menjadi *concern* dari semua elemen untuk menjamin agar ruang publik Pancasila bebas dari pemaknaan yang bersifat subjektif, atau bahkan cenderung mengarah pada makna tunggal yang akhirnya memonopoli kebenaran Pancasila. Di ruang publik Pancasila sangat dimungkinkan tafsir atas Pancasila sangat beragam, akan tetapi pada satu titik tertentu ada titik-titik konsesus yang harus diyakini

bersama, yakni konsesus kebangsaan. Lebih dari itu, pemahaman dan saling pengertian dan toleransi pemahaman sehingga tidak lahir gesekan hermeneutik Pancasila yang berujung anarki.

Kini, setelah peristiwa belakangan yang cukup menyita energi bangsa tersebut semestinya kita harus mendorong kembali peran agama yang lebih urgen dalam kehidupan kebangsaan, mengembalikan kembali ‘ruh’ agama yang yang justru selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara peristiwa penistaan agama, di samping harus diproses secara hukum, maka yang lebih penting dari itu adalah kita dorong kembali agama tidak menjadi bangunan ideologi. Ideologi itu laksana pisau yang mempunyai dua sisi, positif dan negatif, sebagaimana pemaknaan ideologi yang diberikan oleh para cendeia. Oleh karena makna ideologi yang selalu ambigu, bahkan dalam dataran praksis, maka agama terlalu sakral untuk diarahkan sebagai ideologi yang penuh dengan muatan kepentingan dan meraih kekuasaan politik.

“Pancasila dan Problem Fundamentalisme Keagamaan” di Kampus

Merebaknya paham radikal keagamaan, di tengah masyarakat kini bahkan di lingkungan kampus atau mahasiswa dapat dilihat akar persoalan tersebut dari berbagai sudut pandang. Dari perspektif epistemologis, akar fundamentalisme keagamaan sendiri berangkat dari cara pandang atas teks-teks keagamaan yang kering dari pendekatan yang mempertimbangkan aspek atau sentuhan sosio-kultural masyarakat setempat. Paham ini juga meletakkan agama sebagai ideologi sekaligus pembacaan agama yang hanya bercorak *bayani/tekstual an sich*, Akibatnya, teks-teks keagamaan terasa sangat kaku dan rigit. Paham konstruktivisme (dalam filsafat ilmu) semestinya menjadi pertimbangan penting dalam memahami teks-teks keagamaan dan bisa berdialog dan saling memperkaya antara teks dan realitas.

Lahirnya paham-paham keagamaan tersebut, yakni berupa produk pemikiran lalu menjadi ideologi yang kemudian diamini oleh pengikutnya. Ironisnya, para pengikutnya ini adalah kalangan yang masih belajar agama dan proses penemuan jati diri. Kondisi demikian, ditunjang oleh beberapa faktor social-cultural bahkan psikologis para mahasiswa ketika mereka masuk di perguruan tinggi.

Di sisi lain, Pancasila mengalami dilema yang cukup kritis dalam menempatkan posisinya sebagai ideologi bangsa. Diskursus yang berkembang di dunia akademik, Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai ideologi bangsa sebab penggunaan term ideologi baik pada ranah konsepsi maupun praxis selalu berwatak ambigu. Satu sisi ideologi dapat bermakna positif, sisi lain bersifat sebaliknya. Pada ranah praxis-historis, ideologi pancasila dijalankan dalam kerangka tafsir rezim tertentu sesuai dengan kepentingannya.

Kini, dihadapkan situasi yang cukup problematik tersebut, khususnya terkait dengan fundamentalisme keagamaan, maka diperlukan langkah perubahan mendasar dalam memahami Pancasila dalam konteks ideologi. Sementara pada ranah fundamentalisme keagamaan juga demikian. Skema “dialog” antar teks keagamaan dengan Pancasila harus terus menerus dilakukan baik dalam perbincangan yang menyangkut persoalan hubungan agama dan negara, agama dan nasionalisme, agama dan politik, agama dan HAM serta isu-isu lain yang penting untuk didialogkan.

Penyelarasan Keislaman dan Keindonesiaan (Kebangsaan)

Kyai Hasyim merupakan sosok yang berada di garda depan dalam menantang segala macam penindasan yang dilakukan oleh Kolonial Belanda. “Jihad Kebangsaan” yang pertama kali sangat populer di masa itu adalah tak kala mengeluarkan fatwa perlawanan terhadap Belanda. Fatwa tersebut berisi, *Pertama*, perang melawan Belanda adalah jihad wajib dan mengikat dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. *Kedua*, kaum muslimin dilarang menunaikan ibadah haji ke Mekkah dengan menggunakan kapal Belanda. *Ketiga*, kaum muslimin dilarang menggunakan pakaian atau atribut yang menyerupai penjajah.

Perlawanan demi perlawanan atau jihad kebangsaan terus digelorakan Kyai Hasyim termasuk ketika Kyai Hasyim menolak melakukan *saikerei*, yakni kewajiban memberikan penghormatan dengan cara membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 07.00 sebagai symbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketundukan kepada dewa Matahari. Sikap tersebut jelas merupakan respon represif dari tentara Jepang, yang mengakibatkan Kiai Hasyim dan sejumlah putra serta sahabatnya diringkus dalam Penjara.

Puncak perlawanan terhadap kolonial adalah pada tanggal 22 Oktober 1945, Kyai Hasyim berserta ulama di Kantor NU di Jawa Timur mengeluarkan sebuah *resolusi jihad* untuk melawan pasukan gabungan Belanda dan Inggris. Seluruh umat Islam Indonesia terbakar semangatnya untuk melakukan perlawanan pada tanggal 10 November 1945.

Tiga rangkaian besar peristiwa tersebut dalam pembacaan penulis menjadi rancang bangun yang kokoh dalam ‘mengawinkan’ agama dan nasionalisme. Dua entitas yang seakan tidak mungkin dapat dikombinasikan, akan tetapi di tangan Kyai Hasyim keduanya menyatupadu dalam gerakan melawan kolonialisme. Penyatupaduan dua entitas tersebut melahirkan kaidah yang sangat populer di kalangan tradisional, *hub al-wathon min al-iman*, mati membela tanah air merupakan suatu misi mulia yang akan mempertebal keimanan seorang muslim.

Komitmen kebangsaan NU terus berlanjut di era kemerdekaan, era di mana terjadi pergulatan dahsyat antara kelompok nasionalis dan kelompok islamis. Kelompok Islam yang

diantaranya terdapat Kyai Wahid Hasyim melakukan proses negosiasi atau kompromi yang berujung pada penghapusan 7 kata dalam piagam Jakarta yang akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bahwa dalam pembukaan dasar UUD 1945 tidak lagi berbunyi, Ketuhanan, dengan menjalankan syari'at islam bagi pemeluknya, tetap justru berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa.

Penerimaan Pancasila sebagai *common platform* dalam kehidupan berbangsa diteguhkan di era Orba. Muktamar NU pada tahun 1984 di Situbondo menegaskan dua hal penting dalam perjalanan NU hingga sekarang. Dalam penjelasan Kyai Salahudin Wahid, penalaran yang diusulkan oleh Kyai Achmad Sidiq perihal perlunya menerima Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Kyai Achmas Sidiq, jika Islam dijadikan dasar negara maka dapat diartikan Islam sejajar dengan ideologi atau paham-paham dunia tersebut. Padahal, Islam diyakini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, bahkan mengatasi paham-paham tersebut. Maka dengan tegas Kyai Achmad Sidiq mengatakan, “Pancasila adalah bentuk final dari upaya membentuk negara oleh seluruh bangsa Indonesia”.

Kini, setelah secara konseptual dan praktik dalam membangun sinergis Kebangsaan, Nasionalisme dan Islam (NU) diperlukan upaya terus menerus untuk melakukan jihad kebangsaan di tengah menyeruaknya politik identitas yang berlabelkan agama yang ujungnya untuk kekuasaan politis. Politik kebangsaan NU dalam hal ini sangat jelas dan tegas, yakni menjaga *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan).

Penyelarasan keIslaman dan keIndonesiaan, terutama terkait dengan ideologi Pancasila, merupakan suatu keharusan yang terus menerus untuk dilakukan, baik pada level wacana maupun gerakan. Harmonisasi ini sangat diperlukan untuk dapat meminimalisir terjadinya kontradiksi keduanya bahkan berujung pada penolakan ideologi Pancasila seperti yang dilakukan oleh HTI. Dalam catatan sejarah, penerimaan beberapa tokoh yang mewakili Islam di antaranya Ki Bagus Hadikoesoemo, Kyai Wachid Hasyim, dan lainnya menerima dengan lapang dada atas usulan dari Bung Hatta untuk mencoret “tujuh kata” pada sila pertama dalam Pancasila. Hal ini merupakan suatu bentuk ‘titik temu’ antara kelompok Islam dan Nasionalis yang luar biasa dahsyat dalam rangka menjaga persatuan bangsa sekaligus merupakan bentuk pengorbanan umat Islam yang tiada banding demi menjaga keutuhan bangsa ini.

Penyelarasan keIslaman dan keIndonesiaan terus berlanjut dalam sejarah dinamika dan dialektika agama dan negara di Indonesia, sebut saja UU pernikahan, Departemen Agama (kini Kementrian Agama), pendirian madrasah-madrasah dari tingkat Ibtidaiyah hingga Aliyah, serta masih banyak hal lainnya. Hal tersebut mencerminkan dinamika penyelarasan keIslaman dan keIndonesiaan dapat berjalan dengan baik.

Pasca reformasi 1998, kemunculan gerakan-gerakan untuk mengganti dasar negara menjadi Negara Islam justru mencerminkan ketidakharmonisan antara Islam dan Pancasila. Lagi pula menampilkan agama sebagai basis nilai dan moral secara substansial justru dapat selaras dengan nilai-nilai fundamental Pancasila. Lalu dengan demikian apakah Islam telah mengalami pereduksian? Atau bahkan dalam perspektif gerakan politik telah mengalami kekalahan. Jawabnya tentu saja tidak sebab sebab menampilkan agama (Islam) secara nilai atau substansial (tentu saja tidak mengabaikan aspek *dzahir* agama) justru akan semakin menemukan relevansinya dalam kehidupan bergama dan berbangsa. Begitu pula kehidupan berbangsa yang didasari oleh nilai-nilai substansial agama akan justru mampu mewujudkan suatu tatanan yang sama-sama bertujuan untuk kehidupan yang adil, bangsa yang cerdas dan berkeadaban.

Daftar Bacaan:

- Abu Zahra (ed.), 1999, *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayat
- Armstrong, Karen, 2001, *Sejarah Tuhan: 400 Tahun Pengembaraan Manusia Menuju Tuhan*, terj. M. Sadat Ismail, Jakarta: Nizam Press.
- Griffin, David Ray, 2001, *Tuhan dan Agama dalam Dunia Postmodern*, terj. A. Gunawan Admiranto, Yogyakarta: Kanisius
- Kartanegara, Mulyadi, 2005, *Nalar Religius, Tuhan, Alam dan Manusia*, Bandung: Mizan.
- Kaelan, 2009, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta
- Latief, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia
- Latief, Yudi, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung: Mizan
- Wahid, Abdurrahman, 2006, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute
- Misrawi, Z. 2013, *Hadratussaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas

PENANAMAN NILAI-NILAI CINTA TANAH AIR PADA ANAK MELALUI *FIELD TRIP*

Umi Salamah¹, Ahmad Said²

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

umisalamah393@gmail.com, searchahmadsaid@gmail.com

Abstrak

Cinta tanah air adalah suatu perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara untuk mengabdikan, memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Namun selama ini rasa cinta ini dirasa masih sangat minim pada generasi muda yang akan menjadi tumpuan dan harapan bangsa di masa mendatang. Field trip merupakan salah satu metode mempelajari langsung obyek yang akan dipelajari. Pembelajaran tentang sejarah tidak hanya dilakukan secara tekstual tetapi juga bisa secara kontekstual, sehingga lebih menarik dan bermakna. Anak memiliki karakteristik rasa ingin tahu yang tinggi, berfikir konkrit, aktif dan energik, berjiwa petualang, dsb. Melalui field trip diharapkan anak dapat mempelajari secara langsung tempat bersejarah, peninggalan-peninggalan, dan mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu. Metode ini sangat sesuai diterapkan untuk menumbuhkan nilai-nilai cinta tanah air pada anak dengan cara yang menyenangkan.

Kata kunci: cinta tanah air, *field trip*

STRATEGI *RULE MODEL* DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ETIKA, MORAL DAN CITA TANAH AIR PADA SISWA

Reflianto

Progra, Pascasarjana Universitas Negeri Malang
refliantomuslim@gmail.com

Abstrak

Paper ini membahas tentang strategi pembelajaran etika, moral dan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa sekolah menengah dalam upaya menanamkan nilai-nilai disiplin, taat, jujur, sederhana, berani, bertanggung jawab, tegas, cerdas, adil, cinta kasih, menghormati, menghargai, toleran, demokratis, kreatif dan cinta tanah air. Strategi pembelajaran *rule model* menjadi salah satu cara penting bagi guru memberikan contoh langsung kepada siswa dalam bersikap, bertutur kata dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Tujuan artikel ini adalah melihat seberapa besar pengaruh strategi *rule model* terhadap pembentukan karakter siswa ditinjau dari fakta empiris dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan di beberapa Negara seperti Inggris, Belanda, Austria dan Jerman. Kemudian mengkaji bagaimana strategi *rule model* dan interaksinya terhadap ketauladanan dalam pengamalan nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan (cinta tanah air), bagaimana guru melaksanakan strategi *rule model* yang efektif dalam pendidikan karakter dan peranan perguruan tinggi dalam meningkatkan profesionalisme dan karakter diri guru dalam pendidikan moral di sekolah. Hasil kajian menyimpulkan bahwa strategi *rule model* sangat efektif membangun perilaku etika, moral dan nasionalisme kebangsaan yang positif, dimana ketauladanan guru memberikan pengaruh paling besar dalam pembentukan karakter diri dan nasionalisme kebangsaan siswa dibandingkan orang tua, teman sejawat dan lingkungan. Kepada guru disarankan menerapkan strategi *rule model* sebagai pilihan yang tepat dalam melaksanakan pendidikan karakter di kelas. Perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan standar profesionalisme dan karakter diri guru masa depan bagi penguatan kualitas pendidikan nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan.

Kata kunci : *strategi rule model, nilai-nilai etika, moral, cinta tanah air*

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan moral mulai intens di abad kedua puluh. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral mulai disejajarkan dengan focus pembangunan kognitif dalam pembelajaran. Menurut Kirschenbaum (1995:57) pendidikan moral dan pendidikan nilai merupakan satu bidang yang sama, dalam pernyataannya Kirschenbaum menyebutkan "*Values Education is used as the shorthand term for the field of values education and moral education. Values Education and Moral Education is described as an educational field or endeavor with two complementary goals – helping students lead personally satisfying and socially constructive lives.*". maknanya adalah Pendidikan nilai digunakan sebagai terma untuk bidang pendidikan nilai dan pendidikan moral yang memiliki dua tujuan saling

melengkapi, yaitu membantu subjek didik menuju pada kehidupan personal yang memuaskan dan kehidupan sosial yang konstruktif

Pendidikan moral dan nilai ini kemudian berkembang menjadi pendidikan karakter yang merekomendasikan guru sebagai role model dalam pendidikan tersebut. Pentingnya pendidikan karakter adalah untuk mengimbangi pembangunan kognitif siswa yang terus berkembang, diikuti dengan pergeseran nilai-nilai yang juga dipengaruhi oleh urban teknologi dan budaya. Kehadiran pendidikan karakter menjadi penting dalam mewujudkan cita-cita nasional yaitu menciptakan manusia yang beriman, jujur, bertanggung jawab, kreatif, demokratis dan berakhlak mulia seperti yang tercantum dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemahiran dan membentuk watak dan tamadun maruah dalam konteks kehidupan intelektual negara yang bertujuan membangunkan potensi pelajar supaya menjadi manusia setia dan mengabdikan dirinya kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, mahir, kreatif, bebas, dan berguna bagi masyarakat dan bangsanya.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional, peranan guru menjadi sangat urgen. Guru bertanggung jawab penuh melahirkan manusia-manusia terdidik, cerdas, beriman, berakhlak mulia dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa. Salah satunya adalah menjadi tauladan bagi anak dalam mengamalkan nilai-nilai *religious*, nilai-nilai adat dan nilai-nilai kebangsaan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kebajikan. Disisi kognitif, Kohlberg (1973) mengingkan guru menjadi mentor yang menerangi struktur penalaran moral kepada anak-anak, sehingga mereka dapat meyakini dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan mereka.

Kemunculan teori Kohlberg di tahun 1973 berpengaruh di awal tahun 1980-an dan mendapatkan banyak kritik di tahun 1990-an, ketika ahli etika kebajikan menyalahkan dikarenakan pemahaman Kohlberg yang hanya terbatas pada aspek moralitas dan mekanisme-mekanisme psikologis yang mendasari perkembangannya. David Carr (1991, 1999) menyebut Kohlberg hanya mengembangkan kapasitas rasional tentang moral pada anak-anak, mereka bisa memutuskan sendiri bagaimana hidup, namun tidak memberikan petunjuk tentang cara hidup yang layak. David Carr (1999) menjelaskan tujuan pendidikan moral adalah menjadikan guru sebagai panutan dalam mengamalkan nilai-nilai kepada anak-anak dalam keseharian mereka. Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan adalah keberanian, kesederhanaan, keadilan, kejujuran dan kasih sayang, hormat-menghormati, saling menghargai, toleran, demokratis, kreatif, bertanggung jawab dan cinta tanah air. Dalam pandangan Kohlberg, dimensi

pembelajaran moral lebih pada *moral teacher*, yang berarti guru menjadi tauladan dalam pengalaman nilai-nilai kebaikan.

Istilah "*moral teacher*" menurut Nel Noddings (2010) adalah bagaimana guru mengambil posisi sebagai *rule model* bagi siswa dalam bersikap, bertutur kata, bergaul dan bermasyarakat. *Rule model* yang dimainkan guru adalah bermain peran melalui ketauladanan sikap dan perilaku pengamalan nilai-nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan yang meliputi sikap kebajikan, keberanian, kesederhanaan, keadilan, kejujuran, kasih sayang, hormat-menghormati, saling menghargai, toleran, demokratis, kreatif, bertanggung jawab dan cinta tanah air.

Proses penanaman nilai-nilai ini dalam *rule model* menjadi sarana penting untuk menanamkan etika pada siswa di sekolah. Selain menanamkan etika, pendekatan pendidikan etika, moral dan nasionalisme kebangsaan yang juga mengandalkan pemodelan peran kepada peserta didik dalam wujud pendidikan karakter nyata. Lickona (1991:308-311) menyatakan pembelajaran karakter jauh lebih efektif menggunakan *rule model*. Lebih lanjut Lickona, (2004:118) menyatakan bahwa pendidikan moral sangatlah penting dirumuskan dalam kurikulum pendidikan karakter. David Carr (1991: 258-259.), Jan Steutel dan Ben Spiecker (2004: 329) Kristja'n Kristja'nsson (2010: 237) dan Bandura, (1963:1986) banyak memberikan kontribusi terhadap makna pendidikan moral. Menurut Bandura pembelajaran moral adalah proses pembelajaran yang dijalani anak-anak dalam bersikap dan perilaku, menghormati dan meyakini kebenaran nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai kebaikan yang tertanam dalam diri, terutama nilai kebangsaan akan memupuk rasa cinta tanah air, hal ini tercermin dari sikap hidup toleran, saling menghargai, menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan bela Negara.

Guru dalam menjalankan tugasnya dihadapkan pada dua sisi antara *professionalism* dan menjaga kepribadian. Kepribadian guru sebagai *rule model* akan lebih menarik karena dua hal: (1) karakter guru yang harus dibangun menjadi *rule model* siswa dalam mengamalkan nilai moral dan etika di sekolah dan (2) ketauladanan guru menjadi *icon* bagi siswa yang akan membimbing mereka selalui dalam bersikap dan berperilaku positif. Kegagalan guru menjadi *rule model* menyebabkan penanaman nilai-nilai moral dan etika tidak berjalan efektif. Hal ini semakin parah bila perilaku guru buruk yang dapat menimbulkan *stereotype* negatif terhadap perilaku siswa (Carr, 1991:258).

Dua peran guru, yaitu peran baik dan peran buruk dimana kedua peran ini akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter siswa di sekolah. Guru yang berperilaku terpuji akan mendapatkan pujian dari seluruh masyarakat, sebaliknya guru yang berperilaku

buruk akan mendapatkan kecemasan dari warga sekolah (Steutel & Carr, 1999:5). Pendekatan Aristotelian dapat digunakan dalam pendidikan karakter kepada anak. Pendekatan ini membenarkan sifat-sifat kebajikan itu sendiri yang menjelaskan seberapa pentingnya karakter kebaikan bagi Individu untuk meningkatkan citra diri mereka.

Dalam artikel ini akan ditinjau apa dan bagaimana teori pendidikan moral yang memungkinkan memberikan fakta empiris terhadap penanaman nilai moral dan etika yang mampu memupuk rasa cinta tanah air dan bela Negara. Kemudian pembahasan mengkaji bagaimana guru memberikan ketauladanan dalam mengamalkan nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikutnya pembahasan difokuskan untuk melihat lebih dekat lagi terkait dengan kebijakan pendidikan karakter yang harus diberikan pada remaja. Pendidikan karakter yang dibangun adalah pembinaan nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan meliputi sikap disiplin, taat, jujur, sederhana, berani, bertanggung jawab, tegas, cerdas, adil, menyayangi, menghormati, menghargai, toleran, demokratis, kreatif dan cinta tanah air. Terakhir pembahasan lebih ditekankan strategi *role model* yang bisa diterapkan guru dalam melaksanakan pembelajaran etika, moral dan nasionalisme kebangsaan di kelas dan peran perguruan tinggi sebagai Pembina untuk meningkatkan standar profesionalisme dan karakter diri guru melalui pelatihan guru yang tidak saja focus pada penguatan kognitif, tetapi juga pembinaan *suri tauladan* akhlak dalam pembelajaran.

FAKTA EMPIRIS

Dalam pembelajaran akhlak oleh guru agama ataupun pembelajaran nilai-nilai kebangsaan oleh guru pendidikan dan kewarganegaraan hal pertama yang harus diperhatikan guru adalah membangun strategi *bermain peran* dalam mengajarkan materi yang terkait dengan pendidikan etika, moral dan nilai-nilai kebangsaan. Kemampuan guru menjadi *role model* dalam mengamalkan nilai-nilai etika dan moral menjadikan guru *suri tauladan* di mata siswa mereka. Pengamalan nilai-nilai moral dan etika yang terentuk dalam kehidupan sehari-hari mampu menciptakan suasana lingkungan sekolah yang beradab, berakhlak mulia dan bermatabat. Melalui cara ini guru secara tidak langsung telah membangun kesadaran pentingnya nilai-nilai moral, etika dan kebangsaan dalam diri siswa yang pada akhirnya mampu melahirkan generasi-generasi yang cerdas, amanah, jujur, berani, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, cinta tanah air dan memiliki semangat bela Negara yang tinggi (Meijers, 2008).

Hansen (2001: 852) melihat terdapat hubungan yang erat antara kemampuan guru dalam aspek pedagogis menanamkan nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan kepada siswa

tidak terlepas dari kemampuan guru meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan benegara. Literatur terkait ini adalah Willemse et al., (2005, 2008) yang menyatakan pentingnya peran guru dalam membangun dan mempersiapkan generas-generasi berakhlak mulia dan cinta tanah air.

Dalam penelitiannya Willemse et al. (2008) menyimpulkan bahwa pendidikan moral sangat tergantung pada kepribadian guru yang menjadi *rule model* bagi siswa. Posisi guru sebagai pengajar tidak saja memberikan informasi kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan dalam perilaku dan sikap peserta didik. Penelitian selanjutnya, Klaassen (2002:155) membuat observasi yang sama: yaitu dalam pembelajaran etika, moral dan penanaman nilai-nilai kebangsaan dan bela Negara, guru tidak terlalu banyak berbicara, tetapi lebih banyak pada pengamalan langsung norma-norma dan nilai-nilai etika, moral dan wujud kecintaan bela Negara yang diterapkan dalam pergaulan di lingkungan sekolah sehari-hari. Guru menempatkan diri bermain peran secara eksplisit bersama warga sekolah, memberikan suri tauladan melalui perbuatan nyata dari pengalaman nilai-nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan dalam wujud selalu berperilaku, jujur, berani, sederhana, adil, toleran, menghargai dan menghormati sesama, bertutur kata yang baik, lemah lembut dan sopan santun dalam bersikap, demokratis, kreatif, sehat, berilmu, dan berguna bagi masyarakat dan bangsanya dengan selalu membantu setiap warga sekolah yang mengalami kesulitan dan musibah. Suri tauladan melahirkan manusia-manusia yang santun, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan selalu bersyukur dengan kemerdekaan yang telah diraih dalam bentuk bela Negara. Sifat-sifat ini pada akhirnya melahirkan tidak saja masyarakat intelektual secara kognitif, tetapi juga masyarakat intelektual secara etika, moral dan kebangsaan yang terbentuk menjadi watak dan tamadun maruah dalam konteks kehidupan intelektual negara yang bertujuan membangunkan potensi pelajar yang berorientasi pada pengabdian diri kepada masyarakat, bangsa, Negara dan kepada tuhan yang maha esa.

Empat penelitian terkait dengan pembelajaran etika, moral dan bela Negara. Pertama, penelitian yang dilakukan Bucher (1998) kepada 1150 siswa Austrian dan Jerman yang berusia 10 sampai 18 tahun. Data dikumpulkan menggunakan questioner, termasuk pertanyaan terbuka tentang pendapat siswa mengenai perlunya suri tauladan bagi mereka dalam mengamalkan nilai etika, moral dan kebangsaan melalui guru sebagai *rule model*, jika perlu kenapa?. Inilah salah satu pertanyaan yang dikemukakan dalam wawancara penelitian tersebut. Bucher mendapatkan (45%) siswa menyatakan sangat perlu *rule model* bagi mereka dalam mengamalkan nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan di sekolah, (31%) menyatakan perlunya nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan dalam keluarga dan siswanya menjawab (24%)

menyatakan biasa saja. Hasil ini diperkuat ketika siswa harus menilai 40 orang guru dari skala 1 “tidak perlu rule model dalam pembelajaran etika, moral dan kebangsaan sampai skala 4, “sangat perlu rule model bagi saya saat belajar etika, moral dan nilai-nilai kebangsaan. Hasil survey menunjukkan peranan guru sebagai suri tauladan bagi siswa sangat diperlukan. ketika siswa diminta menilai peranan orang tua mereka sebagai suri tauladan sebagian besar siswa menjawab sangat perlu orang tua menjadi panutan bagi mereka dalam mengamalkan etika, moral dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan di keluarga dan masyarakat. Hanya 10% saja siswa yang menyatakan tidak perlu.

Penelitian kedua adalah survey yang dilakukan oleh Yancy et al (2002, 2011). Dalam dua studinya, Yancy mengungkap pembelajaran etika, moral dan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa berusia 12 sampai 17 tahun sangat efektif pengaruhnya dari kemampuan guru sebagai rule model mereka yang mereka kagumi dan menjadi suri tauladan dalam berperilaku, bersikap dan bergaul di masyarakat. Dalam pertanyaan yang diajukan seberapa besar keinginan mereka untuk bersikap seperti guru mereka yang menjadi rule model yang mereka kagumi, diperoleh bahwa hampir seluruh siswa menyatakan sangat menyukai guru mereka dan mengatakan ingin menjadi orang baik seperti perilaku guru mereka yang mereka lihat dalam kesehariannya. Begitu juga dengan survey pada pertanyaan mengenai peran orang tua dan kerabat terkait dengan contoh tauladan etika, moral dan nilai kebangsaan yang dapat ditiru dari mereka, rata-rata siswa menyatakan bahwa orang tua adalah panutan utama mereka tentang keyakinan dan kebenaran nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan yang dapat menjadi contoh bagi mereka untuk mengamalkan kebajikan dalam kehidupan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Secara keseluruhan, sebanyak 4.759 remaja yang terlibat dalam survei ini menyatakan orang tua dan guru adalah rule model yang menjadikan mereka beretika, bermoral dan menghargai kemerdekaan dalam wujud saling membantu, menghargai, menghormati, toleran dan bela negara.

Penelitian ketiga adalah survei yang dilakukan Bricheno dan Thornton (2007) kepada 379 orang siswa di Inggris dengan usia antara 10 hingga 16 tahun. Penelitian ini berbeda dari dua penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini bertujuan menyelidiki seberapa besar anak-anak melihat guru mereka hadir sebagai rule model dalam perilaku mereka. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner mulai dari penilaian '*kurang berpengaruh*' hingga '*sangat berpengaruh*'. Secara keseluruhan, sepertiga dari siswa memilih salah satu atau kedua orang tua mereka sebagai rule model yang mempengaruhi perilaku mereka dan lebih dari separoh menyebutkan rule model guru yang mempengaruhi perilaku mereka.

Ketiga penelitian mengungkap pengaruh guru dan orang tua sebagai rule model dalam pembelajaran etika, moral dan nilai-nilai kebangsaan yang melahirkan sifat jujur, berani, sederhana, adil, toleran, menghargai dan menghormati sesama, bertutur kata yang baik, lemah lembut, sopan santun dalam bersikap, demokratis, kreatif, sehat, berilmu, cinta tanah, bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penelitian keempat oleh Timmerman, meneliti tentang seberapa besar rule model guru, orang tua dan karib kerabat mempengaruhi sikap siswa. Hasil survey diketahui bahwa dari 28 siswa terdapat 44% dari mereka menyatakan rule model guru sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Sedangkan sepertiga oleh orang tua dan sisanya oleh kerabat dan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua perilaku anak dipengaruhi oleh orang tua, saudara, teman sebaya atau orang lain tetapi, hampir separuh pembentukan watak dan perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh ketauladanan guru sebagai rule model mereka. Selanjutnya Timmerman (2009), meneliti dari 13 guru (berusia antara 32 hingga 60 tahun), yang mengajar pada sekolah menengah memberikan kesaksian bahwa menjadi rule model dalam pembelajaran etika, moral dan nilai-nilai kebangsaan sangat berkesan dalam kehidupan mereka saat mengajar hanya satu orang guru saja yang menyatakan tidak berkesan. (Timmerman, 2009: 230).

Laporan penelitian ini mengungkap sangat pentingnya peran guru sebagai rule model dalam menanamkan ketauladanan etika, moral dan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa mereka dalam membangun karakter siswa yang baik, selain perlunya kerja sama guru dengan orang tua dan masyarakat dalam memberikan pembelajaran moral secara eksplisit melalui ketauladanan, bukan sekedar pembelajaran teori dan nasehat semata. Peran guru sebagai pendidik jelas menjadi panutan utama bagi siswa dalam berperilaku, ditampah dengan penguasaan dan ketauladanan orang tua dalam keluarga yang memberikan sinyal positif bagi terbentuknya akhlak mulia dalam perilaku siswa.

KETAULADANAN GURU

Ketauladanan adalah peran guru memberikan contoh eksplisit pengalaman nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang dapat menjadi panutan bagi siswa dalam pergaulan mereka dengan kepala sekolah, guru, tutor, dan teman sebaya mereka. Peran guru dalam bermain peran adalah bertindak sebagai pelaku utama yang menjadi panutan bagi siswa dalam mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah, dalam bersikap, beretika dan disiplin. Membiasakan berbicara lemah lembut, sopan santun, jujur, berani, menghargai dan bertanggung jawab, bela Negara adalah nilai-nilai yang ingin dibangun dalam kurikulum pendidikan karakter. Pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan

moral yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Namun, potensi sumber lain yang mempengaruhi karakter siswa selain dari guru mereka adalah orang tua dan lingkungan masyarakat. Bogdan dan Biklen (2003), mencoba untuk menjelaskan peranan guru dalam menanamkan nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan kepada siswa dilihat dari perspektif psikologis pendidikan. Ia menyebutkan bahwa Intuisi dan kekonsistenan guru dalam bersikap dan berperilaku menjadi rule model yang secara psikologis sangat mempengaruhi pembentukan karakter siswa.

Dari kajian psikologis pendidikan, konsep 'perkembangan moral' dan 'kematangan moral' adalah hal utama yang perlu dipahami dalam pendidikan karakter sebagaimana yang dijelaskan Kohlberg pada abad kedua puluh (Kohlbergian model). Sejalan dengan bukti empiris penelitian, ia membangun sebuah teori normatif tentang tujuan perkembangan moral, yang dipahami sebagai perilaku otonom yang bisa membentuk watak dan karakter seseorang dikarenakan adanya pengaruh lingkungan masyarakat sekitar. Pada awal tahun 1990-an, filsuf mendalami besarnya pengaruh lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai moral kepada peserta didik yang disebut dengan istilah '*moral excellent*'.

Penelitian Colby dan Damon (1992) terkait dengan '*moral excellent*' adalah melakukan survey dengan membagikan 23 nilai-nilai moral yang diuji dalam *eksemplar moral* untuk melihat sejauh man *moral excellent* terbentuk dalam pendidikan karakter. Hasil survey menunjukkan bahwa ketauladanan seseorang tidak bisa dilepaskan dari tingkat pemahaman siswa tentang moral, kemampuan mereka menilai dan meyakini kebenaran nilai yang terkandung dalam moral sebagai norma penting bagi pembentukan moral dalam karakter diri mereka (Power, 2007: 92). Penelitian Hart & Fegley, (1995); Walker et al, (1995); Matsuba & Walker, (2004, 2005) menegaskan bahwa karakter memainkan peran penting dalam pembentukan *moral excellent*. Matsuba dan Walker (2004) menemukan bahwa pembentukan *moral excellent* menggambarkan diri mereka dalam bersikap, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat mereka. Menurut pakar pendidikan karakter adalah membentuk 'kepribadian', yang menurut psikologis modern adalah seperangkat internal yang menjadikan seseorang bijak dengan *emosi disposisional* (Kristja'nsson, 2002: 9).

Pembentukan kepribadian yang berwatak mulia, adalah hasil dari proses penanaman nilai-nilai etika, moral dan penguatan emosi disposisional dalam lingkungan pergaulan. Disini peran panutan (suri tauladan) sebagai rule model sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang dalam bersikap, bertutur kata dan berperilaku. Missal, guru yang menghargai pertanyaan muridnya, mampu menjadi contoh bagi siswa untuk menghargai setiap pendapat di kelas. Meskipun ada sejumlah penelitian yang menyelidiki faktor lain yang

mempengaruhi pembentukan kepribadian yaitu Walker, (1999); Walker & Hennig, (2004), mereka lebih melihat pembentukan kepribadian lebih dipengaruhi oleh atribut dalam diri siswa itu sendiri, dalam hal ini perkembangan emosional. Penelitian Bricheno dan Thornton (2007: 388) menunjukkan bahwa mayoritas siswa mengagumi orang-orang yang jujur, suka menolong, , bekerja keras, berani, sopan, ramah, bertutur kata lemah lembut, saling mengasihi dan menghargai sesama , toleran, memiliki rasa humor, menghormati orang lain dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Setiap atribut emosi yang terbentuk dalam diri seseorang karena kekaguman mereka pada idola mereka, menjadi faktor implicit yang membangun emosional positif dalam diri mereka. Hasil penelitian Timmerman (2014) menekankan bahwa siswa menghargai guru terbentuk dari ketauladanan guru dalam menghargai siswa. Sebagai guru menempatkan peran mereka sebagai pelaku utama dalam melaksanakan nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan yang diajarkan kepada anak didik mereka.

Dalam pembelajaran karakter terkait dengan penanaman etika, moral dalam pembelajaran, dari survey Van Oudenhoven et al. (2008) kepada 83 orang guru di Belanda dari beberapa sekolah umum dan agama (protestant, Katolik, dan Islam). 195 orang guru dikategorikan oleh peneliti kedalam 15 kategori. 'Menghormati' adalah cluster kebajikan yang paling sering ditanamkan dalam pendidikan karakter, diikuti kemudia dengan 'keadilan', 'kebijaksanaan' dan 'sukacita'. Ketika guru diminta untuk menilai kebajikan dari skala 1 (tidak penting) sampai 5 (paling penting), maka penanam moral yang paling penting dalam diri siswa adalah perilaku '*menghormati*' (skala 4,5), saling mengahihi pada skala (4,2) dan pada peringkat ketiga adalah 'keadilan' dan 'kehandalan' (pada skala 4). Guru dengan latar belakang Muslim lebih mengutamakan nilai 'saling mengasihi sebagai karakter utama yang perlu dibangun dalam pendidikan moral, kemudian baru “menghargai” dan jujur. Katolik dan protestan juga menempatkan cinta kasih, saling menghormati, menghargai, jujur sebagai pondasi utama dalam pembentukan moral peserta didik. Sementara itu sekolah umum lebih menempatkan keadilan sebagai pondasi utamanya. Semua nilai-nilai moral ini menjadi hal prioritas bagi guru dalam memberikan ketauladanan kepada muridnya sebag ketauladanan adalah pemodelan peran menjadi metode paling penting dalam membentuk akhlak siswa agar mengamalkan nilai-nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan. Dari temuan ini terlihat bahwa pendidikan karakter sangat hidup di sekolah-sekolah Belanda, karena guru dapat mengartikulasikan kebajikan apa yang mereka anggap penting dan menjadi prioritas yang perlu ditanamkan terlebih dahulu dalam membangun pondasi karakter siswa. Fakta menunjukkan bahwa perilaku '*menghormati*', saling menghargai, jujur dan cinta kasih adalah nilai moral penting yang mesti dibangun lebih awal dalam pendidikan karakter.

STRATEGI RULE MODEL PADA PENDIDIKAN KARAKTER

Dalam pendidikan karakter, penanaman nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan di berbagai Negara menerapkan strategi *rule model*, atau yang disebut juga dengan ketauladanan. Strategi rule model ini sangatlah penting yang nantinya akan memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan karakter diri siswa. Ketika guru ingin siswa mereka meniru perilaku sikap dan tutur kata yang sopan, maka guru harus menjelaskan kepada siswa bagaimana cara berperilaku, beriskap dan bertutur kata yang sopan tersebut dalam pergaulan sehari-hari, tidak saja menjelaskan, tetapi guru juga mencontohkan dalam pergaulan guru sehari-hari yang dapat menjadi panutan siswa dan mengunggah reaksi emosional mereka yang pada akhirnya membentuk kepribadian yang ideal dari berbudi luhur. Namun, di lapangan guru sebagai pendidik seringkali luput dengan pengetahuan dan keterampilan ini, dimana guru hanya mampu memberi nasehat dan pengetahuan, tapi tidak mampu memberikan tauladan secara eksplisit tentang nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan yang diajarkannya di kelas. Padahal guru adalah actor utama yang diperlukan untuk membuat pengajaran etika dan moral kepada siswa mereka benar-benar terbukti secara eksplisit dalam pergaulan di sekolah (Lunenberget al., 2007:597).

Dalam hal ini guru perlu menyadari bahwa mereka sebagai pengajar bukan sekedar penasehat, tetap lebih berperan sebagai pemberi contoh (tauladan) kepada muridnya. Artinya sebelum guru memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan, terlebih dahulu guru telah mengamalkan semua nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan yang diajarkannya tersebut dalam kehidupannya sehari-hari di sekolah. Dengan cara ini akan menempatkan guru sebagai panutan dan idola oleh anak didid mereka. Jika guru ingin berhasil dalam pendidikan karakter, maka strategi memainkan peran adalah strategi penting dalam menanamkan nilai-nilai etika, moral dan nasional kebangsaan kepada siswa dalam pembelajaran karakter. Untuk itu guru harus menjadi 'reflektif dalam pekerjaan mereka sendiri, bekerja pada tingkat meta-kognitif dalam mengajar diri mereka sendiri terlebih dahulu sebagai tauladan dan panutan bagi anak didid mereka, artinya guru bukan sekedar ahli beretorika, tetapi betul-betul terbukti secara eksplisit apa yang dikatakannya sesuai dengan perilaku keseharian mereka di sekolah (Smith, 2001: 11).

Literatur pedagogis menawarkan sejumlah rekomendasi yang dapat membantu guru untuk berpikir lebih positif lagi baik secara individu maupun tim dalam membina akhlak anak didid mereka. Sifat kebajikan utama yang ditanamkan dalam pendidikan etika, moral dan kebangsaan adalah cinta kasih kepada sesama, saling menghargai, menghormati, toleran,

kejujuran, kesederhanaan, keadilan,, dan keberanian membela yang benar, termasuk bela Negara.

Strategi pembelajaran bermain peran (rule model) ini bisa dilakukan **Pertama** dengan cara memberikan apa yang disebut '*meta-commet* ', *verbalising of feeling* dan menjelaskan kepada siswa apa yang menjadi pilihan mereka dan mengapa itu menjadi pilihan mereka dalam menempatkan diri mereka ketika berperilaku, bersikap dan bertutur kata dalam pergaulan (Wood & Geddis, 1999). **Kedua**, guru dapat belajar dari pengalaman mereka di kelas dengan memberikan penilaian otentik menggunakan jurnal 'guru, di mana guru dapat menjelaskan pilihan pedagogis mereka yang tepat untuk mengukur kemajuan siswa perilaku dan sikap siswa dalam pergaulan sehari-hari mereka di sekolah. Dalam jurnal ini, mereka bisa menggambarkan (1) level perkembangan kondisi dan situasi moral anak didi mereka, (2) menilai pikiran, perasaan dan tindakan siswa serta melihat perkembangan reaksi emosi siswa dalam diskusi dengan kolega mereka, (3) menilai citra diri mereka, apa yang mereka anggap sebagai kebajikan dan keburukan, terakhir (4) menilai reaksi siswa terhadap prioritas kebajikan yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam memantapkan emosional inteligensi siswa dalam berperilaku.

Ketiga, guru dapat mengajar bersama-sama dalam menanamkan nilai-nilai etika, moral dan nasionalis kebangsaan di kelas. Dengan cara ini, mereka dapat mengamati langsung proses kemajuan pembelajar dalam mengamalkan nilai-nilai etika, moral dan kebangsaan yang telah diajarkan kepada mereka dan mendiskusikan tentang refleksi pembangunan karakter lebih lanjut. Terkait dengan pembangunan karakter kepemimpinan dalam bela Negara perlu kiranya dikembangkanlah *Leadership Virtues Questionnaire* (LVQ). LVG salah satunya telah dikembangkan oleh Riggio et al. (2010). Kuesioner ini digunakan untuk menilai kemajuan pengalaman nilai-nilai kepemimpinan dan kebangsaan yang terbentuk dalam diri siswa.

Keempat, dalam menanamkan nilai-nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan guru bisa memanfaatkan berbagai literatur tentang pendidikan moral baik dalam pendidikan agama maupun pendidikan kewarganegaraan. Kedua bidang studi ini memberikan teori-teori yang dapat menawarkan bahasa moral yang memungkinkan mereka untuk mengenali dan berbicara tentang aspek moral di lingkungan mereka (Swennen et al, 2008; Willemse et al, 2008) . Cara ini sangat direkomendasikan untuk menargetkan agar semua guru masa depan dalam menempatkan diri mereka sebagai rule model, suri tauladan bagi muridnya dalam mengamalkan perilaku-perilaku bijak yang sesuai dengan etika, norma dan moral yang berlaku dalam tatanan kehidupan suatu bangsa, terutama kepada guru agama dan guru kewarganegaraan. Disarankan kepada pemerintah agar dalam berbagai program pelatihan guru,

materi dan rule model penanaman nilai-nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan dimasukkan dalam setiap materi pelatihan dalam pembelajaran tematik yang menempatkan kompetensi dasar afektif pada penanaman nilai-nilai kebajikan, keberanian, kesederhanaan, keadilan, kejujuran, kasih sayang, hormat-menghormati, saling menghargai, toleran, demokratis, kreatif, bertanggung jawab dan cinta tanah air. Pemerintah haruslah mempersiapkan guru profesional dan berkarakter yang mampu menempatkan dua peran mereka sebagai profesional pendidik dan suri tauladan dalam membimbing penanaman nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan. Penelitian Willemse et al., (2005) tentang peranan perguruan tinggi dalam melahirkan guru-guru profesional dan berkarakter yang memiliki rule model perilaku yang baik dan dapat menjadi suri tauladan bagi siswa mereka. Hal ini bisa dilaksanakan dalam berbagai pelatihan guru yang dilakukan perguruan tinggi.

Koster et al. (2005) juga merekomendasikan agar perguruan tinggi memperpanjang profil kompetensi pendidik bagi guru dengan mencantumkan penilaian sikap guru, motif dan karakteristik pribadi guru, sehingga mereka dibuat sadar akan pentingnya rule model sikap dan perilaku guru bagi pembangunan nilai etika, moral dan karakter bangsa. Keterampilan dan teknik untuk menjadi guru teladan yang memberikan ketauladanan pengamalan nilai-nilai etika, moral dan nasionalis kebangsaan kepada siswa akan mendukung keberhasilan setiap proses pedagogis yang dilaksanakan guru di sekolah. Oleh karena itu, Koster et al. (2005) merekomendasikan perguruan tinggi menambah persyaratan kompetensi guru dengan menyertakan penilaian sikap guru, motif dan karakteristik pribadi, sehingga mereka dibuat sadar akan pentingnya rule model etika, moral dan nasionalisme kebangsaan dalam setiap proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Peranan guru dan orang tua sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai etika, moral dan nasionalisme kebangsaan kepada anak. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya peranan rule model guru lebih besar pengaruhnya dibandingkan orang tua, teman sejawat dan lingkungan dalam pembentukan karakter siswa di sekolah terutama menanamkan nilai-nilai etika, moral dan nasionalisme dalam pergaulan di sekolah meliputi sikap jujur, berani, sederhana, adil, cinta kasih, hormat-menghormati, saling menghargai, toleran, demokratis, kreatif, bertanggung jawab dan cinta tanah air. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas dan ketauladanan guru sangatlah menentukan terhadap keberhasilan guru dalam menanamkan membentuk karakter anak di sekolah. Strategi rule model menjadi pilihan tepat yang bisa diterapkan guru dalam melaksanakan pembelajaran karakter di kelas. Penguatan

strategi rule model ini dapat ditingkatkan melalui peran serta perguruan tinggi sebagai pembina dan pelatih guru untuk meningkatkan standar profesionalisme dan karakter diri guru dalam setiap penilaian sertifikasi guru, dimana penilaian terhadap pelatihan guru tidak hanya focus pada penguatan kognitif saja, tetapi juga penguatan penilaian afektif dalam pembinaan suri tauladan akhlak kepada siswa oleh guru dalam setiap pembelajaran etika, moral dan nasionalisme kebangsaan, terutama bagi guru agama dan guru kewarganegaraan.

REFERENSI

- Arland Thornton and Pearce, Lisa D., 2007. "Religious identity and family ideologies in the transition to adulthood." *Journal of Marriage and Family*, 69(5): 1227-1243.
- Bandura, A. (1963). *Social learning and personality development*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: a social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bricheno, P., & Thornton, M. (2007). Role model, hero or champion? Children's views concerning role models. *Educational Research*, 49(4), 383–396.
- Bucher, A. (1998). The influence of models in forming moral identity. *International Journal of Educational Research*, 27(7), 619–627.
- Carr, D. (1991). *Educating the virtues: an essay on the philosophical psychology of moral development and education*. New York, London: Routledge.
- Carr, D. (1999). Cross questions and crooked answers: the modern problem of moral education. In J.M. Halstead & T.H. McLaughlin (Eds.), *Education in morality* (pp. 24–43). London: Routledge.
- Colby, A., & Damon, W. (1992). *Some do care: contemporary lives of moral commitment*. New York: The Free Press.
- Fallona, Catherine, (2000) Manner in teaching: a study in observing and interpreting teachers' moral virtues, *Teaching and Teacher Education* 16 (2000) 681}695
- Hansen, D. (2001). Teaching as a moral activity. In V. Richardson (Ed.), *Handbook of research on teaching* (4th edn, pp. 826–857). Washington: AERA.
- Hart, D., & Fegley, S. (1995). Prosocial behaviour and caring in adolescence. relations to self-understanding and social judgment. *Child Development*, 66, 1346–1359.
- Klaassen, C. (2002). Teacher pedagogical competence and sensibility. *Teaching and Teacher Education*, 18, 151–158.
- Kohlberg, L. (1973). The Claim to Moral Adequacy of a highest Stage of Moral Judgement. *The Journal of Philosophy*. (27)18.
- Koster, B., Brekelmans, M., Korthagen, F., & Wubbels, T. (2005). Quality requirements for teacher educators. *Teaching and Teaching Education*, 21(2), 157–176.
- Kirschenbaum, H. (1995). *100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings*. Massachusetts : Allyn&Bacon.
- Kristjánsson, K. (2002). *Justifying emotions: pride and jealousy*. Abingdon: Routledge.
- Kristjánsson, K. (2010). *The self and its emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: how our schools can teach respect and responsibility*.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: how our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam.
- Lickona, T. (2004). *Character matters*. New York: Touchstone.
- Lunenberg, M., Korthagen, F., & Swennen, A. (2007). The teacher educator as a role model. *Teaching and Teaching Education*, 23, 568–601.
- Matsuba, M.K., & Walker, L.J. (2004). Extraordinary moral commitment: young adults involved in social organisations. *Journal of Personality*, 72, 413–436.
- Matsuba, M.K., & Walker, L.J. (2005). Young adults moral exemplars: the making of self through stories. *Journal of Research on Adolescence*, 15, 275–297.
- Noddings, N. (2010). Moral education and caring. *Theory and Research in Education*, 8(2), 145– 151.

- Power, C. (2007). Anne Colby, In: C. Power, R.J. Nuzzi, D. Narvaez, D.K. Lapsley & T.C. Hunt (Eds.), *Moral education: a handbook* (vol. 1) (pp. 91–92). Westport, CT: Praeger.
- Riggio, R.E., Zhu, W., Reina, C., & Maroosis, J.A. (2010). Virtue-based measurement of ethical leadership: the Leadership Virtues Questionnaire. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 62(4), 235–250.
- Smith, K. (2001). Professional knowledge of teacher educators, paper presented at the *AERA Annual Meeting*, Seattle, WA, 10–14 April.
- Steutel, J., & Spiecker, B. (2004). Cultivating sentimental dispositions through Aristotelian habituation. *Journal of Philosophy of Education*, 38(4), 531–549.
- Swennen, A., Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2008). Preach what you teach! Teacher educators and congruent teaching. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 14(5–6), 531–542.
- Timmerman, G. (2009). Teacher educators modelling their teachers? *European Journal of Teacher Education*, 32(3), 225–238.
- Walker, L.J., & Hennig, K.H. (2004). Differing conceptions of moral exemplarity: just, brave and caring. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86(4), 629–647.
- Walker, L.J., Pitts, R.C., Hennig, K.H., & Matsuba, M.K. (1995). Reasoning about morality and real-life moral problems. In M. Killen & D. Hart (Eds.), *Morality in everyday life: developmental perspectives* (pp. 371–407). Cambridge: Cambridge University Press.
- Willemse, M., Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2005). Values in education: a challenge for teacher educators. *Teaching and Teacher Education*, 21(2), 205–217.
- Willemse, M., Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2008). The moral aspects of teacher educators' practices. *Journal of Moral Education*, 37(4), 445–466.
- Wood, E., & Geddis, A. (1999). Self-conscious narrative and teacher education: representing practice in professional course work. *Teaching and Teacher Education*, 15, 107–119.
- Yancy, A.K., Siegel, J.M., & McDaniel, K.L. (2002). Role models, ethnic identity and health-risk behaviours in urban adolescents. *Archives of Pediatrics Adolescent Medicine*, 156, 55–61.
- Yancy, A.K., Grant, D., Kurosky, S., Kravitz-Wirtz, N., & Mistry, R. (2011). Role modelling, risk and resilience in California adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 48(1), 36–43.

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma; Sri Handayana; Deri Ciciria

IAIN Metro, Lampung; IAIN Metro; STKIP PGRI Bandar Lampung.

tb.alirachman99@gmail.com; handayana.sri@gmail.com; dericiciria.mhum@gmail.com

Abstrak: Kewarganegaraan merupakan bagian dari mata kuliah wajib umum (MKWU) sesuai amanat UU nomor 12 tahun 2012 dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015. Menghadapi ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) negara Indonesia yang semakin kompleks, pemerintah telah merevitalisasi bahan ajar Kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui edaran Dirjen Belmawa Kemenristekdikti nomor 435/B/SE/2016 sebagai bagian dari agenda revolusi mental dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) sebagai bagian dari kekhasan pemerintahan Indonesia harus menunjukkan integrasi materi antara nilai-nilai ke-Indonesia-an dengan ke-Islam-an, namun tetap memiliki satu kesatuan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dengan perguruan tinggi umum. Metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan melibatkan 5 ahli/pakar dan mahasiswa sebagai subjek uji coba produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi kewarganegaraan dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai ke-Islam-an sehingga dapat menunjang perkuliahannya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Adapun materi-materi yang dapat terintegrasikan antara lain Negara dan Sistem Pemerintahan, Demokrasi, Konstitusi dan *Rule of Law*, serta Hak Asasi Manusia. Bahan ajar sebagai produk dalam penelitian ini layak digunakan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan beberapa perbaikan dengan prosentase kelayakan 87 %.

Kata kunci: *Bahan Ajar, Kewarganegaraan, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*

A. PENDAHULUAN

Menghadapi tantangan kebangsaan sebagaimana termaktub dalam Ketetapan MPR nomor VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, pemerintahan Jokowi-Jk telah mencanangkan dan melaksanakan program “Nawacita” yang salah satu agendanya adalah revolusi karakter bangsa atau sering dikenal dengan “revolusi mental”. Arah program tersebut salah satunya adalah kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Agenda revolusi mental dalam Nawacita dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 35 ayat (3) Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dimana setiap kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya peraturan menteri riset, teknologi dan

pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Implementasinya adalah surat edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 435/B/SE/2016 tentang himbauan penggunaan bahan ajar mata kuliah wajib sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Revitalisasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus memiliki satu kesatuan capaian pembelajaran mata kuliah, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah merumuskan sebagai berikut:

- a. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air
- b. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban
- c. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan toleransi dalam keberagaman (Kemendikbud, 2012: vi)

Ketercapaian pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan akan membentuk karakter nasionalisme dan patriotisme yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara, meregenerasi demokrasi ke-Indonesia-an, dan menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Keberadaan perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah naungan kementerian agama Republik Indonesia merupakan keunikan tersendiri dalam pemerintahan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (4) undang undang no 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya khususnya di bidang pembelajaran maka terdapat beberapa hal/ aturan yang menginduk/ berkoordinasi dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tidak terkecuali aturan tentang mata kuliah wajib umum seperti Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum di pendidikan tinggi khususnya keagamaan Islam, dibawah naungan kementerian agama, maka substansi materi pembelajarannya pun perlu disinergikan dengan kajian ke-Islam-an. Hal tersebut merupakan kekhasan yang membedakannya dengan perguruan tinggi umum. Kajian ke-Islam-an yang dimaksud adalah nilai-nilai ke-Islam-an dan perkembangan sosio-nasionalisme di Indonesia. Merespon kebutuhan akan bahan/ materi ajar pendidikan kewarganegaraan dalam rangka meningkatkan pendidikan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai ke-Islam-an maka kehadiran bahan ajar pendidikan kewarganegaraan yang

di dalamnya terintegrasi dengan nilai-nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an merupakan terobosan baru untuk menanggulangi tantangan kebangsaan masyarakat Indonesia.

B. Materi Perkuliahan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKn merupakan salah satu kajian keilmuan yang penting dan wajib di belajarkan disetiap jenjang pendidikan, baik di sekolah dasar maupun hingga perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan PKn memuat materi wawasan kebangsaan dan penguatan karakter bangsa dalam rangka membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizens*) sebagai bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari dimensi kurikuler di kurikulum setiap jenjang pendidikan memiliki muatan tiga dimensi pokok pembelajaran yaitu sebagai pembelajaran kurikuler yang *include* dalam kurikulum seperti layaknya mata pelajaran/ kuliah lain, sebagai pembelajaran sosial politik yang membelajarkan hubungan warga negara dengan negara ataupun dengan sesama warga negara dan sebagai program akademik yang memiliki nilai dan prosedur edukatif dalam membelajarkannya

Memperhatikan perkembangan pemikiran tentang *civic* dan *civic education*, atas dasar kajian secara teoritik, Winataputra (2001: 131) merumuskan pengertian "*civics*," *citizenship/civic education*" sebagai berikut:

- a. *Civics is the study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing with how democratic government has been and should be carried out, and how the citizen should carry out his duties and rights purposefully with full responsibility.*
- b. *Civic/Citizenship education can be defined in two ways:*
 1. *In the first sense, Civic Education is an area of learning, primarily intended to develop knowledge attitudes, and skills so the students become "good citizens, with learning experiences carefully selected and organized around the basic concepts of political science,*
 2. *In another sense, Civic Education is a by-product of variety of areas of learning undertaken in and out-of formal school settings as well as a by-product of a complex network of human interactions in daily activities concerned with the development of civic responsibility.*

Pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang berisikan tentang pemerintahan demokrasi, dimana tujuan utamanya untuk mendidik warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika kewarganegaraan masuk dalam ranah pendidikan, maka hal tersebut bertujuan mengembangkan sikap, keterampilan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), dimana mereka bisa mendapatkannya melalui pengalaman belajar konsep-konsep dasar ilmu politik. Juga dalam pendidikan

kewarganegaraan, peserta didik dapat berinteraksi melalui kehidupan sehari-hari untuk berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mencakup berbagai kajian seperti *citizenship*, *civics*, ilmu pengetahuan sosial, *life skills*, pendidikan moral, sejarah, geografi, ekonomi, hukum, politik, lingkungan hidup, dan pendidikan nilai (Kerr, 1992). Di perguruan tinggi terdapat berbagai landasan kuat tentang penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah

- a. Agama,
- b. Pancasila,
- c. Kewarganegaraan,
- d. Bahasa Indonesia.

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) juga ditegaskan melalui Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa salah satu bentuk wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah keikutsertaan warga negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menyiratkan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa terutama generasi muda dengan disesuaikan dengan latar belakang suku, agama, dan atau bahkan ras.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa capaian pembelajaran umum bagi semua jenjang pendidikan antara lain adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, menghargai keanekaragaman budaya, menjunjung tinggi penegakkan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Indikator-indikator tersebut sesungguhnya adalah tujuan substantif dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini sejalan pula dengan Sembilan Agenda Prioritas atau “Nawacita” sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, khususnya pada butir ke delapan, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa (Kemenristekdikti, 2017).

Menyikapi pengembangan materi PKn yang diserahkan pada masing-masing perguruan tinggi yang dapat menyebabkan kebingungan para pelaksana kebijakan (dosen) yang akan mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan, yang dapat menyebabkan konten perkuliahan tidak standar, berbeda antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya sehingga spirit dan tujuan sesungguhnya dari mata kuliah PKn tidak tercapai. Maka Direktorat

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL) mata kuliah kewarganegaraan sebagai berikut:

- a. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air
- b. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban
- c. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan toleransi dalam keberagaman

Dalam rangka mencapai CPL tersebut, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti (2016) juga meramu materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain:

- a. Identitas Nasional
- b. Integrasi Nasional
- c. Konstitusi
- d. Hak dan Kewajiban Warga Negara
- e. Demokrasi
- f. *Rule Of Law*
- g. Wawasan Nusantara
- h. Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Kesemua materi tersebut ditutup dengan sebuah tugas akhir berupa *project citizen* yang mencerminkan keutuhan pemahaman peserta didik terhadap keseluruhan materi yang telah dibelajarkan. Berkaitan dengan bahan/ materi ajar kewarganegaraan di perguruan tinggi, Winarno memaparkan bahwa bahan ajar (materi pembelajaran) PKn perguruan tinggi sampai saat ini masih merujuk pada Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006. Keluarnya amanat Undang-Undang tentang perlunya empat pilar kebangsaan sebagai materi pokok kajian di PKn perguruan tinggi tidak merubah bab-bab secara mendasar pada isi buku teks PKn (Winarno, 2015). Perubahan dan perkembangan yang ada dilihat sebagai hal-hal konseptual yang bernilai dan dapat diintegrasikan kedalam bab-bab yang telah ada.

Hadin dan Fahlevi (2016) menambahkan bahwa Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan berbasis pendidikan Anti Korupsi perlu diimplementasikan di semua Universitas di seluruh Indonesia tak terkecuali PTKI. Materi ajar seperti ini adalah tidak hanya menitikberatkan kepada pengetahuan (*knowledge*) semata, melainkan juga membekali mahasiswa keterampilan-keterampilan seperti menganalisis dan berfikir kritis (*analytical &*

critical thinking) sehingga akan membentuk keterampilan-keterampilan *experiential learning* yang lain, selain itu focus utama materi ajar ini adalah pembentukan dan kaderisasi mahasiswa yang terampil, berpengalaman dan berkarakter.

C. Pembahasan

1. analisis kebutuhan dosen dan mahasiswa

Hasil analisis kebutuhan diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di IAIN Metro menunjukkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan harus lebih menekankan pada nalar mahasiswa terhadap pemahaman/ pemecahan permasalahan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (*problem solving*) yang di implementasikan dalam sebuah *project citizen*. Materi ke-Islam-an sebagai ciri khas PTKIN memang harus dimunculkan pada perkuliahan/ pembelajaran. Hal ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman pada mahasiswa tentang peran Islam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan pemahaman nilai-nilai kajian Islam yang universal, toleran, cinta damai, dan *rahmatan lil alamin* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman ini akan semakin meneguhkan keimanan sekaligus memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa, sesuai dengan konsep *Hubbul Wathon Minal Iman*.

2. penyusunan prototype bahan ajar

a) Aspek Materi

Menilik pada kekhasannya sebagai perguruan tinggi berbasis keagamaan Islam maka dalam perkuliahan pendidikan Kewarganegaraan juga diperlukan buku ajar pendamping yang mencerminkan sinergi materi kewarganegaraan dengan kajian ke-Islam-an selain buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti tahun 2016. Pada kenyataannya memang beberapa konten materi pendidikan Kewarganegaraan juga selaras, bersinergi bahkan merujuk pada nilai kajian Islam. Hal ini tentu akan membuka wawasan mahasiswa terhadap hubungan kehidupan beragama dan bernegara sehingga mampu memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme serta persatuan yang mendalam. Adapun materi-materi pendidikan Kewarganegaraan yang berpotensi di integrasikan dengan kajian ke-Islam-an antara lain:

Tabel 1. Integrasi Materi Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Kajian Islam

No	Materi Pendidikan Kewarganegaraan	Kajian/ Materi Ke-Islam-an	Keterangan
1	Negara dan Sistem Pemerintahan	Konsep Negara dalam Islam	Tidak dibahas secara langsung dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat

			Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti. Namun dalam penelitian, esensi materi ini masih diperlukan dalam memahami konsep nasionalisme dan patriotisme
2	Identitas Nasional	-	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
3	Demokrasi	Demokrasi Dalam Islam	Juga dibahas dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti. Tambahkan materi nilai ke-Islam-an menguatkan sinergitas agama dan negara
4	Kewarganegaraan beserta hak dan kewajibannya	-	Juga dibahas dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
5	Konstitusi dan <i>Rule Of Law</i>	Konstitusi Dalam Pandangan Islam	Juga dibahas dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti. Tambahkan materi nilai ke-Islam-an menguatkan sinergitas agama dan negara
6	Hak Asasi Manusia	HAM Menurut Pandangan Islam	Walaupun materi ini tidak dibahas dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti namun esensinya masih diperlukan dalam memahami konsep penegakan HAM
7	Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	-	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
8	Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia	-	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
9	Integrasi Nasional dan Konflik	-	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti

b) Aspek Bahasa dan Tata Tulis

Bahasa dalam buku ajar pendidikan Kewarganegaraan “*Be Good and Smart Moslem’s*” menggunakan Bahasa Indonesia dengan berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia (PUEBI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata atau kalimat bahasa asing tetap ditulis dengan bahasa aslinya dengan dicetak miring (*italic*) dan bila lebih dari 4 baris maka dijadikan 1 spasi. Penulisan menggunakan model huruf *times new roman* dengan ukuran (*font*) 12, spasi yang digunakan adalah 1,5 sedangkan untuk tulisan dalam tabel menggunakan spasi 1. Gaya selingkung rujukan/ referensi secara umum menggunakan *body note*, namun tetap mempertimbangkan *foot note* untuk menjelaskan hal lain yang masih berkaitan dengan bahasan secara terperinci.

c) Aspek Aspek Media dan Grafika

Aspek media dan grafika dibuat sedemikian rupa dengan design secara abstrak sehingga mewakili pluralitas materi yang disajikan. warna dominan putih pada cover menunjukkan tujuan yang suci dari perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa yang baik dan cerdas (*Good and Smart Citizen's*). Warna orange menunjukkan kenyamanan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan sikap yang toleran walaupun beraneka ragam suku, agama dan ras. Warna hijau toska menunjukkan keceriaan dengan harapan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan akan berjalan dengan aktif efektif dan menyenangkan. Berikut adalah desain cover produk penelitian



Gambar 1. Prototype Cover Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan “*Be Good and Smart Moslem*”

Kalimat *be good and smart moslem*, merupakan modifikasi dari tujuan pendidikan kewarganegaraan pada umumnya yaitu *good and smart citizen's*, karena buku ini digunakan sebagai pedoman perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Sama halnya dengan kalimat *Hubbul wathon Minal Iman* menunjukkan bahwa antara kajian agama dan negara memiliki sinergi yang kuat untuk membentuk semangat nasionalisme

dan patriotisme warga negara. Paragraf di cover belakang mendeskripsikan urgensi mata kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam serta tujuan penyelenggaraannya sehingga memotivasi penulis untuk membuat buku ajar ini. Kalimat “*bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*” menunjukkan semboyan bangsa sebagai modal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berbeda suku, agama dan ras.

Background wilayah Indonesia di cover depan dan belakang merupakan cerminan wilayah teritorial negara kesatuan republik Indonesia yang wajib dipertahankan dengan segenap daya dan upaya termasuk melalui penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan. Gambar Masjid Menara Kudus dan kenduri mencerminkan akulturasi antara agama Islam dengan budaya masyarakat sebelumnya, ini menunjukkan bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin*. Gambar santri yang melaksanakan upacara bendera mewakili umat Islam yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan patriotisme.

3. Penilaian dan perbaikan dari ahli/ pakar.

a) Penilaian Dan Perbaikan Ahli Isi dan Sajian Materi

Pada aspek kelayakan isi, diperoleh skor 75 dari 7 item pertanyaan dari 3 ahli. Berdasarkan perolehan tersebut maka pakar/ ahli menilai kelayakan isi dan sajian materi rata-rata 3,57 atau 89%. Aspek materi pendukung/ rujukan memperoleh skor 11 dari 3 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli menilai kelayakannya rata-rata 3,67 atau 91 %. Aspek kelayakan penyajian memperoleh skor 8 dari 2 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli menilai kelayakannya rata-rata 4 atau 100 %. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi perbaikan.

b) Penilaian Dan Perbaikan Ahli Kebahasaan

Pada aspek kesesuaian pemakaian bahasa yang komunikatif, diperoleh skor 7 dari 2 item pertanyaan. Berdasarkan perolehan tersebut maka pakar/ ahli kebahasaan menilai kelugasan, ketepatan, dan kebakuan bahasa rata-rata 3 atau 75%. Aspek kesesuaian pemakaian bahasa yang komunikatif memperoleh skor 11 dari 3 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli menilai kelayakannya rata-rata 3,5 atau 87,5 %. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi perbaikan bahasa.

c) Penilaian Dan Perbaikan Ahli Desain Grafis/ Media

Pada aspek kelayakan desain/ bentuk buku, diperoleh skor 11 dari 3 item pertanyaan. Berdasarkan perolehan tersebut maka pakar/ ahli Desain Grafis menilai kelayakan desain/ bentuk buku rata-rata 3,67 atau 91,75%. Aspek kelayakan sampul/ cover memperoleh skor 18 dari 5 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli desain grafis menilai

kelayakannya rata-rata 3,6 atau 90%. Aspek kelayakan desain isi buku memperoleh skor 18 dari 5 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli desain grafis menilai kelayakannya rata-rata 3,6 atau 90%. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi perbaikan design grafis.

d) Penilaian Dan Perbaikan Dari Pengguna/ Mahasiswa

Pada aspek ketertarikan materi, diperoleh skor 15 dari 4 item pertanyaan per 30 mahasiswa. Berdasarkan perolehan tersebut maka mahasiswa menilai ketertarikan materi rata-rata 3,75 atau 93,75%. Aspek tingkat kesulitan materi memperoleh skor 10 dari 3 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut mahasiswa menilai kelayakannya rata-rata 3,33 atau 83,33%. Aspek kebermanfaatan memperoleh skor 8 dari 2 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut mahasiswa menilai kelayakannya rata-rata 4 atau 100%. Aspek bahasa memperoleh skor 8 dari 2 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut mahasiswa menilai kelayakannya rata-rata 4 atau 100%. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi.

D. Simpulan

Pengembangan bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan di PTKIN dapat dintegrasikan dengan nilai-nilai syariat Islam sehingga dapat menunjang perkuliahannya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang khas dengan ke-Islaman-nya. Adapun materi-materi yang dapat terintegrasi antara lain Negara dan Sistem Pemerintahan, Demokrasi, Konstitusi dan *Rule Of Law*, serta Hak Asasi Manusia. Kelayakan isi dan sajian materi memperoleh prosentase 93,3%, kelayakan aspek kebahasaan memperoleh prosentase 81,25%, kelayakan desain grafis memperoleh presentase 90,6, dan aspek penilaian mahasiswa memperoleh prosentase 94,27.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Fikri Hadin dan Reja Fahlevi, 2016. *Desain Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol.1, No.2, Desember tahun 2016
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2012. *Bahan Modul Kuliah Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, cetakan I*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

- Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi. 2017. *Panduan Bimbingan Teknis Dosen MKU Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya IPTEK dan Pendidikan Tinggi.
- Kerr, D. 1999. *Citizenship Education: an International Comparison*. England: NFER
- Winarno, 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Ombak
- Winataputra, US. 2001. *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi, (Disertasi)*. Bandung: UPI

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA NEGERI 5 MALANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN BAHAYA RADIKALISME DI SEKOLAH

Anis Isrofin, M.Pd
Kepala Sekolah SMAN 5 Malang

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sering kita dengar di pelbagai kesempatan terutama di lingkungan sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan PPK sebagai bentuk perwujudan salah satu butir Nawacita yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui gerakan nasional revolusi mental (GNRM). Gerakan PPK ini seolah menjadi kesadaran kembali bangsa kita akan pentingnya pendidikan karakter. Seolah bangsa kita kembali menemukan hal yang sesungguhnya diidam-idamkan dalam proses pendidikan.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pendidikan nasional juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN. No.20 Thn 2003 pasal 3). Hal itu secara sederhana ditegaskan kembali dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

PPK ini sebenarnya bukanlah produk baru, bukan sebagai kurikulum baru tetapi sebagai penegasan akan hadirnya ruh pendidikan. PPK merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkokoh karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan dan kerjasama dengan melibatkan sekolah lain, masyarakat, instansi, keluarga yang merupakan bagian dari seluruh Tripusat pendidikan.

Di dalam PPK ini terdapat lima nilai utama karakter yang saling berkaitan untuk membentuk karakter siswa sebagai prioritas. Karakter itu antara lain; religius, nasionalis,

mandiri, gotong royong dan integritas. Kelima karakter ini sesungguhnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama karakter bangsa yang telah lama dikembangkan.

Pengembangan PPK di sekolah ini menjadi semakin urgen ketika melihat fenomena radikalisme yang semakin gawat di negara kita. Perilaku kekerasan atas nama agama yang kemudian melakukan pembunuhan yang menasar terhadap rumah ibadah dan aparat keamanan yang baru saja terjadi di Surabaya dan Riau. Menunjukkan semakin jelas akan adanya bahaya radikalisme di negara kita. Juga ada berita yang menyatakan terdapat sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang sudah disusupi radikalisme. Terdapat sekolah yang berafiliasi terhadap faham keagamaan tertentu yang tidak mau melakukan upacara bendera dan siswa tidak mau memberi hormat kepada bendera merah putih. Selain itu siswa juga tidak diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Gencarnya infiltrasi ideologi radikalisme ini perlu dihadapi dengan menguatkan pendidikan karakter pada siswa. Terutama pada nilai-nilai religius yang mengedepankan faham keagamaan yang toleran dan pembawa kasih sayang terhadap sesama, juga pada nilai-nilai nasionalis yang meliputi cinta pada tanah air, menghargai keberagaman, menghormati keyakinan, dan bangga menjadi bangsa Indonesia serta berintegritas dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengatakan bahwa radikalisme di lingkungan sekolah dapat dicegah melalui penguatan pendidikan Karakter (PPK). Yang meliputi penguatan karakter religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Melalui nilai-nilai utama yang ada dalam PPK tersebut, siswa dapat belajar untuk saling menghargai dan toleransi antarsema, serta dapat memahami dan menghargai adanya perbedaan.

Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: Intrakurikuler, Kokurikuler; dan Ekstrakurikuler.

Untuk penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum. Sedangkan penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.

Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

Pengembangan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Di SMAN 5 Malang

Pengembangan PPK di SMAN 5 Malang menerapkan semua dari lima karakter utama yaitu; religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Dalam konteks upaya pencegahan dari masuknya bahaya radikalisme di sekolah ada dua karakter utama yang dikembangkan di sekolah yaitu karakter religius dan nasionalisme.

Pengembangan Karakter Sehari-hari di Sekolah

SMAN 5 Malang sebagai sekolah rujukan telah mempraktikkan PPK ini mulai dari masuk sekolah hingga pulang sekolah. Praktik PPK ini terlihat mulai dari siswa masuk di halaman. Guru dan staf sekolah menyambut siswa yang datang untuk bersalaman. Guru memberikan sambutan dan semangat kepada siswa dan mengingatkan siswa agar senantiasa datang tidak terlambat dan untuk selalu memakai atribut sesuai peraturan sekolah. Siswa kemudian melakukan finger print agar kedatangan dan pulangannya terpantau pula oleh orang tua siswa. Siswa yang piket melakukan tanggung jawabnya untuk menciptakan kondisi ruang kelas yang bersih dan kondusif untuk belajar. Guru juga menjadi ujung tombak untuk melakukan upaya pembiasaan Senyum Sapa dan Salam. Di sepanjang lorong sekolah terdapat tulisan-tulisan motifasi dan kata-kata bijak agar siswa terinternalisasi dengan pesan-pesannya.

Setelah siswa masuk kelas siswa bersiap untuk mengikuti kegiatan imtaq. Siswa yang beragama Islam melakukan kegiatan imtaq di kelas. Dan siswa yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha melaksanakan imtaq di ruang imtaq masing-masing. Bagi yang beragama Islam Imtaq dipandu dari sentral. Diawali dengan tadarus Al Qur'an bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan kajian keagamaan selama 5 menit yang mengupas isi Al Quran, Hadist, hukum Islam atau motivasi bagi siswa untuk rajin beribadah, giat belajar, patuh terhadap orang tua dan guru, juga menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia termasuk terhadap alam sekitar. Imtaq diakhiri dengan berdoa bersama-sama.

Setelah itu pembelajaran dimulai. Guru mata pelajaran tidak akan memulai pelajaran sebelum kelas dalam kondisi betul-betul bersih. Ketika ada sampah di bawah meja guru akan meminta siswa segera membuang ke tempat sampah. Atau ketika ada meja atau kursi yang kurang rapi guru akan meminta siswa merapikan terlebih dahulu.

Kemudian siswa dengan dipimpin oleh seorang yang bergantian memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stansa. Hal ini agal rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan siswa senantiasa baru setiap hari. Kemudian guru mengajak siswa berdoa bersama-sama dan memberi salam.

Selama pembelajaran PPK juga tercermin dari RPP guru untuk mengkondisikan siswa berkolaborasi dan bergotong royong. Siswa juga harus bertanggungjawab atas dirinya. Siswa dilarang keras untuk mencontek ketika ujian, dan ada sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menguatkan integritas siswa mulai dari dalam kelas.

Budaya Kebersihan; Memupuk Rasa Tanggung Jawab

Sebagai sekolah yang menyandang gelar sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri mulai tahun 2011 SMAN 5 Malang tentu saja mempunyai budaya kebersihan dan cinta lingkungan yang sangat kuat. Disamping dalam keseharian siswa diajak untuk menjaga kebersihan, setiap dua jumat sekali diadakan Jum'at bersih. Seluruh warga sekolah dilibatkan dalam kegiatan Jum'at bersih. Hal ini diharapkan akan menjadi kebiasaan siswa dalam kehidupan sehari-harinya untuk menjaga kebersihan dan bertanggung jawab mempertahankannya.

Budaya Literasi; Menanam benih Integritas

Sebagai sekolah rujukan SMAN 5 Malang juga mengembangkan budaya literasi sekolah. Setiap Jum'at siswa diberi waktu satu jam pelajaran untuk membaca buku, baik fiksi maupun non fiksi. Kemudian siswa menuliskan resume dari apa yang dia baca pada buku jurnal literasi. Siswa diharuskan membawa sendiri buku dari rumah untuk dibaca dan ditinggal di perpustakaan kelas. Setiap kelas mempunyai perpustakaan kelas sebagai media pojok baca kelas. Untuk kegiatan literasi ini pula hampir di setiap tempat, di pojok pojok sekolah disediakan pojok literasi, agar siswa senantiasa terbiasa membaca buku di manapun atau kapanpun ada waktu. Dengan menjadi orang yang haus membaca siswa diajak menjadi probadi yang berwawasan luas, yang terinspirasi untuk punya integritas bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya.

Budaya Religius; Menguatkan Pemahaman Agama Penuh Kedamaian dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Selain Imtaq pagi yang rutin dilakukan di sekolah siswa SMAN 5 Malang juga dibiasakan untuk sholat dhuhur dan ashar berjamaah di masjid sekolah. Tidak hanya guru-guru agama saja yang bergilir menjadi imam sholat berjamaah, guru guru mapel lain pun dilibatkan. Setiap datang waktu dhuhur dan ashar siswa mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh areal sekolah. Sebagai penanda waktu sholat berjamaah. Masjid Nurul Islam yang berukuran 12x12 m berlantai dua ini menjadi pusat kegiatan keagamaan di sekolah sekaligus sekretariat Badan Dakwah Islam. Masjid ini dibangun melalui dana yang dihimpun dari kaleng-kaleng kecil yang diedarkan di kelas-kelas oleh anggota BDI. Dari kaleng kecil dan uang kecil itulah berdiri masjid yang megah di lingkungan SMAN 5 Malang. Hal ini juga menjadi media mengasah kepedulian dan tanggungjawab siswa untuk berinfak dan bershodaqoh. Di masjid ini pula setiap jumat diadakah sholat Jumat yang bilalnya dari siswa dan khotib Jumat dari guru-guru.

Setiap hari jum'at, ketika siswa laki-laki melakukan sholat jum'at, maka siswi-siswi berkumpul di aula sekolah untuk mengadakan kegiatan keputrian. Seluruh siswi mengikuti kegiatan keputrian ini. Materi yang disampaikan meliputi kajian keputrian juga pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin.

Kegiatan keagamaan yang lain yang dilakukan di sekolah adalah peringatan hari besar keagamaan; seperti peringatan tahun baru Islam, Isro Mi'roj, dan Maulid Nabi. Dari agama Kristen juga melakukan kegiatan Natal bersama setiap tahun bagi siswa yang beragama Kristen dan Katolik. Kegiatan keagamaan Islam ini dibawah naungan sekbid satu Osis dan dilaksanakan oleh anggota BDI sebagai panitianya. Mereka mengadakan lomba-lomba, kegiatan kesenian Islam (hadrah, puisi, sholawat dan nasyid), diakhiri dengan Tausiah agama dari kalangan ulama dan keagamaan yang selektif. Pengisi materi dipastikan tidak berasal dari kalangan Islam yang mengajarkan benih benih intoleransi dan radikalisme. Kegiatan peringatan natal juga mengkolaborasikan semua elemen yang guru dan siswa yang beragama Kristen dan Katolik. Selalu guru agama Islam pun diundang untuk turut menghormati kegiatan ini. Hal ini menambah nuansa kerukunan umat beragama di SMAN 5 Malang.

Pelaksanaan Qurban dan pelaksanaan zakat fitrah juga di lakukan oleh warga SMAN 5 malang. Dana untuk kurban dan zakat fitrah berasal dari siswa. Kemudian penyembelihan hewan qurban dan pembagian zakat fitrah seringkali didistribusikan di daerah daerah yang secara ekonomi minus. Hal ini untuk mendekatkan siswa dengan masyarakat sekaligus menguatkan rasa solidaritas dan kecintaan terhadap sesama sebagaimana yang diajarkan oleh agama.

BDI (Badan Dakwah Islam) juga melakukan agenda kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Materi berisi tafsir al Quran, etika mencari ilmu dan tema-tema keagamaan sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi.

BDI juga memelopori kegiatan kunjungan ke panti asuhan. Mereka menghimpun donasi dari warga sekolah dan donatur-donatur yang berasal dari alumni dan orang tua siswa. Mereka melakukan kunjungan sekaligus mengadakan acara yang melibatkan santri-santri yang tinggal di panti.

Osis juga terlibat dalam kegiatan keagamaan pada momen puasa. Osis mengkoordinasi pembagian takjil gratis buka bersama. Takjil ini hasil sumbangan dari siswa dan orang tua siswa. Bahkan siswa-siswa yang non-muslim pun turut dengan sukacita membantu dalam pembagian takjil gratis dan buka bersama. Hal ini semakin meneguhkan semangat kegotongroyongan dan kurukunan antar umat beragama.

Budaya Nasionalisme; Memperteguh Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia

Selain menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari, siswa juga melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan setiap peringatan hari besar nasional. Kegiatan upacara ini sebagai penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Siswa diajak untuk menghormati simbol-simbol negara, dan diajak untuk menghargai hasil perjuangan para pendahulu bangsa. Sehingga dengan memahami tugasnya sebagai anak bangsa yang harus mempertahankan kedaulatan bangsa maka siswa tidak akan mudah untuk dibelokkan ke arah radikalisme.

Setiap peringatan HUT RI Osis juga menjadi pelopor acaranya. Osis mengadakan acara bazar makanan tradisional Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini untuk memupuk kecintaan siswa terhadap budaya bangsanya. Osis juga menyelenggarakan kegiatan lomba hiburan yang bertema 'permainan tradisional'. Di situ kita bisa melihat siswa-siswa kembali bermain klompen, egrang, dakon dan berbagai permainan tradisional lainnya. Terlihat siswa sangat menikmati permainan tradisional yang di dalamnya terdapat pesan-pesan kearifan bangsa kita.

Selain itu ada berbagai ekstrakurikuler yang menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah bakat dan minatnya. Diantaranya ada yang berprestasi yang itu tentu saja dipersembahkan untuk kebanggaan bangsa dan negara baik di bidang seni maupun olah raga.

Upaya Melihat Benih-benih Radikalisme di Sekolah

Melalui semua kegiatan yang ada di sekolah baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstra kurikuler bahkan kebiasaan sekecil-kecilnya di sekolah diarahkan pada upaya penguatan karakter siswa, terutama yang terkandung dalam PPK.

Guru dan siswa perlu diberikan pemahaman akan adanya radikalisme dan kesadaran untuk memperkuat dirinya dengan karakter karakter yang baik tersebut. Untuk menangkal perkembang biakan radikalisme di sekolah kita perlu memahami bagaimana biasanya narasi atau cara perekrutan kelompok radikal yang harus dipahami bersama warga sekolah. *Pertama*, kelompok radikal biasanya menggunakan *narasi ketidakadilan*. Sehingga siswa terpenggil untuk melakukan ‘Jihad’ yang salah. *Kedua*, melalui historical naratio. Sejarah dibengkokkan tidak untuk membangkitkan wisdom atau kearifan, tetapi justru untuk membangkitkan dendam dan kebencian. *Ketiga*, *pshycological naration*. Yaitu tokoh tokoh kekerasan dan yang mempunyai ide radikalisme sebagai pahlawan. *Keempat*, *theological narration*, menggunakan ayat suci sebagai justifikasi kekerasan. *Kelima*, *instrumental narration*. Menganggap kekerasan sebagai solusi pemecahan terhadap masalah.

Guru dan semua warga sekolah harus selalu waspada terhadap gejala radikalisme di kalangan siswa. Benih benih itu kelihatan dari cara pemahaman keagamaan siswa yang cenderung intoleran dan eksklusif. Mereka memandang negatif terhadap tanah airnya. Pesimis dan tidak ada kebanggaan terhadap bangsanya. Maka di sini peran guru agama sangat vital sebagai alarm utama ketika munculnya sinyal sinyal radikalisme. Guru PKN dan guru lainnya harus waspada jika di antara siswa ada gejala-gejala pesimisme dan mempunyai pandangan negatif terhadap negara dan bangsa. Pemegang otoritas sekolah (kepala sekolah) harus memantau kalau ada guru yang terindikasi penganut faham radikal. Pembelajaran agama seharusnya sepenuhnya menjadi otoritas guru agama. Agar tidak sampai guru selain guru agama menyampaikan pesan faham keagamaan di berbagai kesempatan yang justru kontraproduktif dengan upaya penanaman karakter nasionalisme siswa. Selbihnya perlu disampaikan dalam setiap kesempatan bahwa Nabi-nabi mengemban misi untuk menjadi rahmat bagi alam semesta dan sebagai tokoh utama untuk melakukan revolusi mental dan karakter mulia bagi manusia. *Wallahua’lam bisshowaab*

Pustaka

UU No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional (Kompas: Jakarta, 2005), h. 112.

Fathurrohman, Pupuh. dkk. 2013 Pengembangan Pendidikan Karakter. Bandung: PT Refika Aditama

Majid, Abdul. dan Dian Andayani. 2012. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muslich, Masnur. 2013. Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional. Jakarta: PT Bumi Aksara

Nata, Abuddin. 2003. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/02/210000126/radikalisme.menyusupi>.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/14210661/intoleransi.terjadi.di.sekolah.siswa.tolak.ketua.osis.yang.beda.agama>.

id.beritasatu.com/home/mendikbud-cegah-radikalisme...pendidikan-karakter/176300

MENANAMKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR MELALUI PEMBELAJARAN *QAWAID SYAMILAH*

Moh. Khasairi

Jurusan Sastra Arab, Fak. Sastra, Universitas Negeri Malang

moh.khasairi.fs@um.ac.id

Abstrak: Pendidikan karakter merupakan pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia. Dalam praktiknya pendidikan karakter bisa disinergikan dengan pendidikan berbagai macam disiplin ilmu, termasuk ilmu kebahasaan. *Qawaid Syamilah* merupakan satu matakuliah yang disajikan di Jurusan Sastra Arab FS UM pada jenjang S1. Tujuan matakuliah adalah untuk memantapkan penguasaan mahasiswa terhadap Gramatika Bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf) serta Semantik (Ilmu Ma'ani). Kegiatan perkuliahan lebih terfokus pada kegiatan analisis terhadap teks-teks berbahasa Arab dari segi tatabahasa dan semantiknya serta kegiatan sintesis untuk menyusun paragraph maupun teks (wacana) berbahasa Arab. Teks yang bertemakan Cinta Tanah Air merupakan salah satu teks yang bermuatan pendidikan karakter yang dipilih dalam matakuliah ini. Poin-poin penting dalam teks ini meliputi konsep cinta tanah air, mengapa kita harus mencintai tanah air, cinta tanah air menurut pandangan Islam, berbagai kegiatan yang menjadi wujud cinta tanah air.

Kata Kunci: Pendidikan karakter, Cinta Tanah Air, *Qawaid Syamilah*

Pendidikan Karakter merupakan salah satu amanah Pendidikan Nasional. Di dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata kunci membentuk watak ini diartikan dengan membentuk atau mendidik karakter.

Sejak tahun 2016 Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla telah mencanangkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dalam gerakan ini PPK dijadikan sebagai pintu masuk pembenahan pendidikan nasional. Untuk pendidikan dasar muatan pendidikan karakter 70% dan 30% sisanya adalah muatan pendidikan pengetahuan. Untuk pendidikan menengah 60% muatan karakter dan 40% lainnya muatan pengetahuan. Terkait dengan program tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam salah satu sambutannya mengatakan: "Gerakan PPK sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan (Kemendikbud: 2017).

Pendidikan Karakter di perguruan tinggi, terutama di UM, secara resmi dicantolkan pada sejumlah matakuliah yang meliputi PPKn (Pendidikan Kewarga Negeraan), Pancasila, PA (Pendidikan Agama) dan Bahasa Indonesia. Pada dasarnya pendidikan karakter juga bisa dijadikan muatan berbagai matakuliah atau matapelajaran. Dalam praktiknya pendidikan

karakter perlu disesuaikan dengan visi dan misi sekolah (lembaga pendidikan) yang implementasinya berbentuk sinergis pendidikan karakter (Salabi, 2014).

Makalah ini memaparkan penanaman karakter cinta tanah air melalui pembelajaran Qawaid Syamilah. Pokok-pokok bahasan meliputi konsep cinta tanah air, mengapa kita harus mencintai tanah air, cinta tanah air menurut pandangan Islam, berbagai kegiatan yang menjadi wujud cinta tanah air, matakuliah Qawaid Syamilah, menanamkan karakter cinta tanah air melalui matakuliah Qawaid Syamilah, beberapa masalah yang dihadapi dan solusinya.

Konsep Karakter Cinta Tanah Air

Berbicara tentang konsep karakter cinta tanah air akan lebih baik kalau terlebih dahulu dibicarakan konsep tiga istilah yang memadukannya, yaitu karakter, cinta dan tanah air. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008) disebutkan bahwa karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yg membedakan seseorang dengan yang lain. Orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki tabiat atau watak tertentu.

Cinta oleh KBBI diartikan suka sekali, kasih sekali, dan sayang benar. Dalam konteks cinta tanah air maka kata “cinta” tampaknya lebih tepat dimaknai “mencintai” yang berarti “menaruh kasih sayang kepada sesuatu. Sedangkan tanah air menurut KBBI adalah “negeri tempat kelahiran”. Batasan ini sejalan dengan pendapat al Jurjani yang menyebutnya dengan istilah *al-wathan al-ashli*, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dengan demikian cinta tanah air adalah perasaan suka sekali atau sayang benar atau menaruh kasih sayang kepada negeri tempat kelahiran. Orang yang mencintai tanah air adalah orang yang suka sekali kepada negeri tempat kelahirannya. Jadi, orang yang berkarakter cinta tanah air adalah orang yang memiliki tabiat atau watak suka sekali kepada negeri tempat kelahirannya.

Tanah air adalah inkubator manusia yang merangkul semua orang yang memiliki ikatan, adat istiadat, tradisi, agama, bahasa, dan warisan umum. Tanah air adalah wadah yang mewadahi semua orang, penutup yang menutupi mereka semua dengan kehangatan, kasih sayang, cinta, dan kedamaian yang melindungi mereka dari bahaya eksternal dan mengancam keamanan mereka dan melindungi mereka dari segala ancaman terhadap eksistensi mereka. Cinta tanah air adalah pengabdian kepada negara, jauh dari perbedaan makna istilah dalam hal geografi, konteks, dan filsafat. Cinta tanah air adalah perasaan umum yang berlaku untuk semua warga negara dan bangsa. Cinta tanah air adalah ketulusan seseorang kepada negaranya.

Secara istilah yang oleh penulis dianggap lebih memadai dan dijadikan sebagai acuan dalam ulasan ini adalah pendapat Kamisopa (2017) yang mendefinisikan cinta tanah air dengan

“mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdikan, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya”.

Alasan Mencintai Tanah Air

Lista (2017) mengatakan bahwa cinta tanah air sebenarnya mengandung unsur rasa sayang dan kasih terhadap suatu hal. Perasaan tersebut menjadikan orang yang mencintai rela untuk selalu melindungi, memelihara, dan membela dari segala macam ancaman. Orang yang cinta tanah air rela berkorban demi tanah air, membelanya dari segala gangguan serangan dari bangsa lain yang berusaha mengganggu keamanan bangsanya. Para pahlawan Indonesia telah membuktikan bahwa mereka mencintai tanah air mereka dengan melawan para penjajah yang berusaha merebut tanah air Indonesia. Mereka tidak rela kehormatan Indonesia diinjak-injak oleh bangsa asing, karena itulah mereka merebut Indonesia dari tangan bangsa asing tersebut.

Cinta tanah air itu dilakukan oleh manusia karena beberapa alasan, di antaranya (a) fitrah manusia mencintai tanah tumpah darahnya (tanah kelahirannya), (b) manusia berkeinginan untuk bersilaturahmi kepada orang tuanya serta leluhurnya yang lain, yang dari keinginan ini lahir budaya mudik yang terjadi pada saat Idul Fitri, (c) manusia ingin bersyukur atau berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepadanya, dan (d) manusia ingin berbuat baik ke kaum fuqara'nya, anak-anak yatimnya, dan lain-lain.

Kecintaan seseorang kepada tanah airnya karena banyak kenangan sejak ia dilahirkan sampai besar. Pada dasarnya manusia itu juga memiliki fitrah untuk berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa kepadanya. Dalam konteks Indonesia, pihak-pihak yang telah berjasa itu tidak hanya orang tua namun juga para guru, nenek moyang utamanya yang telah menjadi pahlawan bangsa. Manusia pada dasarnya juga ingin berbuat kebaikan kepada orang lain yang perlu dibantu sebagaimana ia dibesarkan dengan banyak memperoleh bantuan pihak lain.

Cinta Tanah Air Menurut Pandangan Islam

Islam memerintahkan pemeluknya untuk mencintai tanah air. Tidak sedikit bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut, baik berupa ungkapan langsung maupun tidak langsung. Berikut ini akan diulas beberapa bukti tersebut:

1. Kisah Raja Thalut dan Raja Jalut (Al Qur'an Surat Al Baqarah 246—252)

Di dalam tafsir Jalalain (tanpa tahun) disebutkan bahwa suatu ketika Bani Israil dipimpin oleh seorang Nabi yang bernama Nabi Samuel. Beliau diminta oleh umatnya untuk berdoa kepada Allah agar mereka diberi raja yang memimpin mereka untuk merebut tanah air yang telah direbut/dijajah raja dzalim yang bernama Jalut. Nabi Samuel berkata kepada mereka: “Jangan-jangan kalau punya raja dan kalian diajak perang ternyata tidak mau. Maka merekapun menjawab: “Bagaimana kami tidak mau berperang di jalan Allah padahal kami sudah diusir dari kampung kami dan dipisahkan dari anak cucu kami.”

Nabi Samuel akhirnya memenuhi permohonan umatnya seraya berdoa kepada Allah agar umatnya diberi seorang raja. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Samuel dengan mengangkat salah seorang penggembala kambing yang bernama Thalut. Kehadiran Thalut untuk memimpin rakyatnya tidak langsung diterima oleh umat dengan alasan ia bukanlah dari kalangan orang terhormat. Mereka bisa menerima beliau sebagai raja setelah Allah SWT menurunkan bukti berupa tabut (semacam kotak pusaka). Sejak itu raja Thalut mulai menggalang kekuatan untuk menyerang raja Jalut. Dalam perang tersebut pasukan raja Thalut dipimpin oleh panglima yang masih muda belia bernama Dawud (yang selanjutnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Dawud AS). Mereka menang dalam peperangan tersebut dan berhasil merebut kembali tanah air dan kampung halamannya.

2. Pada saat berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَطْيَبَ لِكُمْ مِنْ بَلَدَةٍ وَأَحَبَّ لِكُمْ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ
‘Sungguh Engkau (Mekah) adalah bumi Allah yang paling baik, alangkah besarnya cintaku padamu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu,’ (HR Ibnu Hibban dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas).

3. Sesampainya di Madinah Rasulullah SAW berdoa:

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

“Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Makkah, atau melebihi cinta kami pada Makkah.” (HR al-Bukhari 7/161)

Doa ini menunjukkan bahwa dimana saja seorang muslim ditempatkan oleh Allah SWT ia harus berusaha untuk mencintai tempat tinggal itu. Karena pada hakikatnya ia bertempat di tempat tersebut adalah karena kehendak Allah; sedangkan apa yang Allah kehendaki untuknya adalah sesuatu yang terbaik untuknya menurut Allah SWT. Bagaimanapun Rasulullah SAW adalah contoh terbaik bagi umat Islam dalam segala hal. Untuk mencintai tempat tinggal yang baru beliau sampai membaca doa tersebut.

4. Imam Bukhori di dalam kitab Shahihnya menyebutkan:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila kembali dari berpergian, beliau melihat dinding kota
Madinah, maka lantas mempercepat ontanya. Jika di atas kendaraan lain (seperti bagal atau
kuda, pen) maka beliau menggerak-gerakannya karena kecintaanya kepada Madinah,” (HR
Bukhari).

5. Di dalam riwayatnya Ibnu Abi Hatim dari seorang sahabat yang bernama Dhahhaq
berkata:

لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق الى مكة فأنزل الله ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى
معاد (القصص: 85)

Ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah dan sampai di suatu tempat yang dinamakan
Juhfah maka beliau merindukan Mekah maka Allah menurunkan ayat إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu Al Qur'an, benar-benar akan
mengembalikan kamu ke tempat kembali.

6. Nabi Ibrahim AS sangat mencintai Mekah yang merupakan tempat tinggal keluarga
beliau (Siti Hajar bersama Ismail AS) dan keturunan beliau. Hal ini tampak pada firman Allah
di dalam Al Qur'an surat Al Baqarah: 126) sebagai berikut.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ
قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Dan , ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman
sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara
mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun
Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah
seburuk-buruk tempat kembali."

Ulasan di depan sudah cukup memberikan bukti bahwa mencintai tanah air merupakan
Sunnah Rasulillah SAW dan Sunnah para nabi lainnya. Sunnah-sunnah ini dilanjutkan oleh
para ulama', sebagaimana di Indonesia para ulama' telah berjasa besar dalam mewujudkan dan
mempertahankan serta merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Di Indonesia di kenal
ungkapan Hubbul Wathan minal Iman. Ungkapan ini merupakan produk ulama Nahdlatul
Ulama' (NU) yang sangat mencintai tanah airnya. Ungkapan ini oleh sebagian masyarakat
dianggap sebagai Hadits. Tentu anggapan ini tidak benar. Kalaupun dianggap hadits maka
istilah yang pas adalah hadits maudhu' (hadits palsu). Namun penyebutannya sebagai hadits
maudhu juga tidak benar, karena pencetusnya tidak berniat untuk memalsukan hadis.
Kendatipun demikian secara substansial para ulama' membenarkan bahwa cinta tanah air itu

bagian dari iman. Ungkapan tersebut menjadi sangat terkenal karena secara tekstual sejalan dengan An Nadzafatu minal iman dan alhayau minal iman

Realisasi Cinta Tanah Air

Di antara wujud mencintai tanah air adalah mempertahankannya dari penjajah dan pihak-pihak yang ingin menguasainya. Mempertahankan tanah air adalah merespon terhadap kecurigaan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi keamanan tanah air. Bentuk lain mencintai tanah air adalah menjaga kemampuan bangsa dan tidak merusak atau mencuri sumberdaya yang dimilikinya. Wujud cinta tanah air juga bisa berupa melindunginya dari berbagai bahaya eksternal yang dapat mengancam keberadaan tanah air tersebut.

Wujud Nyata cinta tanah air itu macam-macam. GuruPpkn.com mengemukakan 10 contoh sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: (1) bangga sebagai bangsa Indonesia, (2) menjaga nama baik tanah air Indonesia, (3) menggunakan hak pilih dalam pemilu, (4) menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, (5) menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, (6) melestarikan kebudayaan Indonesia, (7) menjaga kelestarian lingkungan, (8) Menciptakan kerukunan antar umat beragama, (9) Hidup rukun dan gotong royong, dan (10) Aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional

Untuk saat ini (dalam era kemerdekaan) kecintaan seseorang terhadap tanah airnya bisa diwujudkan dalam berbagai kegiatan dan sikap, di antaranya adalah (1) ikut serta dalam pembangunan nasional melalui bidangnya dan potensi masing-masing, (2) bekerja dengan baik sesuai dengan keahlian masing-masing, (3) sedapat mungkin melaksanakan semua kewajiban sebagai warga negara, (4) mencintai produk Indonesia dengan mengutamakan membeli produk dalam negeri, (5) memelihara sarana-prasarana umum dengan tidak merusaknya, (6) menciptakan suasana aman dan damai dalam kehidupan bersosial/ bermasyarakat dengan toleran dan tenggang rasa, (7) menghargai jasa pahlawan, dan sebagainya.

MK Qawaid Syamilah

Qawaid Syamilah merupakan matakuliah wajib yang disajikan di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Sastra Arab FS UM. Matakuliah ini merupakan kelanjutan dari beberapa matakuliah gramatika (Tarkib Mukatstsaf, Tathbiq Nahwi, Tathbiq Sharfi) dan Ilmu Ma'ani (semantic). SCPL matakuliah ini adalah mahasiswa. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab secara kritis, logis, efektif dan tepat, baik reseptif maupun produktif sebagai dasar komunikasi internasional dengan tetap menjunjung sikap nasionalisme dan rasa tanggung jawab pada pekerjaannya

CPMK matakuliah ini adalah mahasiswa menguasai kaidah Bahasa Arab melalui kegiatan diskusi, observasi, menghafal dan presentasi dan mampu menerapkannya dalam bentuk menganalisis (termasuk meng-*i'rab*), memberi *harakat*, dan menggali pesan teks sesuai kaidah nahwu, sharf, dan ma'ani. Atas dasar SCPL dan CPMK di atas maka proses pembelajaran matakuliah ini lebih menekankan pada pembelajaran berbasis teks. Teks-teks yang dipilih adalah teks yang mendukung pendidikan karakter. Dengan demikian teks tentang cinta tanah air hanya merupakan salah satu di antara beberapa teks yang ada hubungannya dengan pendidikan karakter.

Karakter cinta tanah air dalam konteks pembelajaran gramatika Bahasa Arab bisa dimasukkan pada matakuliah Tarkib Mukatstsaf, Tathbiq Nahwi, Tathbiq Sharfi, maupun Qawaid Syamilah. Bentuk substansi materi bisa berupa (1) Kalimat yang memuat kata-kata mutiara terkait cinta tanah air, (2) Kalimat tentang keistimewaan atau keindahan Indonesia, (3) Paragraf yang memuat ungkapan-ungkapan indah terkait cinta tanah air, (4) Wacana/teks terkait cinta tanah air. Semua materi tersebut bisa disajikan pada semua matakuliah tersebut. Materi (3) dan (4) yang kompleks lebih baik kalau disajikan pada Qawaid Syamilah.

Poin-poin penting dalam teks cinta tanah air yang digunakan pada Qawaid Syamilah sebaiknya meliputi (1) konsep cinta tanah air, (2) mengapa kita harus mencintai tanah air, (3) cinta tanah air menurut pandangan Islam, (4) kegiatan yang menjadi wujud cinta tanah air. Mengingat teks yang disajikan membawa misi penanaman karakter cinta tanah air maka dalam mengajarkannya dosen tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, akan tetapi juga menekankan aspek afektif dan psikomotorik.

Masalah-masalah yang dijumpai dalam proses pembelajaran meliputi (1) sulitnya menyajikan dua aspek (tata Bahasa dan substansi teks cinta tanah air) sekaligus, secara proporsional, (2) sulit mencari teks yang secara kaidah memenuhi kebutuhan, demikian juga secara substansial, (3) keterbatasan waktu penyajian. Masalah pertama bisa diatasi atau minimal dikurangi dengan membuat perencanaan pembelajaran yang cermat dan proporsional serta detail. Masalah kedua diatasi dengan sedapat mungkin mengembangkan materi sendiri dengan melibatkan pihak lain yang berkompotensi. Sedangkan keterbatasan waktu bisa diatasi dengan penugasan baik sebelum maupun sesudah proses perkuliahan.

Simpulan

Pendidikan karakter merupakan amanat dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang harus direalisasi oleh para insan pendidikan. Para pendidikan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menanamkan karakter-karakter terpuji kepada anak

didiknya melalui berbagai kegiatan pembelajaran, termasuk melalui bahan ajar yang disajikan. Karakter cinta tanah air bisa disajikan kepada mahasiswa melalui matakuliah Qawaid Syamilah. Di antara caranya adalah menjadikan tema cinta tanah air sebagai salah satu tema bahasan. Poin-poin penting dalam teks ini meliputi konsep cinta tanah air, mengapa kita harus mencintai tanah air, cinta tanah air menurut pandangan Islam, berbagai kegiatan yang menjadi wujud cinta tanah air.

Daftar Pustaka

- Guruppkn. 2018. *Contoh Sikap Cinta Tanah Air*. <https://guruppkn.com/>
- Kemendikbud. 2017. *Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Pintu Masuk Pembinaan Pendidikan Nasional*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/>
- Kamisopa, Idris. 2017. *Cinta Tanah Air*. <https://www.kompasiana.com/idriskamisopa/5929804f8e7e61c67214ba46/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Katalog Jurusan Sastra Arab. 2018. Malang: Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
- Liska, Benedikta. 2017. *Perlunya Cinta Tanah Air*. <https://www.kompasiana.com/benedikta/5927d7acd59373e82cab4563/>
- Salabi, Ahmad. 2014. Implementasi Pendidikan Berbasis Karakter Melalui Program Kantin Kejujuran Pada Sekolah-Sekolah Di Provinsi Kalimantan *JURNAL ILMIAH ILMU KEPENDIDIKAN DAN KEDAKWAHAN* Vol. VI. No. 02. Juli-Desember 2014
- Tim Dosen PAI. 2014. *Pendidikan Islam Transformatif Membentuk Pribadi Berkarakter*. Malang: Penerbit Dreem Litera.
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

A LIFE-BASED LEARNING TEXTBOOK AS A SUPPORT FOR CIVICS INSTRUCTION TO STRENGTHEN STUDENTS' SPIRIT OF NATIONALISM

M. Alifudin Ikhsan

Universitas Negeri Malang
alifudin.1707128@students.um.ac.id

Abstrak: Cinta tanah air merupakan karakter unggul yang harus dimiliki dan dipahami oleh setiap warga negara, tidak terkecuali peserta didik di semua jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan. Rendahnya angka kesadaran cinta tanah air di sekolah disebabkan oleh pembelajaran konvensional yang tidak menggunakan inovasi model pembelajaran terbaru. Penelitian ini hadir untuk memecahkan masalah tersebut dengan mengembangkan model pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbasis kehidupan. Penelitian ini merupakan inovasi pembelajaran untuk peningkatan karakter cinta tanah air di Sekolah Menengah Kejuruan. Hasil penelitian ini berupa buku pembelajaran PPKn yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter. Buku ini dikembangkan berdasarkan karakteristik siswa Sekolah Menengah Kejuruan, muatan pendidikan karakter serta kurikulum pembelajaran yang berlaku. Penilaian ahli media, desain dan ahli pembelajaran menunjukkan buku pembelajaran ini valid. Ujicoba kepada siswa secara umum menunjukkan bahwa buku pembelajaran ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis nilai cinta tanah air secara efektif, namun sejumlah dimensi kepraktisan khusus perlu diperhatikan dalam tahapan ujicoba selanjutnya.

Kata Kunci: *nasionalisme, pembelajaran, kehidupan, buku ajar*

Abstract: The spirit of nationalism or the love of homeland is a prime characteristic that each citizen needs to have and understand, and there is no exception for students in each level of education, including Vocational High School students. The lack of nationalism awareness at school is resulted by the conventional teaching method that is not integrating any teaching innovation. This research is coming with a solution to solve the problem by developing a new life-based Civics teaching method. The research is an innovation in learning and teaching method to increase the nationalism spirit of Vocational High School students. Thus, the result of this research is a Civics textbook integrated to character values. The book is developed based on the current character building education and curriculum. Moreover, the assessment from the experts of media, designs, and education shows the validity of this textbook. Apart from that, the tryout for students in general shows that this book can be used effectively as a mean to increase the spirit of nationalism, yet some practical dimensions need to be considered in the next trial step.

Keyword: *nationalism, education, life, textbook*

INTRODUCTION

Education is an essential part of lives. Education and teaching are needed to glorify humans (Nurwardani, 2016) and humanizing humans (Kusumawardani, 2013). In reality, education's purpose is to create an independent, responsible, characterized, knowledgeable, and creative human through a conscious and planned efforts in a learning process (Republik Indonesia, 2003). Therefore, education is meant as a transformation media of character instillation and development in daily life (Erlis, 2015).

Civics education is a moral values-based learning (Sukri, 2013) and is also based on national character (Sobri, 2004). Civics as an education of character and values is not only teaching knowledge (cognitive) and skills (psychomotor), but also focusing on the development of the students' attitude (affective) and character (Nurwardani, 2016). Besides, Civics is also being taught in the consideration of various and fluctuating national conditions and developments (Maunah, 2014). Civics as an education of moral and value is expected to be able to create nationalistic and homeland-loving beings (Ikhsan, 2017b).

The previous studies have found the fact that there is an imbalanced learning-teaching dichotomy between Civics and other subjects (Rochmadi, 2018). One of the causes is the non-optimized innovations in learning and teaching (Maunah, 2014). It is strengthened by the research done in *SMK Negeri 1 Malang* (State Vocational High School 1 Malang) relating to the problem. From the 72 respondents as the object of field observation, as much as 64,2% of students feel that the teaching of Civics needs some innovations, and as much as 86,5% of students admit that it is difficult for them to get an appropriate Civics textbook. This problem is causing the learning and teaching process of Civics to be "teacher oriented" (Nurhasanuddin, 2016). Whereas teacher should only be an education facilitator for the students (Kemdikbud, 2013).

The lack of Civics textbooks for Vocational High School students has become one of the considerations of the researcher to develop a suitable textbook for the characteristics of Vocational High Schools. Currently, the teaching materials published by the government is universal and centralistic, so they are not adjusted to the needs and ability of the students in each level of education. This is one of the troubles causing the achievement of goals to be unmaximized, ineffective, and inefficient (Rochmadi, 2018).

The Civics textbook is developed on the concept of life-based learning. This concept is one of the ways used to integrate the students' cognitive ability with the real life. (Peterson, 2011). The advantage of the development of this life-based textbook is how students would be able to think critically (Budiarto, 2012), active in the effort of effective learning (Zain, 2014),

able to learn in a real-life context (Mcewan & Jasinski, 2006) and the students will also be actively included in the teaching and learning process (Mangesa, 2014).

The life-based learning Civics textbook is an alternative of learning strategies that is focusing on real-life context. Based on the previous studies, this approach is suitable to deliver the subject materials in Vocational High Schools which emphasizes practices and students' skills (Kennedy, Jimenez, Mayer, Mellor, & Smith, 2002). Life-based learning itself is a teaching concept of Civics to relate or reflect the subject to real life situations (Cogan, Grossman, & Kong, 2002).

This textbook is also developed based on the five principles of the strengthening of character building programmed by the Ministry of Culture and Education. The five principles are the religious, nationalistic, independent, integrated, and mutual cooperation value (Dalyono, 2017). These character values are included in the textbook because the integration of character building in textbooks is still uncommon. Moreover, it is also supported by the observational data found by the researcher, in which 57% of students hold the opinion that the current Civics textbook is lacking in the department of character building. Thus, this textbook is expected to build the character value of nationalism and loving homeland for the Vocational High School students.

METHOD

This is a research and development done in State Vocational High School 1 Malang (*SMK Negeri 1 Malang*). For the development model, it uses the model of ADDIE (West, Thomas, Bodily, Wright, & Borup, 2017) which consists of analysis, design, development, implementation, and evaluation (Branch, 2009). *The first step* was analysis, or the step to analyze the development of the textbook suited to the needs of the targets. The development analysis of the textbook was done by seeing the condition of the students which are the target of this research. The needs analysis is also portraying the phenomenon of the current Civics observations. The process resulted in a detailed and thorough explanation towards the specification of the needed development of Civics textbooks.

The second step was the design done for the life-based learning Civics textbook. In this step, a formulation of validation and questionnaire sheets was also done, along with the observation sheet of the implementation of teaching syntax which were going to be used in this research and development.

The third step was the development, started by the development of instruments and indicators of validation for the life-based Civics textbook. Afterwards, the data analysis was done using the testing instruments and the indicators of the textbook. If the product have not been rated as valid, a revision is done. The validity test would be conducted until the product is rated as valid for the implementation.

The fourth step is the implementation of the product in the field. The teaching is conducted by a model teacher using the textbook being developed. After the teaching of materials, the students tested using the instrument of cognitive test included inside the developed book. In this step, the questionnaire sheets for user response are also spread to both the teacher and students. It is done to get the data related to the practicality value of usage for the life-based learning Civics textbook.

The fifth step is the evaluation for the textbook. In this step, the researcher divided the testing sytem into two, that are experts' validation (experts of media, design, materials, and Civics), and the test for users. The instrument used in the testing system was the sheets for experts' validation and the questionnaire for users' response using the scale of Likert 1-5. The data of this research is both quantitative and qualitative. The quantitavi data is the result of calculation from the average score of each question components. Meanwhile, the qualitative data is the critic and advice given by the experts and product users. The resul of this assessment would be used as the base to conduct some revisions towards the Civics textbook so that it will be easier for Civic education to create a nationalism spirit in the heart of the students.

RESULT AND DISCUSSION

In a sense of reality, textbooks are urgently needed by students to increase their ability in studying the teaching materials delivered by teachers. Textbooks are holding an essential role in the implementation of learning and teaching activities (Anggria, 2018). The use of textbooks is able to encourage the knowledge and skills of students towards subject materials. However, we need to emphasize that teachers are the facilitator of learning, not a learning subject. Lestari (2013) stated that textbooks are able to give a space for teachers to deliver materials in a more chronological and systematic way, suitable for the basic competences to be achieved.

Primarily, the development of textbooks is not only focusing on how to make an innovation in making the learning process more interesting, but also focusing on how to contain various learning materials that are thoroughly developed. According to Sudjana (2013), fundamentally, textbooks have learning materials to be given to the students for a learning

reference based on the current curriculum. With these materials, students will be able to achieve the learning objectives (Camellia, 2016).

The steps to create a textbook, according to Prastowo (2013) includes (1) analysing curriculum; (2) analysing learning sources; and (3) choosing and determining teaching materials. All of the three steps need to be done correctly and systematically because the three of them have a cause and effect relation (Hernawan, Permasih, & Dewi, 2008). The development of teaching materials is done in order to add the references of the students and creating an active, creative, innovative, and characterized learning and teaching activity (Purnamasari, 2017). The development of teaching materials is the effort for teaching services suitable with the current curriculum standards which should be fulfilled by teachers (UNHAS, 2015).

Life-based learning is one of the new ways in learning pattern, from the segmental pattern into the integrated and interconnected learning ecology among personal lives, works, families, and free time utilization (Simatupang, 2016). This new learning pattern shows that studying is not limited to get scores, degrees, and certificates, but also to improve capabilities, so that ability and skill can be developed accordingly to the students own passions, which in the end may increase the welfare of the students. According to Staron (2006) life-based learning proposes that learning for work is not restricted to learning at work. Learning is a multi-dimensional experience (Rochmadi, 2018).

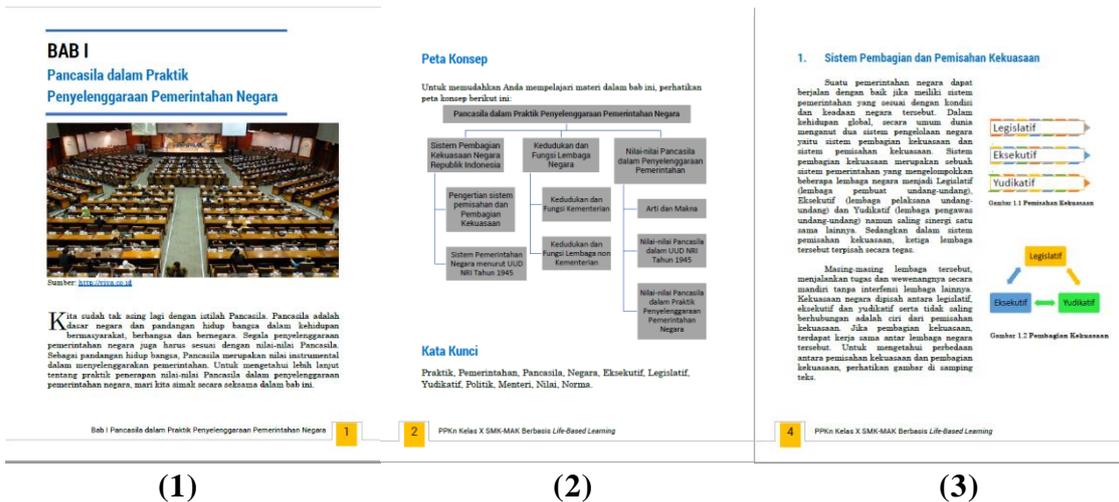
Life-based learning is the process to gain knowledge and skills, understanding the meaning of life, skillful in solving problems, and living life in balance and harmony. Life-based learning is focusing on the concept that learning from life is indeed the real learning (Rochmadi, 2018). Life-based learning is in line with the new era knowledge-based Industry which needs knowledge workers who are ready to accept the challenge of working and learning in the environment that is getting more contemporary with a pressure flowing more contradictively, full of changes and differences (Callan, 2001). Thus, it shows the existence of learning in both the teachers and the students.

Life-based learning is an approach in learning and teaching activity that is marked with a few characteristics (Staden & Purcell, 2016) as follows: (1) the learning process needs to form the independence, the creativity, and the adaptability of students so that they are able to have an intact personality with a high integrity and a continuously developing talent. The learning and teaching process needs to be done in a comfortable, calm, fun, and character-value-based situations (Hasan, 2012); (2) each learning and teaching process needs to give a space for students to develop their own

ability (Mangesa, 2014) and skill suitable to the current values and norms in the society (Knors & Marschark, 2014); (3) the learning and teaching process needs to integrate or combine daily life's components, so that the learning and teaching process can be done anywhere and in any conditions; (4) the atmosphere of the learning and teaching process needs to pierce the limits of life, not only physically, but also psychologically and socially (Claes, 2016); moreover, it should also admit and embrace the context of life broadly as the learning space for students (Rochmadi, 2018).

The research is directed towards the creation of nationalism spirit and character for Vocational High School students. As we know, Vocational High Schools are schools that are focusing on the development of the students for certain types of occupations (Ibrahim, Alias, & Nordin, 2016). Vocational High Schools prioritize the preparations of their students to enter the labor world (Kusumawardani, 2013) and develop a professional attitude (Schulz, 2016). In accordance to their form, Vocational High Schools provide some educational programs suitable with the types of job vacancies. According to The Law of National Education System Act. 20, 2003, Vocational High Schools are one of the forms of formal education providing vocational education on the level of high school as the continuations of Junior High School, Islamic Junior High School, and other forms in the same level (Republik Indonesia, 2003). Vocational High Schools can be named like that (*Sekolah Menengah Kejuruan/SMK*), or Islamic Vocational High School (*Madrasah Aliyah Kejuruan/MAK*), or in any other forms with the same level. The curriculum of Vocational High Schools are made so that the students would be ready to get a job, or for labor world. The contents of Vocational High Schools' curriculum are arranged in such a way to be suitable for the needs in laboring world (Budiarto, 2012).

The result of this research is a textbook which prioritize the instillation of nationalism spirit and values of loving the homeland for students. The character values included are based on the characteristics of Vocational High School students. Here are some of the pages from the life-based textbook.



(1)

(2)

(3)

Picture 1a. The content features of the textbook



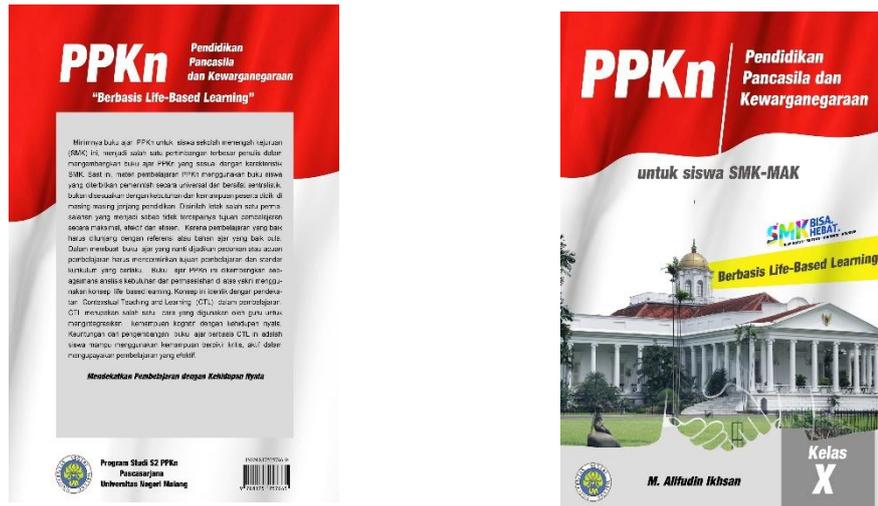
(4)

(5)

(6)

Picture 1b. The feature of nationalism value

The character values in this book are inseparable from the materials and research of the book. The research conducted by (Schulz, 2016) shows that character values that are sticking to a book are able to give a fundamental understanding on each learning and teaching process. Character building is done by applying the character values in the content of the textbook. The character building values emphasized in this book is the religious, nasionalistic, independence, integrity, and cooperation values.



Picture 2. The design of the product

The character building values inside the textbook have been adjusted to suit the national program of mental revolution issued by the government. The strengthening of character education is an education movement at schools to strengthen the characters of the students through the harmonization of ethics, aesthetics, literacy and kinesthetic with the support of public integration and the cooperation among schools, families, and the society (Dalyono, 2017). The Regulation of the President of Indonesian Republic Number 87, year 2017, stated that the strengthening of character education is implemented by applying the values of *Pancasila* in character education, especially on religious, honesty, tolerance, discipline, hard-working, creative, independence, democratic, curiosity, nationality, achievement appreciation, communicative, peace-loving, love reading, caring with environments, social care, and responsibility values (Sulistiyadi, 2014).

This textbook is used by Vocational High School students who have a different characteristic with other levels of education. In the learning and teaching process in Vocational High Schools, the priority is in soft skill management and students' personality. Civics, as a normative subject, has a strategic role in developing students' skill and attitude to strengthen the spirit of nationalism and humans' equality (Ikhsan, 2017a).

The strengthening of nationalism spirit and character can also be seen in this textbook. Here are the results of the preliminary research related to how important the Civics textbook with the integration of character building is. The indicators used are calculated using the linkert scale of 1-5.

Table 1. The Data Analysis of Needs and Contents

Characteristics of textbooks	Teachers and Students	Education Experts	Qualification
The need of textbooks	5.0	5.0	Highly needed
Character building values	4.8	5.0	Highly needed
Life education values	4.8	5.0	Highly needed
State affairs' information	4.9	4.9	Highly needed

The result of the research above shows that there is a high interest to develop life-based Civics textbook. The book is developed with the emphasize on character building values to increase the nationalism spirit of Vocational High School students.

CONCLUSION

John Luther insists, "Good character is more to be praised than outstanding talent. Most talents are to some extent a gift. Good character, by contrast, is not given to us. We have to build it piece by piece-by thought, choice, courage, and determination" (Kusumasari & Alam, 2012). The statement of Luther above shows that character is not something given, without any efforts. Character must be build with all energy and effort as strong as possible with a long process. This research is trying to develop that charcter through the life-based Civics textbook. It is done in order to give a life experience capable of bringing the students into a citizen who is nationalistic, religious, independent, and has a high integrity in socializing and nationalizing. This research needs to be developed further by implementing it in the learning and teaching activities of Vocational High Schools. This research may also be developed by making life-based Civics teaching strategies and models with a greater and more comprehensive scope.

BIBLIOGRRAPHY

- Budiarto, A. (2012). *Penerapan Strategi Pembelajaran CTL (Contextual Teaching & Learning) Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa Kelas Xi Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Pada Mata Pelajaran Sistem Pengapian di SMK Muhammadiyah 1 Bantul* (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Camellia. (2016). Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbasis Nilai-Nilai Karakter dalam Membentuk Sikap/Watak Kewarganegaraan Siswa (Civic Dispositions). *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(1), 13–21.
- Claes, E. (2016). Civic Meaningfulness. *Foundations of Science*, 21(2), 347–372. <https://doi.org/10.1007/s10699-014-9396-5>
- Cogan, J. J., Grossman, D. L., & Kong, H. (2002). Citizenship Education and the preparation

- of future teachers. *Asia Pacific Education Review*, 3(2), 168–183. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2007.03.013>
- Dalyono, B. (2017). Implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah. *Universitas Terbuka Semarang*, 03, 33–42.
- Erlis, R. (2015). *Implementasi Pendidikan Karakter pada Kelas Inklusi di SD Negeri Widoro Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*. (Yuniarifi, Ed.). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hasan, A. B. P. (2012). Policies and Practices for Promoting Multicultural Awareness of Indigenous Early Childhood Education in Indonesia. *International Journal of Child Care and Educational Policy*, 6(1), 63–94.
- Hernawan, A. H., Permasih, & Dewi, L. (2008). Panduan Pengembangan Bahan Ajar. *Depdiknas Jakarta*, 1–13. Retrieved from http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/194601291981012-PERMASIH/PENGEMBANGAN_BAHAN_AJAR.pdf
- Ibrahim, Z., Alias, N., & Nordin, A. B. (2016). Needs Analysis for Graphic Design Learning Module Based on Technology & Learning Styles of Deaf Students. *Cogent Education*, 3, 2–14. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1178364>
- Ikhsan, M. A. (2017a). Fikih Ham Dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 34–40. <https://doi.org/10.17977/um019v2i12017p034>
- Ikhsan, M. A. (2017b). Nilai - Nilai Cinta Tanah Air Dalam Perspektif Al-Qur ' an. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 108–114. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p108>
- Kebudayaan, M. P. dan. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republikn Indonesia Nomor 70 Tahun 2013*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kennedy, K. J., Jimenez, S., Mayer, D., Mellor, S., & Smith, J. (2002). Teachers' conversations about civic education: Policy and practice in Australian schools. *Asia Pacific Education Review*, 3(1), 69–82. <https://doi.org/10.1007/BF03024922>
- Knoors, H., & Marschark, M. (2014). *Teaching Deaf Learners: Psychological and Developmental Foundations*. Oxford University Press.
- Kusumasari, B., & Alam, Q. (2012). Bridging the gaps: The role of local government capability and the management of a natural disaster in Bantul, Indonesia. *Natural Hazards*, 60(2), 761–779. <https://doi.org/10.1007/s11069-011-0016-1>
- Kusumawardani, M. (2013). *Implementasi Nilai Nilai Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- LPP UNHAS. (2015). Bahan Ajar, Buku Ajar, Modul, dan Panduan Praktik. *Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Pembelajaran Universitas Hasanuddin Makassar*.

- Mangesa, R. T. (2014). Implementasi Pendekatan Kontekstual Dalam Pembelajaran Praktik Instalasi Listrik. *Jurnal Kependidikan*, (Vol.46, No.1: Mei 2016), 110–120.
- Maunah, B. (2014). The implementation of character education in the formation of students' holistic personality. *IAIN Tulungagung*, 2(1), 90–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>
- Mcewan, M., & Jasinski, M. (2006). *Life Based Learning In attendance*.
- Nurwardani, P., Saksama, H. Y., & Dkk. (2016). *Pendidikan Pancasila. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi*. Retrieved from www.google.co.id
- Peterson, A. (2011). *Civic republicanism and civic education: The education of citizens. Civic Republicanism and Civic Education: The Education of Citizens*. <https://doi.org/10.1057/9780230306752>
- Purnamasari, N. L. (2017). Pengembangan bahan ajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sd kelas 5 dengan model r2d2 di sdn 1 Mojoarum Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika*, 02(11), 99–106.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Vol. Tambahan L). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Retrieved from http://eprints.dinus.ac.id/14666/1/uu_20-2003_sisdiknas.pdf
- Rochmadi, N. W. (2018). Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berbasis Kehidupan (Life Based Learning). *Makalah Seminar Nasional Pembelajaran PPKn*.
- Schulz, W. (2016). Civic and Citizenship Framework. *International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)*, 12(20), 11–38. https://doi.org/D_OI_10.1007/978-3-319-39357-5_2
- Simatupang, P. (2016). A Critical Review on Paradigm and Framework of National Food Security Policy. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25(7), 1–19.
- Sobri, A. Y. (2004). Penyemaian Nilai Karakter Melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah (pp. 63–72). FIP Universitas Negeri Malang.
- Staden, A. van, & Purcell, N. (2016). Multi-Sensory Learning Strategies to Support Spelling Development: a Case Study of Second-Language Learners with Auditory Processing Difficulties. *International Journal on Language, Literature and Culture in Education*, 3(1), 40–61. <https://doi.org/10.1515/llce-2016-0003>
- Sukri, S. (2013). Implementasi pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (Smpit) Darul Azhar Aceh Tenggara. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/1731/>
- Sulistyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2, 1–10. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp08e4cbae56full.pdf>
- West, R. E., Thomas, R. A., Bodily, R., Wright, C., & Borup, J. (2017). An analysis of

instructional design and technology departments. *Educational Technology Research and Development*, 65(4), 869–888. <https://doi.org/10.1007/s11423-016-9490-1>

Zain, R. (2014). Implementasi Strategi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Concept Mapping berbasis Multiple Intelligence Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Hamzanwadi Selong Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Insan Mandiri*, Volume 3 N(3), 73–87.

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA BERLANDASKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Herlan Prasetyo

Universitas Negeri Malang
prasetyoherlan@gmail.com

Abstract: Character in a country is reflected by the character of its citizen. Character is defined as the distinctive good values (know the value of goodness, willing to do good, real good life, and good for the environment) is imprinted in and manifested in behavior. Character education has four basic principles. First, the regularity of each action and measured by the hierarchy of values. Values become the normative guidelines of every action. Second, the coherence that gives courage, makes a person firm on principle, not easily vacillated in new situations or fear of risk. Coherence is the foundation that builds trust in one another. Third, the autonomy that means, one internalizes the rules from the outside to the values for the person. This can be seen through judgments on personal decisions without being affected or the insistence of others. Fourth, firmness and loyalty. Persistence is a person's endurance to covet what is considered good. Loyalty is the basis of respect for the chosen commitments. These values of Pancasila become the basic foundation, as well as the motivation for all good deeds in everyday life in the family, community, and in the state.

Keywords: *Character, Education, Pancasila Values.*

Karakter akan menentukan tingkat kesuksesan dari seseorang. Dikatakan oleh Soedarsono (2008) bahwa, karakter merupakan sebuah nilai yang sudah terpatrit di dalam diri seseorang melalui pengalaman, pendidikan, pengorbanan, percobaan, serta pengaruh lingkungan yang kemudian dipadupadankan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang dan menjadi nilai intrinsik yang terwujud di dalam sistem daya juang yang kemudian melandasi sikap, perilaku, dan pemikiran seseorang.

Kemudian karakter juga diartikan sebagai nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik bagi lingkungan) yang terpatrit dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku (Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, 2010). Secara etimologi kata karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti sebuah instrumen untuk menilai, mengesankan, memberikan tanda khusus, dan watak khusus (*Oxford English Dictionary*). Tanda khusus ini adalah membedakan dari yang lain (pribadi) sehingga dapat mengukur kesan khusus (Budimansyah, 2014).

Karakter adalah sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma. Sifat pribadi maksudnya ciri-ciri yang

ada di dalam pribadi seseorang yang terwujudkan dalam tingkah laku. Relatif stabil adalah suatu kondisi yang apabila terbentuk akan tidak mudah diubah. Landasan berarti kekuatan yang pengaruhnya sangat besar/dominan dan menyeluruh terhadap hal-hal yang terkait langsung dengan kekuatan yang dimaksud. Adapun penampilan perilaku adalah aktivitas individu atau kelompok dalam bidang dan wilayah (*setting*) kehidupan (bidang kehidupan: ekonomi, kemasyarakatan, budaya/seni, agama, ilmu dan teknologi, hukum, politik, pertahanan dan keamanan, kehidupan global; dan wilayah kehidupan: pribadi, sosial, keluarga, pekerjaan, kewarganegaraan/kebangsaan, internasional/antarbangsa). Terakhir, makna standar nilai/norma adalah kondisi yang mengacu pada kaidah-kaidah agama, ilmu dan teknologi, hukum, adat, dan kebiasaan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian hidup berkarakter hidup yang dikehendaki, yakni yang menempuh jalan lurus mengikuti kaidah-kaidah nilai dan norma sesuai dengan trah manusia yang berorientasi kebenaran dan keluhuran (Prayitno dan Khaidir, 2011).

Karakter Manusia Indonesia

Karakter manusia Indonesia atau karakter bangsa Indonesia akan muncul pada saat seluruh komponen bangsa menyatakan perlunya memiliki perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan karsa serta olah raga seseorang atau sekelompok orang bangsa Indonesia.

Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, dan karsa serta perilaku berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, norma UUD NRI Tahun 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan Komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Budimansyah, 2014:12).

Proses pembentukan karakter bangsa dimulai dari penetapan karakter pribadi yang sama-sama diharapkan berakumulasi menjadi karakter masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa. Sebagai modal untuk penguatan pendidikan karakter manusia Indonesia diperlukan karakter bangsa yang lebih tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, toleransi, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi iptek yang semuanya dijiwai Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Telah tampak bahwa karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang berlandaskan Pancasila yang

memuat kepribadian yang sama-sama diharapkan sebagai jati diri bangsa Indonesia (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, 2010).

Menurut Wiyono (2012:94), bagi bangsa Indonesia sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi NKRI tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar keberagaman bangsa dapat dijabarkan sesuai dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki makna bahwa, meskipun dalam realitanya Indonesia memiliki sifat yang sangat heterogen atau majemuk baik dari aspek suku bangsa, ras, agama, kebudayaan, adat istiadat, dan lain-lain, tetapi tetap terintegrasi dalam kemanunggalan atau kesatuan.

Pendidikan Karakter

Pendidikan yang dirancang untuk membangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila harus dapat mensinergikan potensi empat pilar kecerdasan individu secara seimbang dan bersamaan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Sejalan dengan hal tersebut merujuk pada pernyataan Martin Luther King, *intelligence plus character*, pendidikan bertujuan untuk melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat. Kemudian pernyataan yang lain, *that is the goal of true education*, pendidikan karakter sebagai pilar dalam kecerdasan ganda perlu dikembangkan melalui Pendidikan (Suparlan, 2010).

Dalam pengertian yang lebih luas, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Martadi, 2010).

Pada lingkup Satuan Pendidikan merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi.

Secara makro pengembangan karakter dibagi dalam tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter

yang digali, dikristalisasikan, dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber, antara lain pertimbangan (1) filosofis: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta ketentuan perundang-undangan turunannya; (2) teoretis: teori tentang otak, psikologis, pendidikan, nilai dan moral, serta sosial-kultural; (3) empiris: berupa pengalaman dan praktik terbaik, antara lain tokoh-tokoh, satuan pendidikan unggulan, pesantren, kelompok kultural, dll. Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada tahap evaluasi hasil, dilakukan asesmen program untuk perbaikan berkelanjutan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi karakter dalam diri peserta didik sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter itu berhasil dengan baik, menghasilkan sikap yang kuat, dan pikiran yang argumentatif.

Pendidikan karakter dalam konteks mikro, berpusat pada satuan pendidikan secara holistik. Satuan pendidikan merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di satuan pendidikan. Pendidikanlah yang akan melakukan upaya sungguh-sungguh dan senantiasa menjadi garda depan dalam upaya pembentukan karakter manusia Indonesia yang sesungguhnya. Pengembangan karakter dibagi dalam empat pilar, yakni kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya satuan pendidikan; kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila

Fungsi daripada Pancasila salah satunya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, kemasyarakatan, dan dalam kenegaraan. Aktualisasi dalam kehidupan kenegaraan, misalnya perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Harapannya dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat untuk konsisten bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat nilai-nilai yang menjadi ciri khas karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila sebagai berikut.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa wajib menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setiap individu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang. Pendidikan karakter yang perlu dikembangkan bahwa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang adil dan beradab. Kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya dan tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sebagai manusia Indonesia kita dituntut untuk adil dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki rasa kasih sayang antar sesama masyarakat Indonesia tanpa ada rasa diskriminasi satu sama lain. Pendidikan karakter yang perlu dikembangkan bahwa, manusia Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan “tepa selira”, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lainnya.

3. Sila Persatuan Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang memiliki banyak penduduk oleh sebab itu kita harus menerapkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama dalam kehidupan sehari-hari

tidak boleh meninggalkan suatu orang, golongan, kelompok hal itu akan menjadikan perpecahan. Pendidikan karakter yang perlu dikembangkan bahwa, manusia Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Demokrasi merupakan hal terpenting dalam pemerintahan Indonesia, dalam hal memutuskan suatu masalah hendaknya dengan cara bermusyawarah akan menimbulkan rasa keadilan dan merupakan cerminan bagi bangsa Indonesia. Pendidikan karakter yang perlu dikembangkan bahwa, manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lainnya. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah. Pendidikan karakter yang perlu dikembangkan bahwa, manusia Indonesia

menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula perlu dibina sikap suka membantu kepada orang lain yang membutuhkan agar dapat hidup mandiri. Sikap demikian berarti setiap orang tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dan merugikan kepentingan umum. Demikian pula juga dibiasakan sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Karakter diartikan sebagai nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik bagi lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Pada lingkup Satuan Pendidikan merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi.

Secara makro pengembangan karakter dibagi dalam tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Sementara itu pendidikan karakter dalam konteks mikro, berpusat pada satuan pendidikan secara holistik. Satuan pendidikan merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di satuan pendidikan.

Kualitas pendidikan merupakan modal bagi seseorang agar sukses dalam kehidupannya. Pendidikan yang baik harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang ditetapkan disuatu

tempat. Indonesia telah menetapkan nilai-nilai luhur yang digali dari ideologi negara yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, kemasyarakatan, dan kenegaraan.

DAFTAR RUJUKAN

- A, Doni Koesoema. 2007. Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global. Jakarta: Grasindo.
- Abduhzen, Mohammad. 2013. Pendidikan Pancasila. (Artikel Online). (<http://bola.kompas.com/read/2013/04/26/02240329/Pendidikan.Pancasila>). Dikases pada 22 November 2017.
- Budimansyah, Dasim. 2014. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter. Bandung: Widya Aksara Press.
- Martadi, 2010. Grand Design Pendidikan Karakter. Makalah pada Saresehan Nasional Pendidikan Karakter Tahun 2010-2025. Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Prayitno dan Afriva Khaidar. 2011. Pendidikan Karakter-Cerdas: Pemikiran Alternatif Melalui Metode Klasikal dan Non-Klasikal. Bandung: Widya Aksara Pers bekerjasama dengan Lab. PPKn UPI.
- Republik Indonesia. 2017. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya. Bandung: Fokus Media.
- Republik Indonesia. 2010. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025.
- Sunarso. 2015. Diamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim. (Artikel Online). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soedarsono, Soemarno. 2008. Membangun Kembali Jati Diri Bangsa Peran Penting Karakter dan Hasrat untuk Berubah. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Suparlan, M. 2010. Pendidikan Karakter dan Kecerdasan. (online). (<https://suparlan.org/31/pendidikan-karakter-dan-kecerdasan>). Diakses pada 20 April 2018.
- Tanpa Nama. 2012. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan. (Artikel Online). (<http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/perkembangan-pknpendidikan.html#ixzz4wh9mz9Nt>). Dikases pada 27 November 2017.
- Wiyono, Suko. 2012. Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.